

BENTURAN

NU-PKI

1948 -1965

TIM PBNU

JAKARTA

2013

DEWAN PENELITI

- Penanggung Jawab : Dr. H As'ad Said Ali
- Pengarah : Drs. KH Chalid Mawardi
H. Baidlowi Adnan
- Konsultan : Dr. Hermawan Sulistyو
- Penulis : H. Abdul Mun'im DZ
- Peneliti Utama : Drs. H Agus Sunyoto MA.
Dr. Al Sastrwo Ng.
- Editor : Drs. Enceng Shobirin
Drs. Adnan Anwar

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang dengan inayah serta hidayah-Nya kami bisa menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberi syafaat kepada ahli shalawat dan para penebar salam. Dengan limpahan syafatnya kehidupan menjadi penuh barakah dan dipenuhi kebahagiaan.

Sesuai dengan amanat PBNU sebagaimana disampaikan sendiri oleh Rais Aam KH M. Sahal Mahfudz bahwa NU harus berbuat sesuatu saat menghadapi serangan PKI dan para pendukungnya sebagaimana dilancarkan oleh Majalah Tempo edisi Oktober 2012 yang mewakili pandangan Barat pada umumnya, baik Amnesty Internasional maupun Mahkamah Internasional. Mereka tidak mau tahu bahwa saat itu terjadi perang saudara, maka tidak ada pelaku tunggal atau korban tunggal. Baik NU maupun PKI sama-sama pelaku pertempuran dan sama-sama menjadi korban dalam pertempuran itu. Campur tangan Negara Barat beserta sejumlah perwakilannya seperti Komnas HAM, KontraS dan sebagainya ini akan memperkeruh masalah ini. Karena mereka anak-anak baru yang tidak tahu masalah yang sebenarnya.

Maka selain memberikan penjelasan pada warga NU secara langsung melalui forum seminar, briefing dan sebagainya, sebagaimana yang sudah dilaksanakan selama ini, juga memberikan perintah untuk menulis buku sejarah konflik NU-PKI yang dilihat dari sudut pandang NU sendiri. Menggali dan memaparkan apa yang dialami, dipikirkan, dirasakan dan dilakukan para kiai, santri dan pimpinan NU dalam menghadapi PKI sebagai kelompok *bughot* (subversif).

Saat ini banyak kalangan NU terutama generasi mudanya yang tidak lagi mengenal sejarah NU, termasuk sejarah benturan NU-

PKI, sehingga mereka mengikuti saja cara berpikir orang lain, baik akademisi maupun politisi yang memojokkan NU dalam peristiwa G-30S/PKI. Ada kelompok NU karena tidak tahu sejarah, akhirnya tidak bisa membela diri, karena mereka tidak memiliki cukup argumen. Ternyata banyak juga generasi tua yang mengalami peristiwa itu tidak mampu menjelaskan secara memuaskan tentang duduk perkaranya, sehingga persoalan itu menjadi mengambang. Akibatnya banyak kader NU yang bimbang. Tidak hanya tidak bisa membela NU, tetapi malah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan para ulama NU.

Buku ini mencoba mendudukan serangkaian peristiwa panjang sejak 1926 ketika PKI mulai memberontak dan kaitannya dengan pemberontakan PKI di Madiun 1948, hingga pemberontakan PKI 1965, merupakan satu rangkaian, yang agenda, strategi serta pelakunya sama, yang berkesinambungan dalam sebuah estafeta yang rapi dan terencana.

Tulisan ini mengetengahkan rangkaian peristiwa, bagaimana PKI melakukan propaganda, memprovokasi, meneror dan menyerang NU dan pesantren. Digambarkan pula bagaimana NU dan pesantren mempertahankan diri, menyerang balik dan menangkap mereka yang bersalah dengan menyerahkan pada aparat keamanan, baik Polisi, TNI maupun Kejaksaan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Kalaupun terjadi pembunuhan biasanya dalam posisi perang atau bentrokan masal atau bertarung satu lawan satu.

Penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang membantu proses penulisan buku ini seperti Romo Kyai Sahal Mahfudz sebagai motivator atau pendorong penulisan buku ini Pak Chalid mawardi, Pak Baidlowi Adnan, Pak As'ad said Ali, Pak Hermawan Sulisty, Pak Arif Ahyat dari UGM. Terima kasih juga saya sampaikan pada beberapa teman di daerah seperti Rifki Hasan dan H. Syarif di Bali, Pak Yaskuri dan Mas Zaenal Arifin di Medan, dan banyak teman lainnya yang membantu pengumpulan data dan informasi.

Dengan hadirnya buku sederhana yang menggunakan logika sederhana ini diharapkan mudah dibaca, mudah dicerna dan mudah dipahami dalam sebuah nalar yang sistematis. Buku sederhana ini tentu masih banyak kekurangan karena itu kritik dan saran selalu kami harapkan. *Alhamdulillah rabbil 'alamin.*

Jakarta 26 Agustus 2013.

H. Abdul Mun'im DZ

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah	I
B. Urgensi & Tujuan Penulisan Buku	5
BAB II POKOK TUDUHAN	II
A. Dramatisasi Jumlah Korban	II
B. NU Dituduh Alat TNI	17
C. Dari Belanda ke Belanda	18
BAB III ASAL USUL KONFLIK	23
A. Perbedaan Epistemologi dan Teologi	23
B. Perbedaan Kultur	28
C. Perbedaan Konsepsi Politik	32
BAB IV PEMBANTAIAN PARA KIAI DI MADIUN	35
A. Asal Usul Pemberontakan	35
B. Kiai NU dan Pemerintah Menjadi Korban	45
C. Memori Kekejaman & Meningkatnya Kewaspadaan	64
BAB V AKSI PEMANASAN PKI 1950-1964	75

A. Provokasi Politik PKI.....	76
B. Penghinaan pada Agama.....	93
C. Aksi Penyerobotan Tanah	100
D. Awal Provokasi PKI Bali 1965	108
E. Provokasi PKI di Sumatera Utara 1956-1964	113
F. NU Membela Kelompok Lain	119
G. Propaganda, Trauma dan Kewaspadaan	124

BAB VI MELETUSNYA G-30-S/PKI 1965128

A. Langkah NU Menghadapi G30S	132
B. Respon NU Jawa Timur	140
C. Respon NU Bali Terhadap Keputusan PBNU.....	146
D. Respon NU Sumut Terhadap Keputusan PBNU	152
E. Serangan Balik PKI	156
F. NU Sebagai Kekuatan Utama	161

BAB VII LANGKAH REKONSILIASI.....164

A. Rekonsiliasi Sosial yang Alama	167
B. Rekonsiliasi Politik.....	177

BAB VIII PENUTUP.....184

KEPUSTAKAAN.....190

LAMPIRAN192

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang kemudian dikenal dengan G-30-S/PKI itu merupakan peristiwa tragis yang tidak pernah dilupakan oleh bangsa ini, baik oleh kalangan TNI, kalangan NU maupun kalangan PKI sendiri. Peristiwa itu terus diingat karena peristiwa itu sangat mengerikan dan menyakitkan, sehingga selalu dikenang agar tidak berulang. Berbagai buku catatan dikeluarkan baik versi pemerintah atau TNI, adapula aversi perguruan tinggi baik lokal maupun dari Barat yang berpretensi netral walaupun seringkali terjebak pada satu sisi. Selain itu muncul berbagai buku versi PKI yang ditulis dalam bentuk berbagai memoir atau biografi yang semuanya membela diri, terutama tentang ketidakterlibatan mereka dalam peristiwa tragis tahun 1965 tersebut.

Dalam situasi begini membuat masyarakat awam menjadi bingung terutama diri kalangan generasi muda yang tidak ikut menyaksikan dan mengalami peristiwa tersebut, sehingga informasi apapun yang diterima tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya ataupun kekeliruannya, akhirnya padangan yang muncul belakangan begitu mudah diterima, sehingga saat ini telah mampu membersihkan PKI dari peristiwa 1965 itu, sehingga yang muncul bukan istilah G-30-S/PKI, melainkan G-30-S, di mana PKI tidak terlibat atau disangsikan keterlibatannya. Perubahan ini sempat menghebohkan saat diperkenalkan melalui buku pelajaran di sekolah. Memang awalnya Kol. Untung sendiri menyebut gerakannya sebagai Gerakan 30 September, tetapi ketika semuanya jelas bahwa pelaku Gerakan 30 September tersebut adalah PKI, maka ditegaskan menjadi G-30-S/PKI,

sebagai pengukuhan dan penegasan siapa pelakunya. Maka saat ini ketika para aktivis PKI pada bebas maka mereka merehabilitasi dirinya salah satunya menyangkal keterlibatan PKI.

Tentu generasi muda tidak bisa menyangkal pernyataan itu, termasuk di kalangan muda NU, karena tidak tahu mana informasi yang sebenarnya. Karena itulah ketika bertubi-tubi keluar informasi bahkan kemudian belakangan tidak hanya menyudutkan TNI dan pemerintah orde baru, tetapi sudah mulai menyudutkan NU, Ansor terutama Banser. Bahkan kalangan muda NU banyak yang terpengaruh oleh propaganda PKI dan simpatisannya tersebut hingga ikut menyalahkan para kiai dan ulama, sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dan harus minta maaf pada PKI. Hal itu karena tidak jelasnya peristiwa tersebut bagi mereka yang masih muda. Selain itu sejarah dibaca hanya sepotong yakni episode 1965. Karena hanya penggalan itu yang disajikan para sejarawan, yang menulis sejarah hanya secara *snapshot* (sepenggal) fragmen, tidak pernah meninjau rentang sejarah sebelumnya secara keseluruhan sejak 1945, 1950-an sampai 1965 yang diwarnai dengan ketegangan dan keganasan yang dilakukan oleh PKI, atas nama rakyat dan revolusi.

Mengingat hal itu maka sudah saatnya pihak NU mengeluarkan tulisan atau buku berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sebenarnya telah banyak buku dikeluarkan oleh PBNU tentang peristiwa tersebut, tetapi diterbitkan akhir 1960-an atau awal tahun 1970-an sebagai kesaksian awal, tetapi buku tersebut sulit didapat, sehingga tidak bisa dijangkau lagi oleh generasi muda. Perlu ditulis kembali buku yang memberikan informasi yang sesungguhnya terutama versi NU sendiri sebagai salah satu pelaku dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian mudah dibaca dan dipahami terutama oleh generasi muda NU agar mengetahui duduk perkara atau peristiwa 1965 yang sebenarnya. Terutama alasan pihak NU mengambil sikap tegas terhadap PKI. Kejelasan itu bisa menepis terjadinya kesalahpahaman dan tuduhan yang tidak mendasar terhadap NU sebagaimana yang dituduhkan kalangan PKI dan segenap simpatisannya termasuk kalangan

aktivis hak asasi manusia selama ini. Mereka menuduh NU telah melakukan kesalahan, sehingga memaksa NU dan TNI minta maaf pada PKI, seolah PKI menjadi korban yang tidak bersalah. Sementara pihak NU tidak pernah dilihat sebagai korban keganasan PKI.

Peristiwa tragis tersebut telah banyak ditulis orang, baik oleh sejarawan Indonesia sendiri maupun kalangan orientalis atau Indonesianis atau Belanda-Belanda. Untuk penulisan ini kami terpaksa membaca berbagai macam buku Belanda tentang pemberontakan PKI mulai tahun 1926, 1945, 1948 hingga 1965, yang sudah lama dibaca orang. Seperti buku *Madiun 1948 PKI Bergerak*, dan buku *The Dark Side of Paradise*, karya Geoffrey Robinson, tentang pembantaian PKI Bali, buku Victor M Fic, *Anatomy of Te Jakarta Coup October 1965*, yang membahas Kudeta 1 Oktober 1965. Tentu saja juga buku Ben Anderson dan Ruth T McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1 Coup in Indonesia*, dan segudang buku terlanjur dianggap babon tentang PKI lainnya. Tetapi setelah semuanya rampung dibaca terpaksa harus segera ditutup kembali, lantas dibungkus rapi dan dimasukkan kotak, karena semuanya tidak berguna untuk kebutuhan ini. Sebaliknya justru kami mendapatkan informasi penting dari berbagai buku yang selama ini dianggap tidak penting, tetapi memberi informasi yang kaya, berupa memoar dan biografi para tokoh terkemuka NU seperti serangkaian karya KH Saifuddin Zuhri, KH Wahid Hasyim, KH Hasyim Asy'ari, KH Muhammad Ilyas, KH Wahab Hasbullah, KH Idham Chalid KH Masykur dan buku-buku cacatan tentang PKI lokal yang ditulis oleh Drs Agus Sunyoto, Abdul Hamid Willis, Hermawan Sulisty, termasuk sejarah Ansor yang ditulis Choirul Anam dan sebagainya. Buku tersebut lebih mencerminkan pandangan NU. Buku yang ditulis KH Chalid Mawardi *Pranctica Politica*, merupakan sumber penting dalam penulisan ini. Sesuai dengan tujuan penulisan buku ini adalah untuk menegaskan pendirian PBNU tentang peristiwa G-30-S/ PKI, sehingga perasaan, pikiran, pandangan dan sikap para

pimpinan NU di semua jajaran itu menjadi informasi yang sangat penting dalam mengkontruksi benturan NU PKI.

Karena itu cara penyajian buku ini dibuat sesederhana mungkin, mulai bagaimana PKI melakukan provokasi, lalu bagaimana NU menyikapi dan bagaimana konflik terjadi. Cara penyajian itu setidaknya bisa menjernihkan masalah dan sekaligus bisa keluar dari berbagai macam konspirasi yang ada. Ini untuk menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan NU merupakan tindakan otentik sesuai dengan batas dan tuntunan agama. Cara pandang NU terhadap kiprahnya sendiri dan cara mencitrakan diri itulah yang ingin diungkap dalam buku ini. Inilah yang telah dikembangkan dalam historiografi NU dalam melakukan serangkaian penulisan sejarah NU.¹ Dengan paradigma penulisan seperti itu diharapkan NU bisa mencitrakan dirinya sendiri, memberikan argumen setiap pikiran, sikap dan tindakan. Selama ini hanya mendapat argumen dari tulisan orang lain, tanpa mendengarkan argumen kalangan NU sendiri, sehingga seringkali terjadi bias atau penyimpangan yang merugikan kelompok NU, karena pencitraan yang salah dalam penulisan sejarah.

B. Urgensi Penulisan

Mengingat buku ini merupakan buku pegangan yang bersifat panduan bagi warga NU terutama kalangan mudanya untuk memahami kebijakan dan stretegi politik NU, terutama dalam menghadapi PKI saat terjadi peristiwa G-30-S PKI, maka buku ini ditulis dengan sistematika yang sederhana dan logika yang sederhana pula dengan mengetengahkan beberapa contoh peristiwa. Pemaparan berbagai peristiwa atau provokasi yang dilakukan oleh PKI, kemudian juga menggambarkan bagaimana kalanagan NU dan Pemuda Ansor mereponnya, sehingga dengan mudah diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Ansor sebagai upaya membela diri, untuk mempertahankan nyawa, agama, dan Negara.

¹ Abdul Mun'im DZ dan Adnan Anwar, *Historiografi NU*, naskah belum diterbitkan, Jakarta 2001.

Ibarat sebuah silogisme dalam ilmu manthiq, maka provokasi dan aksi kekejaman PKI itu sebagai *mukadimah shughro* (premis minor), sementara prinsip NU sebagai *mukadimah kubro* (premis mayor), maka sikap dan tindakan NU itu sebagai *natijah* (konklusi), dengan logika seperti itu aksi reaksi serta akibat yang ditimbulkan bisa dipahami dalam sebuah pemikiran yang logis dan sistematis. NU berprinsip bahwa;

Setiap bughat (makar) harus ditindak.

PKI melakukan bughat.

Maka PKI harus ditindak.

Dengan bentuk pemaparan seperti ini maka diperlukan data dan peristiwa sebanyak mungkin yang dialami oleh kalangan NU sendiri, jadi ini hampir semuanya berupa pengalaman dan kesaksian, bukan analisa, sehingga data yang dipergunakan masih orisinal. Dengan cara ini juga bisa mengurangi ketergantungan pada sumber asing yang biasanya sudah dianalisa dan diinterpretasikan sesuai dengan pandangan hidup dan visi ideologis mereka. Karena itu banyak buku penting yang ditulis oleh para oreintalis atau Indonesianis diabaikan, karena tidak relevan dengan skema buku ini. Sementara banyak karya kecil yang dilupakan justeru digunakan, karena relevan dengan logika penulisan buku panduan ini.

Penyajian yang bersifat kronik ini memudahkan pembaca dalam melihat adanya rangkaian peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi pada masa penjajahan tahun 1926, yang pelakuknya adalah Alimin, Semaun Muso dan sebagainya, kemudian kabur ke luar negeri. Setelah balik dari pelarian di luar negeri mereka melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948. Para bekas pemberontak Madiun, para pimpinan pemberontak lari kembali ke luar negeri. Setelah balik dari pelarian di luar negeri, kembali ke tanah air seperti Aidit dan kawannya kembali melakukan pemberontakan, dibantu para perwira TNI terutama dari Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang dulu pernah aktif dalam pemberontakan Madiun seperti Kol. Latif yang memimpin pemberontakan G-30S PKI di Jakarta dan komandan Pesindo

yang lain seperti Mayor Moelyono Pemimpin Gestapu di Yogyakarta dan Mayor Wisnuraji yang membantai Kol. Katamsa dan Letkol. Soegiono. Rangkaian dari pemberontakan PKI 1926, dan pemberontakan PKI 1948 dengan pemberontakan PKI 1965 begitu erat, sebagai sebuah mata rantai. Baik agenda, strategi serta pelakunya saling berkaitan, yang masing-masing sebagai episode dalam sebuah drama besar, yang berakhir dengan kekalahan yang pahit dan mengenaskan. Ketika para pembuat scenario tidak mamapu mengendalikan skenarionya sendiri.

Dengan penggambaran seperti itu maka yang disebut korban tidak hitam putih, PKI sebagai korban sementara NU dan TNI sebagai pelaku penjagalan. Ini pandangan umum para blanda itu, sebab pihak NU dan TNI serta bangsa Indonesia juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Sebagai contoh yang terjadi di Yogyakarta sekitar tahun 2000, ketika didirikan sebuah partai yang berafiliasi kiri, seorang aktivis yang mantan anggota Pemuda Rakyat dari partai tersebut menegaskan bahwa dirinya merupakan korban dari Ansor. Pernyataan langsung saja disergah oleh para pemuda Ansor yang sejak tadi mengamati jalannya deklarasi partai tersebut, dengan maju ke depan dan menantang dengan mengatakan:

“Saya ini juga korban, PKI ketika saudara kuat saudara menguber-uber saya mau menculik saya sehingga saya sekeluarga harus mengungsi. Saya saat itu menjadi korban kegarangan saudara. Membalikkan fakta. bahwa selama ini anda dikejar-kejar oleh Ansor dan TNI karena anda pelaku makar, kalau anda saat itu menang pasti kami akan menjadi korban.”

Hal serupa juga dialami oleh puteri Jenderal Sutoyo yaitu Ny Nani Sutoyo yang menjadi Korban PKI 1965. Dalam sebuah pertemuan di Yogyakarta seorang bekas Pemuda Rakyat mengatakan pada puteri korban itu:

“Enak amat saudara, ayah jadi korban lalu mendapatkan gelar pahlawan, sebaliknya kami justeru menjadi buruan”, dengan tegas Ibu Sutoyo menjawab;

“Justeru saya ini menajdi korban keganasan saudara-saudara yang PKI itu sehingga ayah saya meninggal, yang hal itu menimbulkan trauma dan kesedihan saya yang waktu itu masih SMP, jadi penderitaan keluarga kami tidak bisa ditukar dengan seribu gelar pahlawan.”²

Pandangan PKI semacam itu terjadi karena PKI tidak pernah melihat apalagi mengakuai tindakannya selama belasan tahun sebelum peristiwa 1965 yang penuh teror dan kekejaman. Ketika disapu oleh para musuhnya mereka merengek minta perlindungan, merasa tidak bersalah, merasa didlolimi. Padahal ketika PKI membuat aksi sepihak, maka pihak lain merespon sehingga terjadi pertempuran horizontal. Dalam sebuah konflik horizontal mana korban mana pelaku menjadi sangat rumit, tetapi motifnya sangat jelas, yang satu menyerang untuk mewujudkan ambisinya, pihak yang lain bertahan untuk membela negara dan agama. Motif itu yang membedakan keduanya sebab keduanya pelaku dan kedua belah pihak terdapat korban. Kenyataan ini yang dihapus oleh PKI ketika kalah perang. Maka yang dilakukan sekarang mengadu pada para juragan mereka para Belanda itu.

Dalam sebuah konflik sosial memang antara aktor dan korban tidak bisa dilihat secara hitam putih sebagaimana PKI dan para pengamat melihatnya. Apalagi dalam kenyataannya juga ratusan korban dari kalangan kiai. Apalagi kalau dihitung sejak dari peristiwa Madiun hingga Peristiwa 1965 banyak sekali kalangan kiai, dan Ansor yang menjadi korban keganasa PKI. Sementara PKI menutupi kenyataan itu, sehingga merasa dirinya tidak salah hanya dijadikan sasaran kekerasan oleh NU dan TNI. Cara pandang dan berbagai klaim itulah yang hendak dijelaskan dalam buku ini.

Penjelasan tersebut diurai dalam sistematika tulisan sebagai berikut; *Pertama*, menjelaskan berbagai poko soal yang disengketakan sekitar pemberontakan PKI, juga tentang perbedaan falsafah antara kelompok PKI yang merupakan produk

² Peristiwa ini dipaparkan kembali oleh Hermawan Sulsistyو dalam Lokakarya penulisan Buku ini pada 27 Juni 2013.

renaissance kebudayaan Barat yang humanistik dan ateistik. Berlawanan arah dengan NU dan Islam pada umumnya yang berpandangan religius dan moralis. *Kedua*, memaparkan berbagai ulah PKI dalam membuat provokasi serta pemberontakan sebagai jalan hidup dan strategi perjuangan politik mereka. *Ketiga*, menjelaskan respon NU terhadap provokasi PKI selama beberapa dasawarsa yang berujung pada penumpasan tahun 1965. *Keempat*, memaparkan korban dari kedua pihak. *Kelima*, menjelaskan terjadinya proses rekonsialisai sosial yang bersifat alami sebagai tanggung jawab agama dan bangsa yang dilakukan NU terhadap sisa PKI.

Sistematika penulisan yang sederhana dalam arti tegas dan terinci seperti itu dimaksudkan agar tulisan ini mudah dipahami, lebih mengutamakan data dengan sedikit membuat kupasan dan pemaknaan. Tulisan ini sengaja disuguhkan dalam bentuk kronik dan deskriptif ketimbang uraian yang bersifat diskursif. Dengan demikian ketegasan dan ketajaman tetap terjaga.[]

BAB II

POKOK TUDUHAN

Peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 itu menjadi trauma besar bagimat Islam sebab, kalau tidak ada langkah dan gerak cepat sudah dibayangkan Indonesia akan menjadi negara komunis, apalagi jumlah anggota PKI saat itu menurut Ketua BPI Subandrio sudah mencapai 20 juta. Dengan berdirinya Negara Komunis Indonesia dibayangkan akan terjadi banjir darah. Islam akan sirna dan republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Islam hanya dalam sejarah masa lalu. Dengan perkiraan semacam itu lalu umat Islam menjadi waspada, kemudian melakukan balasan terhadap serangan yang dilakukan PKI. Bahkan ketika PKI melakuakn pemberontakan umat Islam dalam hal ini NU dengan Ansor dan Banser-nya melakukan langkah penyelamatan rakyat, agama dan negara dengan menumpas PKI. Dengan semangat seperti itu berani bergerak tanpa peralatan senjata yang lengkap dan tanpa dukungan logistik yang memadai.

A. Dramatisasi Jumlah Korban PKI.

Peristiwa pemberontakan PKI 1965 itu menjadi persoalan di kemudian hari ketika banyak pihak yang awalnya hanya melakukan pengamatan lalu bertindak sebagai pembela PKI. Mereka menuduh TNI dan Ulama melakukan pembantaian secara sepihak terhadap PKI, sehingga mengakibatkan korban dengan jumlah yang sangat besar. Karena tidak ada pencatatan resmi maka jumlah besar itu kemudian diperkirakan kepastiannya dengan berbagai cara, maka muncul perkiraan yang berbeda-beda. Yang menarik di sini adalah adanya perbedaan mencolok antara perkiraan yang dilakukan oleh kalangan Indonesia sendiri, baik kalangan pelaku, pemerintah dan pengamat, dengan kelompok asing baik politisi maupun pengamat.

Kalangan Indonesia walaupun semua pihak baik kalangan PKI maupun non PKI semuanya tentu diliputi suasana pedih dan emsional. Namun demikian masih bisa bersikap lebih proporsional. Jumlah korban yang diperkirakan oleh Tim Pencari Fakta sendiri, tidaklah terlalau dramatis, begitu juga pengakuan kalangan PKI sendiri yang menjadi korban. Sudisman dari PKI memperkirakan korban sebanyak 150.000. bahkan ia

memperkirakan tidak lebih dari 50.000. Begitu juga jumlah yang dipercaya Bung Karno yang selama ini memiliki simpati yang besar pada PKI memperkirakan jumlah korban hanya sekitar 60.000. Perkiraan ini berdasarkan temuan Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh Komando Operasi Tertinggi (KOTI) pada Desember 1965. Ketika diadakan penyelidikan lanjutan ditemukan korban 87.000. Bahkan setelah dilakukan penyelidikan dengan cermat menemukan jumlah korban di daerah yang paling gawat yaitu Jombang dan Kediri berkisar antara 11.256 sampai 17.260 orang korban.³ Diperkirakan jumlah korban di daerah lain lebih kecil dari jumlah itu.

Berbeda dengan para politisi asing, media asing dan pengamat asing cenderung membesar-besarkan jumlah korban yang hingga mencapai angka sangat spektakuler hingga jutaan orang. Pola ini ketika dicek langsung ke lapangan ternyata terjadi kejanggalan antara jumlah penduduk dengan korban, sehingga ditemukan korban lebih banyak ketimbang jumlah penduduk yang ada. Dan juga tidak mudah bagi lawan PKI untuk membunuh dan merawat mayat yang jumlahnya jutaan dalam saat sekejap, ini juga bentuk kejanggalan yang lain. Tabel berikut ini bisa menjelaskan prakiraan tersebut.

JUMLAH KORBAN PKI MENURUT PANDANGAN DALAM NEGERI

NO	PELAKU/PENGAMAT	JUMLAH
1	Soekarno	60.000
2	Adam Malik	150.000
3	Sudisman PKI	180.000
4	ABRI/TNI	40.000

³ Hermawan Sulistyono, *Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian Massal yang Dilupakan (Jombang-Kediri) 1965-1966*, Penerbit Pensil Jakarta, hal., 36-38.

5	Hermawan Sulistyو (Kediri – Jombang)	25.000
---	--------------------------------------	--------

Sumber: diolah dari data Hermawan Sulistyو dan beberapa sumber lain.

Sementara itu di sisi jumlah korban PKI yang diperkirakan oleh pihak pengamat dan politisi dan media Asing (Barat) sedemikian besar. Tak urung besarnya jumlah yang mereka lansir itu membuat heboh masyarakat Barat dan masyarakat Indonesia sendiri, sehingga muncul rasa iba dan simpati, hal itu kemudian dilanjutkan dengan langkah melakukan advokasi. Berbeda dengan jumlah yang diperkirakan bangsa Indonesia baik para pelaku maupun korban yang pada umunya lebih proporsional. Sebaliknya kalangan Barat menyuguhkan perkiraan yang sangat spektakuler. Bayangkan orang yang selama ini terlanjur dipercaya pendapatnya seperti Ben Anderson memperkirakan jumlah korban PKI antar 500.000 hingga 1.000.000 orang. Sebuah perkiraan yang angat mustahil dan dinilai sangat fiktif. Tetapi karena reputasi akademiknya selama ini maka data fiktif tersebut cenderung dipercaya, bahkan menjadi rujukan para peneliti sesudahnya. Hal itu mempengaruhi opini publik baik kalangan cendekiawan maupun jurnalis. Bisa dilacak turunanya seperti perkiraan yang dibuat oleh Koran *The New York Times*, Geoffrey Robinson, Tornquist, Pluvier, juga sebuah lembaga kemanusiaan *Repression & Exploitation* ikut mendramatisasi jumlah korban yang mencapai jutana orang. Penggelembungan yang mengarah pada dramatisasi jumlah korban itu bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

JUMLAH KORBAN PKI MENURUT PENGAMAT ASING

NO	PENGAMAT	JUMLAH
1	Ben Anderson	500.000-1.000.000
2	Fraye dan Jackson	100.000-500.000
3	Pluvier	500.000-1.000.000

4	The New York Times	150.000-400.000
5	John Legge	250.000.
6	Repression&Exploitation	500.000-1.000.000
7	Geoffrey Robinson	500.000-1.000.000

Sumber: diolah dari Hermawan Sulistyio

Penggelembungan jumlah korban PKI yang dilakukan para penulis Barat itu ketika dicek ke lapangan oleh Hermawan Sulistyio terdapat banyak kejanggalan ketika dikonfrontasi dengan data demografis di lapangan. Menurutny korban yang berkaitan dengan karyawan Pabrik Gula di beberapa tempat di Jawa Timur itu terdata dengan rapi, dan itu jumlahnya hanya belasan hingga puluhan orang saja. Begitu pula daerah yang mayoritas penduduknya PKI penduduknya tidak berkurang secara signifikan. Tetapi dramatisasi jumlah korban PKI itu telah dipercayai banyak orang dan menimbulkan rasa simpati pada PKI, kemudian menyalahkan pelaku baik NU maupun TNI, tanpa mau peduli terhadap kesalahan dan kekejaman PKI selama ini. Dramatisasi jumlah korban dari PKI ini menjadi komoditas politik yang sedang diajakan di pasar opini internasional.

Selain itu para politisi asing dan peneliti asing tidak pernah mengungkap jumlah korban para ulama dan rakyat yang dibantai oleh PKI baik selama peristiwa Madiun 1948 apalagi peristiwa sepanjang tahun 1950 hingga tahun 1968 yang dilakukan PKI terhadap rakyat Indoneisa baik terhadap NU maupun kelompok lainnya termasuk terhadap tentara ini juga tidak pernah diungkap. Para orientalis atau Indonesianis itu melihata bahwa peristiwa 1965 itu aksi sepihak kalangan Islam dan TNI untuk membasmi PKI. Tidak pernah melihat peristiwa teror, provokasi serta pembantaian yang dilakuaakan oleh PKI beberapa dasawarsa sebelumnya. Tulisan bohong yang menyesatkan seperti itu disertai pengelembungan jumlah korban itu sampai di telinga Amnesti Internasional, sehingga lembaga itu geram. Begitu juga kabar

menyesatkan itu membuat Mahkamah Internasional marah. Tidak urung dewan Hak Asasi Manusia PBB juga naik pitam. Akhirnya lembaga tersebut memaksa lembaga swadaya masyarakat Indonesia untuk menekan pemerintah dan umat Islam untuk meminta maaf dan mengembalikan politik dan perdata para korban PKI. Sementara korban keganasan PKI yang dialami pihak Umat Islam dan NU khususnya dianggap tidak ada, tidak pula dibela. Maka buku ini berusaha menampilkan informasi seimbang dengan menunjukkan korban dari kalangan Pimpinan NU yang dibantai PKI, yang ini sangat diabaikan oleh para pengamat asing yang dikenal cermat itu, tetapi selalu rabun dalam melihat kenyataan yang sesungguhnya.

Dalam kenyataannya sebagai kekuatan politik Islam terbesar di Indonesia saat itu, memang NU berperan besar dalam penumpasan pemberontak PKI itu, dengan alasan membela diri dan membela agama dan membela Negara yang semuanya wajib hukumnya bagi setiap warga NU dan umat Islam pada umumnya. Bagi generasi muda yang tidak tahu kewajiban agama dan kewajiban Negara menilai langkah NU untuk membela Negara dari gerombolan pemberontak PKI yang akan mengkommunikasikan negeri ini dianggap sebagai tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan. Kalau NU sebagai kekuatan sosial dan politik Islam terbesar di negeri ini tidak bertindak tegas, maka PKI bisa merebut kekuasaan, karena pihak lain seperti TNI, PNI dan partai lain termasuk aparat kepolisian serta pemerintahan telah banyak dimasuki PKI. Hanya kekuatan NU yang tidak bisa dimasuki PKI karena beda akidah, beda tradisi dan beda ideologi. Sehingga dalam peta kekuatan nasional tinggal NU yang bisa bertindak tegas karena tidak dihambat oleh kawanannya PKI dari dalam. Sementara kalangan TNI masih sangat direpotkan oleh adanya infiltrasi PKI, sehingga melakukan pembersihan dari dalam.

B. NU Dituduh Alat TNI

Kalangan NU paham betul bahwa TNI adalah aparat yang bertanggung jawab terhadap keamanan nasional, karena itu sejauh

apapun NU melakukan langkah politik selalu berkordinasi dengan TNI. Walaupun saat itu sulit membedakan mana TNI yang PKI dan bukan PKI, tetapi karena kemitraan telah lama dijalin, maka dengan mudah bisa bekerjasama dengan TNI. Maka yang bisa dilakukan dalam menghadapi pemberontakan PKI selama ini bertindak bukan melampaui kewenangan TNI, tetapi sebagai tanggung jawab dalam situasi darurat menyelamatkan agama dan nagera, baru setelah berkordinasi dengan TNI. Karena NU dituduh telah berbuat salah dalam membasmi pemberontak PKI itu, maka NU disuruh meminta maaf kepada para aktivis PKI dan keturuannya. Bahkan kemudian dipaksa melakukan rekonsiliasi, padahal tanpa disuruh, sebagai tanggung jawab sosial dan kemanusiaan NU telah menyantuni para korban dari pihak PKI, termasuk anak cucunya yang terlantar.

Langkah NU yang berkordinasi dengan TNI itu diputarbalikkan oleh para pengamat dan juga oleh PKI sendiri bahwa NU diperalat oleh TNI. Hal itu tentu tidak sesuai dengan kenyataan, sebab permusuhan NU dengan PNI itu didasari atas perbedaan akidah dan ideologi perjuangannya. Dan perbedaan serta konflik sosial antara NU dengan PKI itu telah terjadi sejak tahun 1947 dan terus berkelanjutan hingga tahun 1948 lalu berlanjut lagi pada tahun 1950-an dan berpuncak pada pertengahan tahun 1960-an, di mana kedua kelompok itu bertikai dan bertempur untuk memperebutkan tanah, yang diklaim PKI dan membalas PKI yang menghina agama dan Tuhan. Artinya tanpa disuruh TNI pun NU telah berhadapan dan benturan dengan PKI, karena PKI merupakan musuh yang sudah berkonflik selama beberapa dasa warasa. Sementara kerjasama NU TNI dalam menghancurkan PKI baru terjadi di penghujung tahun 1965 itupun dengan TNI yang segaris. Sebelumnya NU sendirian menghadapi berbagai seraanngan yang dilakukan PKI sejak awal tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1965.

C. Dari Belanda ke Belanda.

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa PKI lahir pada masa penjahan Belanda yang dibawa dan dilahirkan oleh orang-orang

Belanda beraliran kiri untuk melawan Belanda yang beraliran kanan dengan cara mendidik dan melibatkan orang-orang Indonesia. Langkah Belanda terhadap PKI Indonesia sebagai berikut: **Pertama**, Belanda datang membawa Komunisme dan mendirikan PKI dibawa oleh Sneevliet, seorang aktivis Komunis Belanda yang mendirikan gerakan Sosial Demokrat Hindia Belanda (ISDV). Organisasi itu yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920-an. Organisasi itu dengan gigih mengganggu pemerintahan Belanda hingga tahun 1926 melakukan pemberontakan, juga didalangi oleh beberapa tokoh komunis Belanda, tetapi yang jadi korban adalah orang-orang Indonesia termasuk banyak para Kiai yang berjuang melawan Belanda atas inisiatif sendiri dan dengan tujuan sendiri kemudian dituduh komunis lalu dibuang ke Digul bersama tokoh PKI.

Kedua, Belanda membantu PKI memberontak 1948. Dalam pemberontakan PKI di Madiun jelas sekali Belanda memberikan bantuan logistik kepada pemimpin PKI Amir Syarifuddin. Turut menyiarkan berbagai propaganda selama PKI menguasai daerah Madiun-Solo dan sekitarnya melalui koran dan Radio Belanda. Selain itu Belanda melindungi para pemberontak ketika mereka dipukul mundur oleh TNI dan kemudian melindungi mereka di daerah jajahannya, bahkan para tokohnya seperti Aidit, Alimin dan Soemarsono dilarikan ke luar negeri agar selamat dan bisa kembali berkonsolidasi.

Ketiga, Belanda mendorong mitra Indonesianya untuk memukul PKI sebagai langkah untuk mendongkel Presiden Soekarno yang nasionalis dan populis. Langkah itu sekaligus untuk memenangkan Perang Dingin antara blok Barat pimpinan Amerika Serikat dengan Blok Timur pimpinan Uni Soviet dan Cina.

Keempat, Belanda mengerahkan tim peneliti dari seluruh dunia. Setelah kudeta PKI yang gagal tahun 1965 itu selesai, maka para orientalis atau Indonesianis yakni para Belanda baik yang berasal dari negeri Belanda dan masyarakat Eropa dan Amerika pada

umumnya atas nama ilmu pengetahuan melakukan serangkaian penelitian ilmiah yang dibiayai universitas terkemuka melakukan penelitian peristiwa tersebut, dengan fokus PKI sebagai korban. Tidak kalah seriusnya *Jurnal Indonesia* terbitan Universitas Cornell secara rutin mengespos para korban PKI. Penelitian dilakukan dengan cara besar-besarkan jumlah korban, mengespos kekejaman. Tulisan tersebut dicetak luas dalam bentuk buku yang dibaca oleh masyarakat dunia, sehingga lambat laun mempengaruhi opini mereka, dan menarik simpati mereka pada PKI, termasuk menyesatkan para mahasiswa dan pemuda Indonesia yang tidak kritis.

Kelima, Belanda datang sebagai pembela PKI. Setelah opini dunia terbentuk melalui buku dan tulisan yang tersebar, kemudian menimbulkan simpati umum, dari situlah kemudian dalih kemanusiaan dimainkan. Dengan dalih kemanusiaan pembelaan terhadap PKI mulai dilakukan, dengan cara melakukan serangkaian tuduhan. Hal itu menjadi serius karena mereka melakukan tuduhan pada pemerintah, TNI, termasuk NU telah melakukan genosida, sehingga harus diadili di Mahkamah internasional. Pihak Amnesty Internasional dan Mahkamah internasional, misalnya hingga saat ini gigih memaksa kalangan LSM seperti KontraS dan terutama Komnas HAM dan media massa untuk menyelidiki dan menuntut pelaku pemberantasan PKI itu ke meja pengadilan. Komnas HAM telah menetapkan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM berat karena itu pelakunya harus dihukum dan diharuskan minta maaf atas pembantaian terhadap PKI tersebut.

Itulah langkah pihak asing terutama Belanda dan Sekutu untuk melestarikan kendalinya terhadap Republik ini antara lain dengan menggunakan isu PKI. Sebenarnya bagi komunitas PKI sendiri telah memahami duduk persoalannya, memang ada beberapa tokohnya yang tetap melakukan tuntutan, tetapi sebagian besar diam, karena kalau dibongkar kedudukan mereka di TNI dan birokrasi serta partai politik bila terungkap akan menghadapi stigma sosial yang tidak siap mereka hadapi, ketimbang

mendapatkan grasi politik yang mereka tidak lagi butuhkan, karena itu para keturunan PKI yang sudah tobat itu lebih senang menutup masa lalu itu dengan cara rekonsiliasi alami yang telah terjadi sejak akhir tahun 1960-itu ketimbang mengharapkan rekonsiliasi politik yang justru akan membongkar konflik lama yang akan membuka terjadinya konflik baru.

Para Belanda, aktivis pembela PKI di luar negeri itu rupanya tidak memahami aspirasi anak cucu bekas PKI selama ini, sehingga mereka terus berteriak mengajukan tuntutan pada pemerintah dan NU dan TNI untuk kebebasan dan hak-hak PKI. Padahal di sisi lain tuntutan itu mengancam anak cucu bekas PKI yang sudah menjadi warga Indonesia yang baik dan beragama serta bermasyarakat dengan baik serta mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara dengan sempurna baik hak politik, ekonomi dan budaya.

Maka sebenarnya tidak ada pihak di Indonesia yang diuntungkan dengan berbagai ungkitan serta pengobaran kebencian serta kemarahan sebagaimana dilakukan oleh para Belanda belakanagan ini kecuali para Belanda itu sendiri. Rekonsiliasi yang telah terjadi secara alami akan terganggu, sementara rekonsiliasi politik yang telah kita rencanakan akan mereka rebut atas nama objektivitas, pengalaman dan pendanaan akan menjadi proyek besar yang hendak mereka kendalikan. Karena ini sangat berkaitan dengan likuiditas bank yang harus terus mendapatkan nasabah untuk memutar modal mereka. []

BAB III

ASAL USUL KONFLIK

Dalam bab ini selain akan menguraikan perbedaan antara NU dengan PKI juga sangat perlu menjelaskan antara NU dengan para pengamat terutama para Indonesianis. Perbedaan antara NU dengan para akademisi pada dasarnya adalah perbedaan yang bersifat ideologi. Tetapi orang sering menyangka bahwa perbedaan NU dengan para akademisi terutama para Indonesianis itu hanya bersifat epistemologis, yaitu perbedaan dalam paradigma pemikiran. Perbedaan tersebut tidak sekadar perbedaan epistemologis tetapi juga mencerminkan perbedaan ideologis dan politis. Pada dasarnya orientalis sejak nenek moyangnya bernama indologi, adalah merupakan alat colonial untuk memperkuat kekuasaan. Karena itu perbedaan tersebut perlu diuraikan agar para orientalis tidak lagi berdalih kebenaran ilmiah, atas berbagai propagandanya tersebut.

A. Perbedaan Epistemologi dan Ideologi.

Untuk memahami terjadinya pertentangan yang mendalam antara masyarakat Islam dan warga NU khususnya dengan komunisme memang merupakan perbedaan dasar baik yang bersifat filosofis, teologis dan sekaligus ideologis. Islam adalah agama yang berdasarkan pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mempercayai alam gaib dan akhirat atau adanya hidup sesudah mati. Selain itu mengajarkan seperangkat aturan yang disebut dengan syariat sebagai tuntunan dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Hal itu sangat berbeda dengan Marxisme, Leninisme dan komunisme yang berpijak pada filsafat materialisme, yang menganggap bahwa realitas hanya satu yaitu benda (materi). Di

situ tidak ada hal yang di luar materi.⁴ Tuhan sebagai hal yang imateri dianggap tidak ada. Karena itulah kepercayaan dasar Marxisme adalah ateisme. Sementara Marxisme lahir dari gairah filsafat Barat yang berawal dari renaissance, yang berangkat dari ketidakpercayaan pada agama dengan berpijak pada akal pikiran manusia, bahwa manusia dengan akal pikirannya bisa menguasai segala-galanya. Berbeda dengan kepercayaan agama yang menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan, sebaliknya filsafat Barat produk renaissance itu menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan, sehingga dirumuskan dalam sebuah diktum; *man is measure of the all of thing* (manusia menjadi ukuran segala sesuatu). Kebaikan dan keburukan suatu hal diukur dari manfaat dan madlorot bagi akal dan nafsu manusia. Di situ tidak ada pertimbangan agama. Manusia menjadi pusat segalanya, inilah yang disebut pemikiran humanis atau humanisme yang bersifat antroposentris⁵. Lahirnya humanisme barat adalah dalam rangkai melawan teosentrisme, karena itu watak dasar humanism ini adalah individualis, liberal dan ateis.

Filsafah itu kemudian diterjemahkan secara lebih konseptual dalam pemikiran ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh August Comte bahwa pikiran manusia itu berkembang dari tahap mitis, teologis dan berpuncak pada pemikiran positif, yaitu pemikiran yang bisa diuji secara empirik. Pemikiran positivisme ini mengingkari pemikiran teologis, yang digolongkan sebagai pemikiran tidak ilmiah. Hal itu kemudian dikembangkan dalam biologi oleh beberapa pemikir seperti Charles Darwin dan sebagainya dengan pengembangan teori evolusi, yang merumuskan bahwa alam semesta terjadi melalui proses alami (*evolution*). Teori itu sengaja dirumuskan untuk mengingkari adanya konsep *creation* (teori penciptaan) oleh Tuhan. Di tangan

⁴ VA. Fanasyev, *Marxist Philosophy*, Foreign Language Publishing House, Moscow, 1950, hal 26.

⁵ JB Bury, *A History of Freedom of Thought*, Oxford University Press, Oxford 1952.

Thomas H Huxley⁶ teori tersebut berkembang menjadi dasar penolakan terhadap ajaran agama. Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Karl Marx menjadi Marxisme. Pemikiran ilmiah itu kemudian juga dikembangkan ke dalam teori ekonomi dan politik dan sosial modern, maka di situlah lahir sistem ekonomi dan politik yang imperialistik.

Sementara itu di sisi lain pemikiran filsafat barat yang positivistik dan ateis tersebut dikembangkan secara ekstrim menjadi filsafat Marxisme, sebagai lawan dari kapitalisme yang dikembangkan Max Weber, Adam Smith dan sebagainya. Marxisme merupakan pemikiran yang lahir dari filsafat Barat yang berjuang melawan perkembangan kapitalisme. Padahal keduanya lahir dari budaya yang sama, keduanya sama-sama ateis, materialis, karena itu sekeras apapun permusuhan kedua saudara sekandung itu bisa ketemu dan saling bergandengan tangan bahu membahu. Kapitalisme dan imperialisme Barat bisa bergandengan tangan dengan Komunisme Soviet dalam menghadapi fasisme Nazi, Jepang dan Italia dalam perang Dunia Kedua. Begitu juga Kolonialisme Belanda yang kapitalis itu bisa bekerjasama dengan komunisme yang sosialis dalam menghadapi Jepang dan dalam Pemberontakan Madiun.

Rupanya para kiai tidak terkecuh dan tidak melibatkan diri pertarungan antara komunisme dan kolonialisme di Indonesia, karena keduanya sama-sama ateis dan sama-sama imperialis. Dengan tegas KH Idham Chalid dalam harlah NU ke 39 di Jakarta mengatakan bahwa politik non komunis atau anti komunis yang dijalankan NU tidak hanya untuk menghadapi komunisme saja, tetapi NU akan berhadapan dengan segala bentuk *ladiniyun* (sekularisme) dan segala bentuk *zanadiqoh* (ateisme), karena

⁶ Seorang cucu Thomas Huxley bernama Julian P Huxley juga penganjur teori evolusi ateis, tokoh itulah pendiri dan sekaligus direktur pertama Unesco dan dialah yang merumuskan pemikiran dasar Unisco dalam tulisannya *UNESCO: Its Purpuse and its Philosophy*, (1964) yang bertolak dari pemikiran world evolutionary humanism. Pikiran itulah yang menjadi dasar dari pendidikan modern dewasa ini.

keduanya merupakan satu kesatuan sebagai musuh NU.⁷ Bahkan jauh sebelumnya Hadratusy Syeikh KH Hasyim Asy'ari pada tahun 1947 mengingatkan bahaya ajaran meterialisme historis yang ateis itu bagi bangsa Indonesia. Karena konsep yang sedang dikembangkan secara gencar oleh PKI itu menyerukan pengingkaran terhadap agama, adanya akhirat,⁸

Strategi dalam menghadapi PKI itu ditegaskan kembali oleh KH Saifuddin Zuhri dalam sebuah tulisannya bahwa;

“Dengan dalil: Agama sebagai unsur mutlak dalam nation building maka kita dapat menyingkirkan kiprah PKI di mana-mana. Bahkan kita bisa menumpas segala bentuk ateisme, baik ateisme yang melahirkan komunisme maupun ateisme yang melahirkan kapitalisme, liberalism atau fasisme. Setiap ideologi yang berbahaya tidak hanya bisa dilawan dengan menggunakan kekerasan dan senjata, tetapi harus dihadapi dengan kesadaran agama.”⁹

Pikiran KH Saifuddin Zuhri ini memilih dengan jelas dan mempertemukan dua hal yang berbeda dengan jelas pula, bahwa liberalism dan komunisme itu walaupun bertentangan secara diametral tetapi memiliki watak sama yaitu ateis. Sementara ateisme inilah yang menjadi spirit dari perkembangan ilmu pengetahuan modern sebagaimana yang dikembangkan Auguts Comte, Darwin dan seterusnya. Karena itu kalangan Kiai NU menerjemahkan istilah *vrijdenken* bukan hanya pemikiran liberal atau pemikiran bebas, melainkan diterjemahkan sebagai pemikiran ateis. Karena para pemikir bebas cenderung ateis.

Untuk membendung masuknya ajaran ateis liberal maupun ateis fasis itulah sebabnya sejak awal NU menerapkan strategi kebudayaan anti *tasyabuh*, menolak segala budaya Barat (Belanda) dengan diktum *man tasyabbaha biqoumin fabuwa minbum* (barang siapa mengidentifikasi dengan suatu kelompok (Barat) maka dia

⁷ Lihat *Verslaag Muktamar NU ke 22* di Jakarta, 1959, hal., 170.

⁸ Naskah *Khutbah Iftitah* KH Hasyim Asy'ari paada Muktamar NU ke 14 di Madiun 1947.

⁹ Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, hal.,502.

akan menjadi bagian mereka). Dengan sikap politik yang non kooperatif total itu NU menjadi sangat kuat bertahan dengan mengembangkan sistem pendidikan sendiri yaitu sistem pendidikan asli Nusantara yaitu Pesanteren. Dengan demikian segala pengaruh buruk westernisme dapat dibendung oleh strategi kebudayaan yang diterapkan oleh masyarakat NU dan pesantren tersebut.

Kepercayaan NU dalam mengembangkan sistem keilmuan sendiri tanpa mengadopsi dan fasilitasi pemikiran Barat itu bisa terjadi karena NU memiliki tradisi keilmuan yang kuat, yang bersumber dari khazanah Islam sendiri. Dimana dasar pemikirannya memang tidak membutuhkan dukungan dari kolonial karena memang dasar, arah dan tujuannya sangat berdeda. Karena itu tidak merasa kekurangan atau kehilangan walaupun tanpa menyerap budaya Belanda. Dasar pemikiran yang dikembangkan NU sangat jelas yaitu berdasarkan Al Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas, yang dipahami berdasarkan pemikiran Imam Abul Hasan Al Asy'ari, Imam Ghazali serta Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Imam Hanbali. Kajian akademis pesantren itu tidak hanya melahirkan para ulama, kelompok wira usahawan tetapi juga melahirkan banyak akktivis sosial dan politik. Kebudayaan luar termasuk Barat kemudian diterima melalui proses seleksi yang ketat.

Kepercayaan diri yang kuat terhadap sistem pemikiran dan kebijakan politik yang dijalankan itu membuat NU sangat percaya diri pula dalam menghadapi rival pemikirannya serta musuh ideologinya yaitu PKI, karena itulah tidak aneh kalau sejak awal KH Wahab Hasbullah dan juga Haji Hasan Gipo Ketua umum PBNU tahun 1926-1927 itu sering terlibat perdebatan serius dengan tokoh PKI Muso dan juga Alimin serta tokoh komunis lainnya tentang keberadaan Tuhan, tentang adanya wahyu serta adanya kehidupan akhirat. Kepercayaan diri itulah yang membuat para ulama ini mampu berhadapan dengan intelektual *vrijdenker* PSI seperti Syahrir, yang menafikan peran agama sebagai tatanan sosial dan politik. Perbedaan pemikiran itu kemudian diterjemahkan dalam perbedaan dalam membangun sistem politik

dan kenegaraan, karena itu keduanya selalu bertentangan. Dengan demikian pertentangan NU dengan liberalisme dan komunisme itu tidak hanya bersifat filosofis, epistemologis tetapi pada dasarnya merupakan pertentangan politis dan ideologis.

B. Perbedaan Kultur

Komunisme dan Kolonialisme barat memiliki agenda yang sama di samaping menjajah adalah melakukan westernisasi terhadap kebudayaan Nusantara. Semua pengalaman Barat, pemikiran Barat itu hendak dikembangkan di Indonesia dalam sebuah misi sivilisasi, atau pemberadaban bangsa-bangsa Timur. Kolonialisme dengan mendirikan berbagai sekolah baik sebelum maupun setelah Politik Etis telah mengajarkan sekularisme dan juga individualisme yang terselubung dalam berbagai mata pelajaran mulai filsafat, biologi, bahasa, budaya, sejarah hingga administrasi,

Dengan agenda itu mereka mampu menciptakan kelas ambtenaar yang setia pada Belanda dan menggunakan simbol Belanda dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari kelompok terpelajar produk pendidikan Belanda itu muncul kelompok kecil yang dididik secara khusus oleh kelompok Sosial Demokrat atau yang disebut kelompok liberal. Kelompok sosialis di bawah bimbingan Sneevliet seorang aktivis kiri dari Belanda itu membina orang-orang Indonesia seperti Semaun, Alimin, Muso dan sebagainya kemudian berkembang menjadi komunis. Dari situ kelihatan bahwa antara liberalisme dengan komunisme itu sama sama dari Barat yang dikembangkan oleh orang-orang Belanda sendiri yang berbeda haluan beda strategi dalam meraih kepentingan. Itulah yang dicium oleh KH Saifuddin Zuhri bahawa perlawanan terhadap komunisme harus sejalan dengan perlawanan terhadap liberalism karena keduanya berlandaskan pada asas yang sama yaitu materialism dan ateisme.

Dengan adanya cara pandang seperti itu, maka perlawanan para kiai pesantren khususnya yang tergabung dalam NU dalam menghadapi kolonialisme dan komunisme itu tidak hanya

sistematis tetapi sangat konseptual, karena itu NU yang kelihatan tidak memiliki strategi serta amunisi yang kuat tetapi berhasil mengalahkan seluruh rivalnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya konsep yang matang itu maka bisa dimengerti kalau NU bisa bertahan bahkan mampu menundukkan PKI baik secara konsep maupun strategi. Baik dalam pertarungan di forum resmi seperti Dewan Konstituante, dalam DPRGR, di kabinet maupun dalam DPA. Setelah itu juga lebih unggul dalam menghadapi pertarungan fisik dalam konflik sosial atau perang di lapangan, sebagaimana yang terjadi tahun 1965.

Kesalahan PKI dalam mengembangkan komunisme di Indonesia dengan menyamakan budaya Indonesia dengan budaya Eropa. Watak dasar budaya Eropa adalah materialis, individualis dan kapitalis. Hal itu disamakan dengan kultur Indonesia yang masih kekeluargaan dan komunalistik. Di Eropa yang sudah menjadi Negara Industri yang watak masyarakatnya individualistik sangat mudah dibenturkan antara para juragan pemilik modal dengan buruh. Karena masing-masing hidup dengan cara, gaya dan kemauan sendiri. Tetapi di Indonesia semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sangat tinggi, sehingga seseorang selalu menjadi penolong dan penanggungjawab bagi yang lain dalam sebuah tatanan sosial. Maka kelompok ini merupakan satu kesatuan keluarga yang satu dan utuh.

Karena mereka satu padu dalam suatu sistem sosial yang kekeluargaan, maka mereka tidak muda dihadapkan dalam sebuah kontradiksi untuk diadu dan dibenturkan satu sama lain. Mereka justeru saling menjaga dan saling mengamankan yang terikat dalam sebuah falsafah hidup *mengayu ayuning barwono*, (menjaga ketertiban dunia) yang mengajarkan konsep menerima peran dan posisi serta *nerimo ing pandum* (berperan aktif dalam posisinya). Seseorang di dalam masyarakat yang gotong royong akan sadar dan sabar serta menerima dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab atas posisi yang diduduki, baik sebagai buruh, pelayan, maupun juragan dianggap sebagai perbedaan yang nisbi. Mereka

menerima dengan lapang dada, karena semuanya bisa memberikan kontribusi yang sama dengan peran masing-masing dalam sebuah kerjasama sosial. Karena itu ketika ada seorang miskin yang diteror PKI masyarakat yang miskin dan kaya juga membela, begitu pula bila ada seorang hartawan yang diserang PKI, maka rakyat miskin, buruh dan tani akan membela warganya, baik yang miskin ataupun kaya, karena selama ini mereka hidup bersama saling menolong dan saling menghidupi dan saling melindungi.

C. Perbedaan Politik

Perbedaan NU dengan PKI semakin mencolok dalam bidang politik, kalau NU lebih mengutamakan harmoni atau *isblabil ummah* (untuk kesejahteraan rakyat) lahir dan batin. Sebaliknya PKI membangun sistem politik yang kontradiktif bahkan konfrontatif di tengah masyarakat Nusantara yang harmoni. Perbedaan itu juga menjadi hambatan tersendiri bagi perkembangan politik PKI. Walaupun di sementara waktu hal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum muda yang agresif. Tetapi radikalisme seperti itu akan selalu hanya bisa diikuti sedikit orang, dan itupun bersifat temporal, mayoritas selalu menghendaki hidup damai. Saling menyerang dihadapan umum masih dianggap tabu dalam tradisi politik bangsa Indonesia. Tradisi politik yang dikembangkan PKI tidak melahirkan ketenteraman malah mengundang terjadinya benturan antar masyarakat antar tradisi.

Sebelum hadirnya PKI sebagai kekuatan politik formal suasana politik segenting apapun bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dalam politik PKI yang konfrontatif hanya ada kawan dan lawan, yang bukan kawan dianggap lawan dan boleh diserang. Tetapi dalam sistem kekeluargaan sebesar apapun perbedaan tetapi selalu dilandasi kebersamaan dan dibicarakan secara kekeluargaan dan kebangsaan. Sebagai contoh dalam sidang BPUPKI berbagai perwakilan masyarakat hadir dalam sidang itu, mulai dari kelompok Islam, nasionalis, ada Hindu, Budha, Konghucu dan sebagainya tetapi ketika bicara soal penetapan dasar Negara serta Mukadimah undang-undang dasar walaupun terdapat banyak perbedaan dan berlangsung secara sengit, tetapi bisa

dimusyawarahkan secara kekeluargaan sehingga dalam waktu singkat bisa dirumuskan Pancasila, Mukadimah Undang-Undang Dasar serta UUD 1945, karya monumental bangsa ini dirumuskan tanpa disertai ketegangan apalagi kekerasan.

Hal itu sangat berbeda dengan sidang Konstituante di mana PKI sudah terlibat di dalamnya, persidangan tidak hanya berlarut-larut dari 1956 hingga 1959, juga banyak diwarnai caci maki dan hujatan pada lawan politiknya. Sehingga majalis yang dipercaya untuk merumuskan Undang-Undang Dasar itu banyak diwarnai pertikaian yang tak teratasi, terutama dari Fraksi PKI dan Fraksi kiri lainnya yang selalu menyerang lawan-lawan politiknya di Konstituante secara fulgar. Perbedaan pendapat itu baru bisa diatasi dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sikap konfrontasi itu juga ditunjukkan PKI dalam siding DPA yang mestinya forum itu diisi oleh orang yang telah matang dan dewasa dalam berpikir serta stabil emosinya. Tetapi kelompok PKI sebagaimana ditampilkan oleh ketua CC PKI sendiri yaitu DN Aidit, masih menggunakan forum DPA itu sebagai sarana untuk menyerang lawan politiknya. Salah satu yang pernah diserang adalah Menteri Agama KH Saifuddin Zuhri, yang digugat karena Islam mengharamkan makan daging tikus. Dengan cara lebih diplomatis serangan DN Aidit terhadap kesucian Islam itu ditangkis oleh KH Saifuddin Zuhri.

Tidak hanya di forum resmi politik kenegaraan, di lapangan PKI juga menghembuskan dan mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah dan terhadap para pimpinan agama dan orang-orang kaya. Selain itu kebiasaan melakukan pemberontakan seperti di Banten, Pekalongan Madiun dan sekitarnya tahun 1948 serta berbagai provokasi lainnya termasuk selama dasawarsa 1960-an hingga 1965. Selama beberapa dasawarsa PKI menampilkan diri sebagai sosok yang garang dan subversif bahkan cenderung kriminal. Segala macam bentuk politik yang penuh kontradiksi dan konfrontasi itu membuat rakyat jenuh dan menjauhi PKI. Dengan perilaku politiknya itu PKI dengan mudah distigma sebagai partai pemberang suka bikin onar. PKI bisa jadi besar

menjelang 1965, tetapi citra buruk sebagai pembuat kisruh tidak bisa sirna. Perbedaan sikap politik yang tajam itu PKI akhirnya berhadapan dengan kekuatan lainnya, sampai akhirnya PKI lenyap dari panggung politik Indonesia.[]

BAB IV

PEMBANTAIAN PARA KIAI DI MADIUN 1948

A. Asal Usul Pemberontakan

Sebelum dan semasa perang kemerdekaan hingga Proklamasi 1945, suara PKI nyaris tidak kedengaran. Sejak pemberontakan 1926 PKI dibawah kontrol ketat pemerintah Hindia Belanda, sehingga para pimpinannya banyak kabur ke luar negeri¹⁰, sementara yang berada di Indonesia tiarap. Sebenarnya sekitar tahun 1935 Muso telah menyelundup kembali ke Indonesia dari Soviet, sambil mengembangkan PKI secara illegal. Muso berasal dari keluarga Pesantren Kapu Kediri, demikian juga KH Hasyim Asy'ari Rais Akbar PBNU, juga salah seorang anak menantu dari Kiai di Pesantren Kapu Kediri. Konon kedua tokoh yang berbeda ideology itu sering bertemu di pasar Kapu bersama Bung Karno.¹¹ Perkenalan Muso dengan Bung Karno telah lama terjalin bertemu di rumah HOS Tjokroaminoto Surabaya. Di Pasar Kapu itu mereka bertiga memperbincangkan dan memperdebatkan tentang bentuk Negara Indonesia ke depan.

Sementara pada zaman Jepang kelompok ini ditindas habis, karena mengumandangkan slogan anti fasisme. Sejak saat itulah PKI melalui pimpinannya Amir Syarifuddin bekerjasama dengan Belanda menghadapi Jepang, dengan disuplai dana dan amunisi hingga saat pemberontakan Madiun. Memanag terkadang terjadi letupan yang dilakukan oleh PKI lokal sebagaimana yang terjadi di Pekalongan dan sekitarnya sekitar bulan Agustus hingga

¹⁰ Pusat Sejarah PKI, *Pemberontakan 1926 sebagai Pemberontakan Nasional Pertama*, CV Pembangunan, Jakarta 1962.

¹¹ Diceritakan oleh Ibu Nyai Ngelawak, Kertosono Nganjuk, sebagai seorang menyaksikan sendiri pertemuan ketiga tokoh tersebut.

September tahun 1945. Walaupun posisinya masih lemah tetapi PKI mulai beringas berani menyerang pejabat pemerintah dan tempat ibadah, sebagaimana dilaporkan oleh KH Muhammad Ilyas Konsul NU Kawasan Utara Jawa kepada PBNU:

“Revolusi Pekalongan gara-gara (orang) dari negeri Porworejo bernama Sarjoyo, Ia datang ke Pekalongan memproklamasikan dirinya sebagai residen Pekalongan. Lalu memproklamasikan Pekalongan menjadi Soviet, komunis. Dikobarkan di tiga kabupaten yaitu Tegal, Pemalang dan Pekalongan. Bukan main perilaku orang komunis yang di luar batas itu, baik ucapannya maupun perbuatannya, serambi masjid dikencingi, haji-haji diteriaki agen Arab, kiai-kiai dikatakan penipu. Pekik Merdeka diganti dengan pekik .. Soviet.

Untung Alhamdulillah Pekalongan yang terkenal fanatik Islam, kalau martabat agamanya dinodai, rakyat berbondong-bondong menjadi barisan manusia yang menyerbu rumah bupati dan pejabat komunis sambil mengarahkan bambu runcing mereka ke sasaran dan menyerukan yel yel Merdeka...Merdeka.. ya Merdeka.”¹²

Sekecil apapun peluang dilihat PKI selalu memanfaatkan untuk merebut kekuasaan, dan sarana agama baik masjid, pesantren atau langgara selalu menjadi sasaran serangan mereka. Karena mereka menganggap tempat ibadah itu sebagai pusat simpul gerakan Islam.

Meskipun provokasi mereka di daerah Pekalongan itu gagal tetapi mereka tidak putus asa malah terus melakukan konsolidasi dan propaganda di bawah tanah di seluruh tanah air, karena itu ketika Indonesia merdeka, PKI ikut memanfaatkan kemerdekaan ini

¹² Keterangan disampaikan KH Muhammad Ilyas kepada Saifuddin Zuhri, 1945, lihat *Berangkat dari Pesantren* hal, 293. Lihat Juga Biografi KH Muhammad Ilyas, dari *Pesantren Untuk Bangsa*, yaysan Saifuddin Zuhri, Jakarta 2009. Informasi penting semacam itu sama sekali tidak tercatat dalam buku Anton Lucas, *Peristiwa Tiga daerah, Revolusi dalam Revolusi*. Bahkan sengaja mengabaikan adanya kekuatan NU dan para kiai di daerah itu, padahal pemegang rol gerakana sosial di daerah itu adalah para kiai dan ulama NU. Ini adalah merupakan bentuk cara pandang orientalisme sebagai anak kanadung kolonialisme, yang sengaja menyembunyikan hal-hal yang membahayakan kepentingan kolonial dan mengutarakan hal-hal yang menguntungkan kolonial.

dan ketika pemerintah mengeluarkan Maklumat X pada November 1945, tentang seruan mendirikan partai Politik, maka PKI pun secara terbuka mendeklarasikan kembali dirinya sebagai partai politik terbuka di Indonesia merdeka. Kalau selama ini status PKI bersifat ilegal maka sejak menjadi partai resmi itu statusnya menjadi legal dan bebas berkompetisi di tengah masyarakat dengan hak-hak yang sama. Inilah kesempatan besar bagi PKI mengembangkan ideologi dan agendanya.

Saat itu partai berkelompok sesuai dengan aliran ideologi masing-masing, kelompok yang berideologi nasionalis berkelompok dalam Partai Nasional Indonesia (PNI), partai yang berideologi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Washliyah, dan lain sebagainya bergabung dalam Partai Masyumi. Sementara kelompok yang berhaluan Marxis seperti kelompok komunis, kelompok sosialis dan Murba serta kelompok buruh, berdiri sendiri-sendiri menjadi partai sehingga ada tiga partai Marxis yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) ada Partai Sosialis Indonesia (PSI) ada Partai Buruh Indonesia (PBI) dan ada Partai Murba.

Melihat fragmentasi semacam itu tokoh PKI terutama Muso prihatin lalu berusaha menyatukan kelompok Marxis yang ada. Maka pada 24 Agustus 1948 Polit Biro Central Komite PKI mengeluarkan kebijakan satu partai kelas buruh (Marxis). Dari situ kemudian PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia digabung menjadi satu barisan ke dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang diketuai Muso dan Amir Syarifuddin, sekretarisnya adalah DN Aidit¹³, yang kesemuanya adalah tokoh PKI. Sementara Partai Murba pimpinan Tan Malaka tidak masuk dalam aliansi Marxis tersebut. Dengan terbentuknya Front itu maka PKI semakin agresif. Karena front itu dipimpin PKI maka masyarakat

¹³ Djalam Marsudi, *Menyingkap Pemberontakan PKI Dalam Peristiwa Madiun*, Merdeka Press, Jakarta, 1966, hal. 18. Lihat juga pernyataan gabungan sayap kiri yang ditandatangani sekretarisnya DN Aidit, di Yogyakarta 22 Agustus 1948, hal., 34.

tidak ikut menyebut sebagai FDR, Pesindo atau PBI, melainkan secara gampang menyebutnya sebagai PKI.

Dengan keberadaannya sebagai partai yang legal, maka PKI mulai melakukan propaganda dan konsolidasi partai secara terbuka berkompetisi dengan partai-partai besar yang lain, terutama PNI, NU/ Masyumi. Sebagai partai yang berideologi proletariat yang peduli pada rakyat tertindas maka propaganda PKI banyak diarahkan daerah yang kondisi ekonominya sangat minus. Ternyata strategi PKI ini berhasil sangat baik, terbukti PKI mendapat dukungan kuat di berbagai daerah yang secara ekonomi dan geografis dan secara teologis atau keagamaan saat itu masih terbelakang. Sesuai dengan kriteria itu dan pertimbangan strategis lainnya Madiun dijadikan sebagai pusat gerakan PKI.

Daerah Madiun dan sekitarnya seperti Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Ngawi, Boyolali, Porwodadi, Bojonegoro hingga Pati, terus melingkar sampai Magelang, Klaten Solo dan Wonogiri, merupakan basis pengembangan PKI. Madiun menjadi titik pusat dari daerah itu, karena itulah aktivitas PKI dipusatkan di Madiun dengan disangga oleh daerah sekitarnya yang sudah sangat kuat komunisnya, baik karena sukarela atau karena dipaksa. Dengan posisi strategis semacam itu, maka Ibu Kota RI Yogyakarta secara geografis telah terkepung pasukan PKI. Selain itu Madiun juga memiliki posisi strategis untuk meloncat ke Yogyakarta sebagai Ibukota negara saat itu. Dengan demikian PKI bisa menguasai Indonesia dalam waktu cepat. Dengan kerja yang keras dan sistematis, maka memasuki tahun 1947 konsolidasi PKI sudah nyaris merata, kepengurusan partai sudah menjangkau daerah pedalaman, sehingga berbagai manuver sudah mulai mereka lakukan.

Dengan semangat yang progresif dan revolusioner, PKI berhasil merekrut berbagai kalangan, baik kalangan buruh, kalangan petani yang dijanjikan tanah garapan, para birokrat, termasuk kalangan tentara. Para guru juga sudah mulai banyak dipengaruhi termasuk PGRI di kawasan itu mulai didominasi PKI. Kalangan para jagoan, baik dari kalangan warok, para pendekar, termasuk

para kelompok bajingan segera menjadi bagian penting dari PKI. Bahkan kelompok terakhir itulah yang dijadikan kelompok pemukul lawan.

Untuk membuat kecemasan umum dan disintegrasi sosial, maka PKI mulai melakukan teror dengan memunculkan berbagai perampokan disertai pembunuhan. Kalau kriminalitas sebelumnya dilakuakn secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Perampokan yang dilakukan saat ini dilakukan pada siang hari secara terang-terangan. Para pelakunya juga dikenal oleh masyarakat. Tetapi teror dan perampokan yang terjadi belakangan ini berbeda, mereka berani melakukan tindakan ini di siang bolong, karena merasa ada yang melindungi bahkan ada yang memerintahkan yaitu PKI. Sasaran utama perampokan ini adalah para kiai, ulama atau ustadz, termasuk aparat desa yang belum mau ikut mereka.¹⁴ Di semua daerah basis PKI mulai dari Madiun sendiri, Tulungagung hingga Pati terjadi hal yang sama, sehingga keresahan umum betul-betul terjadi. Di luar hal itu terlihat seperti kriminalitas biasa, tetapi setelah diselidiki oleh para pimpinan Ansor, jelas kelihatan bahwa para warok, pendekar dan bajingan yang melakukan perampokan tersebut adalah anggota PKI yang mendapatkan restu dari pimpinan partai setempat untuk melakukan teror massa. Pada umumnya masyarakat sekitar mengenal siapa dari warga desa yang PKI dan bukan, sehingga dengan mudah mengidentifikasi siapa yang melakukan tindak makar.

Bagaimana situasi di daerah Madiun dan sekitarnya terjadi akibat ulah PKI digambarkan sangat tragis oleh seorang saksi;

Situasi makin kacau dan menakutkan. Tiap malam terjadi perampokan dan pencurian, disertai penganiayaan dan pembunuhan. Sasarannya orang atau tokoh agama, tokoh Masjumi atau tokoh NU dan orang kaya yang sudah naik haji. Dan kalau kebetulan punya anak gadis atau perawan, tidak segan-segan diperkosanya. Orang-rang sudah tahu bahwa pelakunya adalah orang-orang komunis PKI...

¹⁴ Abdul Hamid Wilis, *Aku Menjadi Komandan Banser*, Penerbit Public Policy Insitute, Trenggalek, 2011.

Bagi orang yang ingin selamat dari perampokan, pencurian dan penganiayaan, maka jauhilah tokoh agama, Masyumi dan NU dan bergabunglah pada PKI...

PKI dan orang-orang komunis telah menjadi monster yang menakutkan. Orang awam atau rakyat jelata atau yang rumahnya terpencil di pelosok pedesaan merasa tidak aman dan tak terlindungi oleh pemerintah. Mereka (dipaksa) bergabung dengan orang-orang PKI untuk mendapatkan perlindungan. Sementara bagi Warga NU mulai meninggalkan tempat ke daerah yang dianggap aman.¹⁵

Keresahan akibat ulah PKI telah sedemikian meluas, baik di kalangan masyarakat umum, maupaun kalangan ulama, terutama para kiai pimpinan pesantren serta pejabat setempat yang bukan komunis. Untuk melindungi warga dan para ulama dari tekanan pihak komunis itu maka para pimpinan NU sebagai organisasi yang membawa nilai *Ablussunnah Waljamaah* serta berniat menjaga keutuhan dan ketertiban NKRI, mulai melakukan langkah mencari solusi. Untuk memberikan ketenangan pada umat dan mencegah perluasan manuver PKI maka pada 24 Mei 1947 NU menyelenggarakan Mukhtar ke 17 di Kota Madiun yang menjadi pusat kegiatan PKI nasional, karena itu sebagai tandingannya NU juga menyelenggarakan kegiatan nasional di kota itu.

Hampir semua Pengurus Besar NU baik dari eleme Syuriah maupun Tanfidziah hadir dalam Mukhtar, hadir pula pimpinan Konsul atau Wilayah dan Cabang dari seluruh Indopnesia. Dalam khutbah iftitah (pidato pembukaan) Mukhtar itu Syekh KH Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama mengingatkan pada umat Islam;

“Ada beberapa hal lagi yang sangat berbahaya dan tercela melebihi hal yang sudah saya sampaikan, yaitu tersebarnya berbagai ajaran yang mengarah pada kekufuran dan penyimpangan, baik di kalangan anak-anak, pemuda Islam baik di desa maupun di berbagai kota.

Saat ini telah tersebar ajaran historis materialisme yaitu suatu prinsip yang berpandangan bahwa tiada realitas di dunia ini kecuali benda, tidak ada roh dan tidak ada alam ghaib. Tidak percaya adanya kehidupan sesudah

¹⁵ Lihat, Abdul Hamid Wilis, hl., 34.

mati. Bahaya besar ini tidak akan terelakkan bila sudah tertanam dalam hati serta jiwa pemuda kita dan yang demikian itu akan mengubah keyakinan dasar mereka terhadap agama Islam yang kita anut.

Bergerak dan bangkitlah wahai saudaraku para ulama, kuatkan barisanmu, satukan seluruh kekuatanmu, tetaplal tegar dan percayalah bahwa tidak sedikit golongan yang kecil mampu mengalahkan golongan besar hanya karena kehendak Allah, karena Allah selalu bersama orang yang sabar.”¹⁶

Kehadiran jamaah NU terutama para ulamanya itu memberikan kekuatan tersendiri, tidak hanya kepada umat Islam tetapi juga kepada semua aparat negara baik kalangan birokrasi, kalangan militer, termasuk kalangan muda dan pelajar yang menolak pengaruh dan teror yang dilakukan PKI. Sejak dikeluarkannya seruan Kiai Hasyim Asy'ari itu NU sangat serius dengan mengkonsolidasikan seluruh potensi NU dan Pesantren termasuk pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang ada di daerah itu, untuk meningkatkan keamanan warganya dan mempersiapkan mereka menghadapi berbagai ancaman yang bakal terjadi. Kalangan muda NU yang saat itu terhimpun dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah yang belum lama ini terjun ke medan perang melawan Sekutu di Surabaya dan Ambarawa, mendapat tugas baru yaitu melindungi masyarakat dan aparat negara dari ancaman kelompok komunis.

Kalangan aparat keamanan yang selama ini tercekam, terutama dari Kepolisian mulai berani menindak kelompok yang melakukan pencurian dan perampokan. Kawanan perampok di Desa Bendungan Kabupaten Trenggalek yang dianggap sebagai pusatnya PKI di Kabupetn itu digerebek oleh aparat kepolisian setempat. Ternyata para perampok itu terdiri dari para warok dan bajingan PKI yang berasal dari berbagai daerah antara lain Ponorogo. Karena itu tidak lama kemudian segerombolan Warok dari Ponorogo dan para pendekar PKI setempat mengepung Kantor Dinas Kepolisian dan kantor Kejaksaan Trenggelek menuntut dibebaskannya teman mereka yang ditahan. Tetapi

¹⁶ Lihat KH Hasyim Asy'ari, *Khutbah Iftitah* disampaikan pada Mukhtamar ke 17 NU di Madiun 24 Mei 1947.

Komandan Polisi Letnan R. Rustamadji menolak tuntutan mererka, akhirnya terjadi perdebatan yang sengit.

Aparat kepolisian semakin berani walaupun sudah dikepung gerombolan warok PKI yang jumlahnya 150 orang, karena sebenarnya para warok itu telah dikepung oleh aparat TNI dan pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Seandainya PKI menyerbu kantor Polisi, mereka akan dipukul oleh Hizbullah dan TNI dari belakang. Mengetahui gelagat itu akhirnya kawanan warok itu pergi dengan melontarkan ancaman akan menyerbu dengan bala pasukan lebih banyak lagi. Ternyata ketika dilawan mereka keder juga terbukti mereka tidak kembali lagi. Tetapi berita perampokan dan pencurian terus terjadi, sebagai cara PKI meneror warga dan untuk mengumpulkan dana partai.

Sebagai puncak dari semua manuver dan provokasi tadi adalah diselenggarakannya rapat umum yang dihadiri langsung oleh Muso maupun Amir Syarifuddin pada bulan Agustus tahun 1948 di beberapa tempat seperti Madiun, Trenggalek dan juga di kota-kota lain di sekitar Jawa Timur –Jawa Tengah, sebagai strategi PKI untuk *show of force* terhadap kekuatan mereka untuk menguasai Republik Indonesia. Semua tokoh PKI setempat dan daerah serta dari CC-PKI hadir dalam rapat umum yang dihadiri puluhan ribu orang. Tetapi bukan semuanya PKI, sebagian masyarakat desa yang tidak tahu-menahu urusan politik tetapi dimobilisasi secara paksa oleh PKI. Mereka ikuti saja kehendak PKI, kalau mereka menolak jiwa mereka akan terancam. Dengan demikian kekuatan PKI kelihatan sangat besar sehingga bisa menggetarkan lawan.

Sebagaimana disaksikan sendiri oleh KH Yusuf Hasyim yang saat itu sedang melakukan konsolidasi barisan kiai NU di Kota Madiun, melihat kota itu sangat lengang, penduduk mulai mnghindarkan diri bertemu dengan tertara FDR-PKI terutama dari unsur Pesindo yang sangat agresif. Mereka berkeliaran ke seluruh sudut kota dan desa dengan seragam serba hitam dengan selendang merah bersenjata api atau pedang, siap membunuh dan merampas siapa saja yang ditemui. Pasukan keamanan baik Tentara maupun Polisi sendiri kelihatan sudah kewalahan

mengatasi keadaan, sehingga kelompok PKI leluasa melakukan teror dan penindasan. Saat itulah para Kiai yang dikunjungi menyarankan agar K Yusuf Hasyim segera meninggalkan Madiun. Kiai Yusuf Hasyim berhasil keluar dari Madiun dengan selamat, kemudian mendengar kabar para kiai yang kemarin di kunjungi sudah menjadi syuhada dibantai oleh PKI.

B. Kiai NU dan Pemerintah Menjadi Korban

1. Pemberontakan FDR PKI Dimulai

Untuk memperluas pengaruh Front Demokrasi Rakyat (FDR) serta untuk mempersiapkan kader-kader militan PKI, maka Muso dan Amir Syarifuddin sebagai pemimpin tertinggi FDR terus melakukan/turun ke berbagai daerah. Sementara penjagaan kota Karesidenan Madiun dipercayakan pada Soemarsono kader PSI-Pesindo dan Kol Djokosujono serta beberapa pimpinan Pesindo lainnya seperti Supardi. Setelah situasi sudah dianggap matang maka FDR yang berada di Kota Madiun yang dipimpin oleh Soemarsono pada tengah malam sekitar jam 24.00 WIB pada 18 September 1948, memproklamasikan pemerintahan baru yang disebut sebagai Pemerintah Front Nasional, sebagai lawan dari Pemerintah Republik Indonesia, hal itu merupakan cikal bakal berdirinya negara komunis yang dinamakan Negara Soviet Madiun.

Gerakan ini dimulai dengan menyerbu ke markas Tentara, ke kantor Polisi, setelah pasukan keamanan itu dilumpuhkan baru menyerang perkantoran pemerintah. Tindakan yang diambil PKI selanjutnya adalah menjebol berbagai penjara yang ada diberbagai kota untuk membebaskan para aktivis PKI, serta penjahat kriminal lainnya yang ditahan aparat kepolisian. Kelompok itulah yang kemudian dijadikan sebagai kekuatan PKI dalam melakukan serangan terhadap lawannya. Dengan disemangati balas dendam pada polisi dan aparat negara lainnya, mereka terus melakukan penangkapan dan pembantaian kepada siap saja yang dianggap menghalangi gerakan mereka.

Setelah posisi mereka kuat baru menuju sasaran utama mereka adalah Kantor Residen Madiun serta instansi pemerintah lainnya. Saat itu Residen Madiun Mr. Samadikun kebetulan tidak ada di Madiun, karena sedang bertemu dengan pemerintah RI di Yogyakarta, maka selamatlah ia dari pembunuhan. Sementara wakilnya yaitu Patih berhasil ditangkap dan dibunuh pemberontak. Demikian juga nasib yang dialami pimpinan daerah seluruh Karesidenan Madiun seperti Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan dilakukan penangkapan terhadap para pejabat pemerintah, para bupati, patih, wedono dan para asistennya ditangkap dan dibunuh. Pejabat tinggi yang menjadi korban peristiwa ini adalah R. Soerjo Gubernur Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Jawa timur Kombes M. Doerjat beserta rombongan para pejabat pemerintah daerah yang sedang melewati Ngawi dibantai oleh Pasukan Pesindo yang jenazahnya dilempar ke tepi Bengawan Solo.

Sebagai langkah lanjutan dari kudeta berdarah itu segera dilakukan penggantian kepala pemerintahan, sebagai Residen untuk menggantikan Mr. Samadikun ditunjuklah Abdul Muthalib sebagai Residen, dia seorang tokoh Pesindo bekas Wakil Residen Surabaya. Kemudian Soemarsono pemimpin pemberontak ditetapkan sebagai Gubernur Militer, sementara wakilnya adalah Soepardi bekas Walikota Madiun, Komandan Militer dipimpin oleh Kolonel Joko Sujono yang sejak awal mendampingi pimpinan pemberontak Soemarsono. Demikian juga seluruh kepala jawatan di seluruh jajaran diganti dengan orang-orang FDR-PKI, sehingga daerah Madiun dan sekitarnya sepenuhnya betul telah dikuasai PKI dan di situlah mereka melakukan pembantaian terhadap orang-orang non PKI. Secara serentak beberapa pimpinan daerah yang dikuasai PKI diganti dengan orang-orang PKI seperti di Ngawi, Blora, Pati dan sebagainya.

Ketika kelompok FDR pimpinan Soemarsono telah menguasai Madiun dan sekitarnya barulah pada 19 September 1948 pimpinan tertinggi FDR Muso dan Amir Syarifuddin masuk ke Madiun dengan disambut meriah oleh para pemberontak seraya

meneriakan “Menang Perang!”. Di tengah gerombolan pemberontak itulah Muso segera memberikan pernyataan terbuka yang disiarkan oleh Radio Front Nasional yang ditujukan pada seluruh rakyat Indonesia:

“Pada tanggal 18 September 1948 Rakyat Daerah Madiun telah memegang kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Dengan begitu rakyat Madiun telah melaksanakan kewajiban Revolusi Nasional ini, bahwa ia seharusnya dipimpin oleh rakyat sendiri dan bukan oleh kelas lain.Mereka sewaktu pemerintahan pendudukan Jepang menjadi quisling-quisling budak Jepang, tukang jual Romusa. Sekarang mereka akan menjual Indonesia dan rakyatnya sekali lagi pada imperialis Amerika.

Lupakan Soekarno cs bahwa ia telah membantu dan mengesahkan kejahatan Siliwangi dan kaum teroris itu???. Apa maksud Soekarno Cs ex pedagang Romusa telah melepaskan penjahat-penjahat Trotskis Tan Malaka Cs yang telah mencoba merobohkan kepresidenannya. Dalam tiga tahun ini teranglah pula bahwa Soekarno Hatta ex Romusa Verkopers, quisling telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda.....Bolehkan orang semacam itu bilang bahwa mereka mempunyai hak yang sah untuk memerintah Republik Indonesia Kita ??? . Bukan Soekarno bukan Hatta yang melawan Belanda , Inggris dan Amerika, tetapi rakyat Indonesia sendiri”¹⁷

Dengan seruan Muso yang tegas itu maka kalau selama ini PKI telah melakukan berbagai teror dan ancaman, tetapi sejak dicituskannya Negara Soviet Madiun itu betul-betul melaksanakan apa yang diancamkan selama ini, yaitu melakukan pembunuhan. Sebenarnya kalangan pesantren dan aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI telah mengetahui gelagat PKI itu untuk memberontak, tetapi karena semuanya dilakukan dalam waktu cepat dan mendadak, maka serangan tidak sempat ditangkis akhirnya memakan banyak korban.

Pemberontakan yang terjadi di Madiun itu segera direspon oleh pemerintah pusat. Melihat langkah inkonstitusional pengambilan kekuasaan yang dilakuakn PKI yang disertai dengan kekejaman itu pemerintah pusat yang berada di Yogyakarta di bawah

¹⁷ Simak Pidato Muso yang disirkan oleh *Radio Front Nasional* 19 Setember 1948.

pimpinan Soekarno Hatta segera bersikap. Kemudian saat itu juga mengeluarkan kecaman dan sekaligus siaran kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak terkecoh oleh ajakan pemberontak dan setia menjaga pemerintahan dan bersatu padu merebut kembali Madiun:

“Kemarin pagi PKI Muso mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun, dan mendirikan di sana pemerintah Soviet di bawah kepemimpinan Muso. Perampasan ini mereka pandang sebagai permulaan untuk merebut seluruh Pemerintah Republik Indonesia.

Atas nama perjuangan untuk Indonesia merdeka aku berseru kepadamu. Pada saat yang begini genting, di mana engkau dan kita sekalian mengalami cobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri dan adalah memilih di antara dua;

Ikut Muso dengan PKI nya, yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesai merdeka atau ikut Soekarno/Hatta yang Insyallah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia yang Merdeka tidak dijajah negara apapun juga. Rebut kembali Madiun, mari jangan ragu, Insyallah kita pasti Menang.”¹⁸

Sebagai pemerintah yang sah dan sebagai presiden yang dicintai dan ditaati maka rakyat dan kalangan TNI memilih Soekarno dan melawan Muso. Karena itu Seruan Presiden Soekarno itu langsung dijalankan dengan melakukan orasi penumpasan PKI dengan mengerahkan Divisi Siliwangi yang saat itu sedang hijrah berada di Yogyakarta, serta didukung oleh pasukan Hisbullah dan Sabilillah yang berada di Yogya pula. Seruan presiden itu kemudian dicetak dijadikan pamflet yang disebar melalui udara ke berbagai daerah yang diduduki oleh PKI. Seruan presiden itu menyadarkan banyak kelompok yang tertipu oleh Muso. Akhirnya mereka sadar, ternyata mereka bukan diajak melawan Belanda tetapi melawan pemerintah yang sah melawan Bung Karno pemimpin Besar yang mereka cintai. Akhirnya mereka enggan ikut FDR PKI, mereka mulai berbalik melawan PKI untuk membela Bung Karno.

¹⁸ Pidato Bung Karno ini diucapkan di Yogyakarta dan disiarkan oleh Koran dan Radio pada tanggal 19 September 1948 ke seluruh Indonesia.

Melihat Seruan Presiden Soekarno itu yang disebarluaskan untuk mempengaruhi pendirian rakyat itu langsung dianggapi oleh pimpinan FDR PKI Muso; Dalam pidatonya yang disiarkan di berbagai radio dan surat kabar. Dalam siarannya itu Muso melakukan serangan balik dengan menjelek-jelekan pribadi Presiden dan Wakil Presiden RI itu seraya menyerukan perjuangan merebut pemerintahan RI:

“Soekarno/Hatta 100 persen telah menyesuaikan diri dengan imperialisme yang terang-terangan menjadi musuh negeri sendiri dan rakyat sendiri. Soekarno Hatta telah diperbudak Jepang dan berjuta-juta orang Indonesia telag tewas jiwanya dan menderita kesengsaraan dan hinanan yang tak ada batasnya...

Rakyat Indonesia seluruhnya, kaum buruh da kaum tani, kaum muda dan wanita kaum prajurit progresif; Bersatulah bergeraklah dan lawanlah pengkhiantatannya penjual Romusa Soekarno/Hatta...

Basmilah Soekarno Hatta dan budak-budaknya, hanya inilah jaminan satu-satunya untuk memerdekakan dan menyelamatkan negara dan rakyat Indonesia.... Turutlah dan berilah contoh-contoh yang telah dilakukan oleh rakyat dan prajurit di daerah Madiun. Hidup Republik Kerakyatan Kita Merdeka dan Menang Perang.....¹⁹

Seruan Muso itu dengan sendirinya menambah militan para pemberontak dan semakin meningkatkan kekejaman mereka. Dalam waktu Singkat hampir seluruh Kota disekitar Madiuan jatuh bahkan pada 24 Agustus 1948 PKI telah menguasai Kudus, kemudian tanggal 25 Agustus Pati juga dikuasai FDR-PKI. Seterusnya kota sekitarnya seperti Porwodadi, Blora, Rembang Cepu juga berjatuhan ke tangan pemberontak. Bahkan pengaruhnya sampai ke Magelang, pemberontak juga mendapatkan dukungan besar dari kota di pusat Jawa Tengah itu. Selain kantor pemerintah, beberapa perusahaan minyak dan

¹⁹ Seruan ini disirkan dalam *Harian Front Nasional*, Madiuan 21 September 1948.

transportasi serta perkebunan dikuasai PKI sebagai sumber pendanaan mereka.²⁰

Dengan menguasai kota itu PKI mulai melumpuhkan pesantren dan membantai para kiainya. Setelah itu berbagai perkampungan Islam mulai jadi sasaran seperti yang dialami beberapa perkampungan Muslim juga menjadi sasaran amukan FDR PKI, hal itu dialami oleh masyarakat Desa Bangsri, harta penduduk desa itu dirampas dan penduduknya ditawan lalu dimasukkan ke dalam sumur-sumur tua. Korban mencapai belasan orang, hanya beberapa yang bisa meloloskan diri. Berbagai tempat ibadah baik langgar dan masjid mereka rusak dan dinodai, sebelum kemudian dibakar atau menangkap jamaahnya. Kekejaman seperti itu mereta di daerah yang dikuasai FDR-PKI, baik di Madiun maupun kota-kota lain di sekitarnya seperti Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan Trenggalek dan sebagainya.

Sejak dikeluarkannya peringatan oleh KH Hasyim Asy'ari tahun 1947 itu, kalangan NU sendiri selalu siaga terhadap serbuan PKI, tetapi mengingat besarnya kekuatan PKI maka sulit dibendung. KH Wahab Hasbullah seorang Pemimpin Besar NU ditugaskan untuk mengkonsolidasi NU dan Barisan Sabilillah se Jawa. Pertemuan ini sebenarnya untuk menghadapi agresi Belanda tetapi juga sekaligus membentengi Indonesia dari komunis, yang sudah merajalela di mana-mana. Pertemuan yang dihadiri petinggi NU dan pimpinan Sabilillah se Jawa tersebut diselenggarakan di kota Ngawi yang jaraknya sangat dekat dengan Madiun. Begitu pula para kiai yang lain mendapatkan tugas yang sama antara lain KH Yusuf Hasyim juga mendapatkan tugas mengkonsolidasikan para ulama Pesantren yang ada di sekitar kota Madiun. Selama masa revolusi itu kantor pusat PBNU dipindah dari Surabaya ke Madiun, sehingga kesibukan para tokoh NU terpusat di Madiun.

Bersamaan dengan dilaksanakannya pertemuan antara pemimpin NU dan Pimpinan Hisbullah Sabilillah itu terjadilah peristiwa

²⁰ Agus Sunyoto Dkk, *Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun*, Penerbit Grafiti, Jakarta, 1990, hal. 161.

Kudeta berdarah di Madiun. Pertemuan itu langsung ditutup seluruh peserta disuruh segera kembali ke daerah, masing-masing untuk jihad menghadapi PKI. Untuk bisa keluar dari Ngawi juga sangat susah, tetapi karena semuanya telah belajar strategi dan taktik bertempur di Cibarusa selama masa penjajahan Jepang, maka mereka bisa keluar dari ngawi dengan selamat. Termasuk Kiai Wahab sendiri sebagai tokoh terkemuka NU yang wajahnya sangat mudah dikenali, ketika kembali ke Surabaya harus melewati Madiun. Gara bisa menembus blokde PKI dengan selamat, maka Kiai itu berhasil keluar dari Ngawi bahkan melewati Madiun dengan selamat sampai ke Surabaya dengan menyamar sebagai orang biasa, sehingga bisa menyelamatkan diri dari sergapan PKI.²¹

2. *Pembantaian Pimpinan Pesantren di Madiun dan Magetan*

Rupanya PKI sadar betul bahwa pesantren merupakan kekuatan strategis dalam mempertahankan NKRI, terbukti sewaktu perang 10 November digerakkan secara serentak oleh komunitas pesantren setelah mendengar seruan Resolusi Jihad yang dikeluarkan PBNU 22 Oktober 1945, heroisme kaum santri itu berhasil mengusir tentara Sekutu dari Surabaya. Karena itu selain melumpuhkan TNI dan Polisi, maka selanjutnya pesantren dan para ulamanya juga harus dilumpuhkan. Untuk menghadapi kekuatan pesantren itu PKI memiliki slogan tersendiri yaitu **Pondok Bobrok, Langgar Bubar, Santri Mati !**. Ternyata slogan itu bukan sekadar gertakan, tetapi benar-benar dilaksanakan. Sementara strateginya adalah teror, tangkap dan bantai.

Penculikan terhadap para pimpinan pesantren yang selama ini aktif dalam perjuangan Kemerdekaan telah dimulai. Para kiai yang mengajarkan agama dan cinta tanah air itu dianggap menghambat agenda PKI karena itu harus dimusnahkan. Sebagai contoh KH

²¹ Saifuddin Zuhri, *KH Wahab Hasbullah Bapak Pendiri NU*, Pustaka Falaalhiyah, Yogyakarta, 1983, hal. 133.

Imam Mursyid pemimpin Pesantren Sabilil Muttaqin, dan pemimpin Tarekat Syatariyah yang kharismatik dari Takeran mereka culik pada 17 September 1948, se usai Sembahyang Jum'at. Akhirnya kiai itu menyerah, sebab kalau melawan diancam pesantrennya akan dibakaar dan keluarganya dihabisi. Padahal Kiai Musyid inilah yang turut berjasa membantu KH. Wahid Hasyim anggota BPUPKI merumuskan konsep Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Mukadimah UUD 1945.²² Karena itu Mukadimah UUD 1945 itu sangat bernuansa religious, suatu hal yang tidak disukai oleh PKI.

Pada sore dan malam harinya beberapa Kiai lainnya juga mengalami nasib yang sama. Saat itu pula para pejabat pemerintah juga mereka culik dan dibunuh. PKI tahu bahwa selama ini pesantren merupakan saingan kuatnya dalam melakukan revolusi sosial, karena pesantren jauh lebih dipercaya ketimbang PKI yang hanya ditakuti. Karena itu untuk mengawali revolusi sosialnya didahului dengan melumpuhkan pesantren. Dengan demikian PKI bisa melumpuhkan penyengga kekuatan Negara ini.

Penangkapan pada para pengasuh pesantren terus dilanjutkan, maka pada 19 September 1948 KH Muhammad Nur ditangkap, ditangkap pula Kiai pesantren seperti Ustadz Ahmad Baidlowi, Muhammad Maidjo, Rofi'i Tjiptomartono dan lain sebagainya. Mereka seemuanya dibantai dimasukkan sumur bersama ratusan korban lainnya.²³ Keseluruhan kiai di Lingkungan pesantren Takeran yang menjadi korban sejumlah 14 orang. Karena jumlahnya banyak mereka diikat menjadi satu sehingga mudah digiring ke lubang pembantaian. Mereka tidak diikat dengan rantai, melainkan dengan tali kulit bambu yang sangat tajam sehingga bila mereka bergerak kulit mereka tersayat.

²² Keterangan ini diberikan oleh KH Zuhdi cucu KH Imam Mursyid, saat diwawancara pada Oktober 2012.

²³ Lihal Maksum, Agus Sunyoto Dkk, *Lubang-Lubang Pembantaian*, hal. 19-20.

Pesantren lain seperti Pesantren Burikan juga dibakar oleh FDR-PKI sementara kiaiinya ditangkap seperti K. Keang, K Malik dan Mulyono semuanya dibantai dan dimasukkan lubang pembantaian yang sudah mereka siapkan. Harta benda mereka di rampas, berbagai kitab dibakar, sehingga santri bubar, menyelamatkan diri kembali ke kampung halaman masing-masing, atau mengungsi ke daerah lain. Hal itu membuat pesantren semakin sepi dan keluarga pesantren tidak mendapat penjagaan yang ketat dari para santri. Penjagaan hanya dilakukan oleh keluarga kiai dan tetangga terdekat, sehingga posisi para kiai sangat terancam.

Lain lagi dengan cerita KH Sulaiman Zada karena santrinya sudah lama mengungsi, maka dengan mudah ditangkap gerombolan PKI, karena tidak melakukan perlawanan maka Pesantren dibiarkan berdiri, walaupun santrinya sudah lama meliburkan diri sejak Madiun dilanda pemberontakan. Namun demikian nasib sang Kia dengan keluarganya tidak bisa terselamatkan di bawah pembantaian kelompok komunis yang sengaja ingin membumihanguskan pesantren sebagai basis gerakan Islam yang menghalangi ekspansi PKI. Baru beberapa tahun kemudian jenazahnya ditemukan.

Perburuan terhadap para ulama pimpinan pesantren terus dilakukan, sehingga seorang kiai yang pesantrennya berada jauh di luar Magetan juga menjadi sasaran. KH Imam Shafwan Pemimpin Pesantren Kebonsari bersama kedua orang anaknya yaitu K Zubair dan K. Abu Bawani yang sedang memimpin pengajian juga dibantai oleh FDR-PKI. Pada umumnya para kiai telah mempersiapkan diri dengan ilmu kanuragan untuk membentengi diri dari serangan penjahat terutama gerombolan PKI, hal itu dialami oleh Kiai Imam Shofwan, saat dianiaya PKI, walaupun kedua anaknya telah tewas, tetapi sang kiai masih bertahan walaupun menghadapi berbagai siksaan. Karena PKI sudah jengkel dan tidak sabar lagi kemudian dimasukkan hidup-hidup dalam sumur, dalam kondisi terjepit itulah KH Imam Shafwan mengumandangkan adzan yang disaksikan oleh beberapa

santrinya, tetapi kemudian dikubur dalam keadaan masih hidup oleh pasukan Pesindo-PKI.

Peristiwa serupa dialami oleh KH Soelaiman Zuhdi Affandi ketika sedang i'tikaf di masjid ditangkap oleh gerombolan PKI, setelah diseret keluar dari masjid lalu dimasukkan tahanan di Pabrik Gula Gorang-Gareng. Setelah itu dipindahkan ke tempat tahanan lain di Magetan dengan dinaikkan kereta api berjejal dengan tahanan lain. Setibanya di Desa Soco, para tahanan termasuk K Soilaeman disiksa. Karena Kiai ini juga seorang yang digdaya, maka tidak mudah dibunuh. Karena kejenghkelannya lalu oleh PKI dimasukkan ke dalam sumur tua dalam keadaan hidup-hidup. Lain lagi dengan cerita yang dialami KH Hamzah, saat mendengar pemberontakan PKI di Madiun Kiai ini hendak pergi ke Magetan. Tetapi ketika baru sampai di Desa Bathokan telah disergap PKI, kemudian di tahan beberapa hari tanpa diberi makan baru setelah itu dikubur hidup-hidup.

Pendek kata semua pesantren besar kecil terutama yang dipimpin oleh Kiai kharismatik menjadi sasaran FDR PKI. Pesantren Tegal Rejo yang didirikan oleh para Prajurit Pangeran Diponegoro di Magetan yang dipimpin oleh Kiai Imam Mulyo itu tidak lepas dari serbuan PKI. Pada 18 September Pesantren ini dikepung oleh Pemberontak, tetapi Kiai Imam Mulyo terus bertahan dengan para santrinya. Kepada para santri Kiai Imam Mulyo menasehati agar tidak menyakiti PKI. Padahal saat itu PKI sudah mulai melempar dan menembaki pesantren. Dengan kekuatan kerohanian disertai pekikan Allahu Akbar semua kelompok yang hendak menyerbu pesantrennya itu bisa dilumpuhkan semuanya roboh dan kemudian melarikan diri.

Pada hari berikutnya FDR PKI melakukan serangan lagi bahkan dengan senjata lebih lengkap. Pesantren ditembaki bahkan dilempari puluhan granat, anehnya tidak ada tembakan yang mengenai sasaran, bahkan tidak satupun granat yang sudah dilepas picunya bisa meletus. Hanya saja ada seorang santri yang melanggar aturan Kiai Imam, yakni keluar pagar menyerang PKI. Ketika melakukan serangan itulah santri Tegalorejo bisa

ditembak hingga mati. Gagalnya serangan itu PKI membuat taktik lain, yaitu mengajak berunding, di dalam perundingan itu mereka ditangkap.²⁴

Untuk melampiaskan dendamnya, pada tanggal 24 September 1948 Kampung Kauman diserbu oleh pasukan FDR-PKI, semua rumah yang ada dikampung itu sekitar 72 rumah dibakar dan penghuninya sekitar 149 pria ditawan lalu digiring ke Maospati dengan tangan diborgol kemudian semuanya dimasukkan dalam lubang pembantaian. Tetapi kelompok ini kemudian luput dari pembantaian karena pasukan TNI pro pemerintah dari Yogya berhasil menyelamatkan mereka. Dari berbagai tempat penyiksaan terdapat tempat yang sangat mengerikan yaitu lubang pembantaian di sumur Soco di sana ditemukan beberapa sumur yang digunakan untuk membasmi korban terutama para penduduk Islam sekitar 108 umat Islam dimasukkan lubang pembantaian sedalam 12 meter itu. Korban ini kemudian digali beberapa tahun kemudian sehingga sudah sulit diidentifikasi jati dirinya.

Dari kalangan pejabat pemerintah juga banyak yang menjadi Korban keganasan PKI tidak sempat menyelamatkan diri, karena pembantaian dilakukan secara serentak di kota-kota sekitar Madiun, mulai dari Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Ngawi dan Tulungagung. Terutama daerah-daerah yang selama ini menjadi basis PKI.

3. *Pembantaian di Pacitan dan Ngawi*

Untuk memperkuat posisinya, selain melumpuhkan semua kekuatan pemerintah, PKI juga terus memburu para kiai pimpinan pesantren hingga jauh di luar Madiun. Di Kabupaten Pacitan terdapat pesantren kuno yang sangat terkenal, tempat belajar para ulama besar Tanah Jawa. Dari sana lahir ulama besar yang berkaliber internasional yang sangat disegani yaitu Kiai Mahfudz Attarmasi yang kemudian menjadi syekh di tanah suci.

²⁴ Agus Sunyoto Dkk, *Lubang-Lubang Pembantaian*, hal. 71.

Pada tahun 1948 pesantren ini dipimpin oleh salah satu keturunannya yaitu KH Hamid Dimiyati, selain seorang pengajar dia ini juga aktivis pergerakan, karena itu juga menjadi anggota Parlemen yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Ketika terjadi pemberontakan Madiun situasi menjadi kacau dan seluruh saluran komunikasi terputus, untuk mengatasi kebuntuan itu KH Hamid Dimiyati berusaha melakukan komunikasi langsung dengan para pemimpin Republik di Yogyakarta. Sambil bersembunyi-sembunyi perjalanan dilakukan. Bahkan mengingat gentingnya situasi terpaksa melakukan penyamaran. Tetapi ketika rombongan masuk ke Kabupaten Wonogiri penjagaan yang dilakukan oleh PKI sangat ketat akhirnya Kiai beserta rombongannya yang berjumlah 15 orang itu disergap gerombolan Pesindo. Mereka dimasukkan ke dalam tahanan Baturetno dalam tahanan itu disiksa dengan kejam. Ketika tahanan itu penuh rombongan K Dimiyati itu dipindah ke rumah tahanan Tirtomoyo. Di dalam tahanan itu siksaan terus dilakukan, kemudian akhirnya semuanya dibantai kemudian secara bersama sama dimasukkan kedalam sumur sebagai kuburan massal.

Hanya satu orang yang dibiarkan hidup yaitu Shoimun, yang sengaja dilepas oleh PKI sebagai teror dan peringatan agar terbunuhnya Kiai besar dan anggota KNIP itu diketahui oleh umat Islam dan didengar oleh pemerintah. Shoimun itu pulalah yang menunjukkan tempat pembantaian, dan setelah sumur pembantaian tersebut diketahui kemudian hari lalu digali, jenazah Kiai beserta para aktivis pergerakan serta para santrinya yang tinggal tulang berserakan itu kemudian dipindahkan ke taman Makam Pahlawan sebagai tanda jasa bagi para pahlawan pembela Kemerdekaan Indonesia yang dibantai oleh PKI-Pesindo yang anti agama.

Tentu saja terbunuhnya Kiai Hamid Dimiyati dan ditemukannya jasadnya dalam sumur pembantaian itu menjadi kabar besar yang sangat memukul perasaan umat Islam terutama kaum santri, sehingga menjadi pembicaraan yang meluas di masyarakat tentang kekejaman PKI dan usaha untuk melakukan perlindungan dan

pemusnahan PKI. Seperti lazimnya sembahyang ghaib, bacaan doa serta bacaan tahlil dilakukan di mana-mana, sehingga hal itu menyatukan semangat umat Islam khususnya kaum santri untuk kembali membebaskan Madiun dan sekitarnya dari cengkeraman PKI.

Para pimpinan pemberontak terus memburu para Kiai ke daerah lain sampai ke Ngawi, di daerah yang berbatasan dengan Sragen Jawa Tengah itu PKI menangkap semua kelompok yang di luar PKI, terutama kelompok agama. Di Walikukun Ngawi terdapat seorang kiai sepuh yang bernama Kiai Dimiyati yang dikenal dengan Mbah Ngompak. Ketika Kiai sepuh ini sedang melakukan sembahyang tahajud di tengah malam dalam mesjid di Pesantren Tanjung Sari yang diasuhnya itu tiba-tiba disergap gerombolan Pesindo. Mbah Ngompak diseret keluar mesjid, setelah itu diikat lalu diseret dengan kuda melalui jalanan sepanjang 10 KM tetapi ajaibnya Kiai sepuh itu masih bertahan hidup. Kemudian diseret lagi hingga sampai disebuah sungai yang curam, badan Mbah Ngompak yang sudah babak belur itu dilempar ke dalam sungai hingga menemui ajalnya di sungai itu.

Pembantaian lain dilakukan gerombolan PKI pada jemaah Kiai Zaenal Abidin, untuk menjaga setiap kemungkinan Kiai beserta 25 orang santrinya selalu berjaga di mesjid hingga semalam suntuk melakukan berbagai riyadloh untuk keselamatan umat Islam dan bangsa Indonesia. Sudah lama gerombolan pemberontak mengincar kiai beserta santrinya itu. Tetapi ketika sudah lama ditunggu tidak mau keluar dari mesjid, maka mereka diseret keluar secara paksa. Kemudian mereka digiring disekap kedalam sebuah rumah penduduk yang sudah kosong. Dalam keadaan tersekap itu rumah dibakar sehingga kiai beserta santrinya itu semuanya hangus terbakar.

Tentu saja pemberontakan PKI ini sangat membahayakan terhadap keselamatan Republik yang baru dibangun ini. Negeri hasil Proklamasi yang baru berusia beberapa tahun yang masih melakukan perjuangan melawan tentara sekutu dan agresi Belanda di berbagai front, sehingga Republik ini harus

menghadapi dua lawan sekaligus. Musuh dari dalam yaitu PKI dan dari luar Belanda beserta tentara Sekutu. Ternyata kedua kekuatan yang selama ini bermusuhan menyatu dalam menghadapi Republik Indonesia. Front Demokrasi Rakyat (FDR) mendapat bantuan besar dari Belanda. Dalam penggerbekannya terhadap Markas PKI dan Pesindo, tentara Hizbullah menemukan berbagai amunisi dari Belanda dan ditemukan bendera Belanda di markas mereka.

Peberontakan FDR itu juga difasilitasi Belanda sebagai bentuk politik *divide et impera* (memecah belah) untuk melumpuhkan Indonesia dari dalam agar Belanda mudah untuk merebut kembali Republik Indonesia sebagai negara jajahannya. Pada hari Ahad 19 Desember 1948 ketika republik ini menghadapi pemberontakan PKI, situasi kacau ini dimanfaatkan Belanda untuk kembali melakukan Agresi Kedua menduduki Ibu Kota RI Yogyakarta dan menagkap Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dengan didudukinya Yogyakarta, maka satu-persatu daerah stretegis di Jawa diduduki oleh Belanda. Tentara Indonesia di bawah Pimpinan Jenderal Sudirman dengan didukung pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin KH Masykur dan KH Zainul Arifin dari NU terus melakuakn perang. Sebaliknya PKI Pesindo yang juga berambisi mengambil alih kekuasaan dengan jalan pintas, tertarik dengan agenda Belanda itu, karena itu mereka melakukan pemberontakan pada saat bangsa ini sedang melakukan revolusi nasional.

Dengan didudukinya Jogja oleh Belanda maka perang gerilya dilanjutkan diberbagai daerah, termasuk daerah yang sealama ini menjadi basis PKI seperti Madiun, Ponorogo dan Trenggalek. Bahkan Jenderal Sudirman sebagai pemimpin tertinggi TNI melakukan serangan pada Belanda dengan mengambil basis di Trengalek. Kumudian pimpinan kesatuan militer yang lain yaitu KH Masykur Komandan Sabiliillah yang juga ketua PBNU itu melakukan gerilya di Trenggalek bersama Jenderal Sudirman. Persatuan TNI-Sabilillah inilah yang mampu menghadang laju Agresi Belanda dan sekaligus mampu membendung gerakan sisa-

sisia PKI yang masih berkeliaran di kawasan Selatan Jawa itu. Dalam perjalanan dari Solo, Madiun hingga Trenggalek itu KH Masykur menemukan desa-desa yang dilewati itu menjadi korban puluhan orang meninggal, harta benda dirampas oleh PKI.²⁵

Dengan kesigapan aparat TNI dan seluruh kekuatan rakyat terutama kelompok Hizbullah dan Sabilillah, maka kekuatan PKI-Pesindo itu dengan mudah ditaklukkan, walaupun korban dari kalangan pejabat negara kalangan ulama pimpinan pesentren sudah terlanjur besar. Tetapi tindakan cepat itu mampu mencegah terjadinya pembantaian yang lebih luas dan lebih massif di kota lain di sekitar Madiun. Di daerah yang pendukung PKI nya kuat terjadi bentrokan keras, di sini terjadilah perang saudara antara PKI dengan kekuatan Islam dan TNI, sehingga korban di kedua belah pihak juga besar.

Setiap daerah yang dilalui oleh pasukan PKI Pesindo di situ dilakukan pembantaian dan perampasan. Bila terjadi perlawanan maka terjadilah perang saudara, yang memakan korban di kedua belah pihak, setelah itu PKI lari lagi mencari perlindungan di daerah tersembunyi menjauh dari kejaran TNI. Walaupun keadaan sudah di kuasai TNI mulai dari pusatnya di Madiun sendiri maupun daerah sekitarnya yang menjadi benteng pertahanan PKI terjadi berbagai peristiwa bentrok antar PKI dan warga terus terjadi walaupun dalam skala kecil.

D. Memori Kekejaman dan Meningkatnya Kewaspadaan

1. Penyelesaian Konflik.

Dengan kekuatan penuh dari TNI dari Divisi Siliwangi dan ditopang oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah keadaan bisa dipulihkan. Mengingat kekuatan PKI yang telah sedemikian kuat dan menyebar yang meliputi kawasan Jawa Timur dan Jawa tengah maka pasukan pemerintah harus bekerja keras dan cepat. Dengan kerja kerasnya itu maka, kesatuan Republik bisa dipertahankan persis pada 30 September 1948 Madiun dan semua daerah yang

²⁵ Soebagijo IN, *Biografi Kiai Masykur*, Gunung Agung, Jakarta, hal., 91.

diduduki PKI telah direbut kembali. Penaklukan ini disiarkan melalui radio RRI yang sudah dikuasai kembali oleh TNI.

Pemberontak menguasai keadaan sekitar 13 hari dengan memakan korban nyawa dan harta serta budaya yang tak terhidung jumlahnya. Setelah gembong pemberontakannya seperti Muso, Amir Syarifuddin, Maruto Darusman serta pimpinan lainnya dieksekusi mati, pasukan FDR PKI makin terdesak terus dalam pengejaran TNI. Ketika dalam Pengejaran pasukan Siliwangi beberapa tokoh seperti DN Aidit dan gembong PKI lainnya seperti Alimin, Tan Ling Djie, Njoto termasuk Soemarsono, selamat karena masuk ke wilayah pendudukan Belanda. Dan atas jasa Belanda yang selama ini menjadi sekutu FDR PKI, maka mereka dilarikan ke luar negeri untuk menyelamatkan diri.²⁶

Untuk menjaga persatuan ini pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan pengejaran secara tuntas, tidak juga melakukan eksekusi atau pembantaian secara keji. Sebaliknya malah menawarkan amnesti bagi bekas pemberontak yang mau balik dan bekerjasama dengan Republik. Demi keselamatan mereka, maka banyak bekas aktivis dan juga pimpinan PKI-Pesindo yang kembali bergabung dengan TNI dan menyatu dengan masyarakat, sehingga kekejaman dan kejahatan mereka terlindungi. Kebijakan Republik yang hati-hati dan lunak dengan tidak melarang dan membubarkan PKI itu memberi peluang besar bagi PKI, hanya pimpinannya saja yang ditangkap ada yang dibunuh dan diadili, tetapi partainya tidak dibubarkan. Langkah kompromi ini diambil PKI sebagai strategi untuk mengkonsolidasi partai yang sudah porak-poranda.

Kebetulan yang di tangkap hanya para tokohnya, sementara kadernya masih bebas berkeliaran, maka berbagai monuver dan sabotase tetap dilakukan. Sebagai contoh ketika Belanda melakukan Agresi ke Kota Trenggalek pada 20 Maret 1949 di mana tentara Republik melakukan taktik bumi hangus terhadap

²⁶ Lihat Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1987, hal., 361.

beberapa tempat strategis agar Belanda tidak bisa masuk. Tentu saja tidak termasuk masjid. Ketika TNI telah keluar dari kota dan bertempur di perbatasan. Kesempatan itu digunakan oleh para kader PSI-Pesindo yang masih berkeliaran, bahkan menyamar sebagai pejuang itu untuk menghancurkan simbol umat Islam yang paling utama yaitu masjid Agung.

Masjid Agung Trenggalek masjid bersejarah Kebanggaan Umat Rakyat Trenggalek secara keseluruhan karena kemegahannya, yang dibangun oleh Bupati Trenggalek Sumotruno pada tahun 1743, atas restu dari Sunan Pakubuwono II Raja Kartasura. Mesjud ini juga merupakan monumen perjuangan nasional karena dibangun oleh prajurit Untung Suropati yaitu KH Nur Khalifah, yang mengikuti perjuangan Untung Suropati dari Batavia hingga Trenggalek Kediri. Untuk menjaga kesejarahan masjid ini maka pada tahun 1916 dipugar oleh Bupati Trengalek Purbonegoro sehingga menjadi lebih kokoh dan lebih megah, karena itu selalu menjadi kebanggaan Masyarakat Trenggalek. Hal itulah yang tidak menyenangkan bagi PKI, sehingga berusaha keras menumbangkan masjid Agung ini. Politik bumi hangus TNI itu mereka tunggangi untuk melampiaskan dendamnya sendiri.

Niat itu dilaksanakan PKI dengan penuh kesungguha walaupun umat Islam gigih menentangnya, terutama Imam masjid sendiri yaitu KH Yunus. Imam Masjid ini adalah keturunan dari Kiai Nur Kholifah imam pertama masjid ini, yang tidak lain adalah salah seorang pasukan pejuang nasional Untung Suropati, karena itu Kiai Yunus ini memiliki keberanian seperti kakeknya sebagai seorang prajurit pejuang kemerdekaan. Karena itu K Yunus ini walaupun telah beberapa kali dipaksa dan telah diultimatum tetapi tidak beranjak dari mihrab Masjid, sementara PKI telah menyiapkan belasan jurigen berisi bahan bakar, serta telah menempatkan dinamit di bawah selurh tiang masjid yang kokoh yang siap diledakkan.

Bertepatan dengan jam 12 tengah malam akhirnya KH Yunus diseret keluar masjid dan dicampakkan ke halaman, baru kemudian masjid bersejarah yang megah itu dibakar dan

diledakkan, sehingga musnah rata dengan tanah. Penganiayaan terhadap imam Masjid serta pembakaran Masjid itu disaksikan ribuan jamaah dengan penuh duka. Pembakaran tengah malam itu membentuk suasana haru tersendiri, karena api berkobar di tengah kegelapan, itu terlihat sehingga dari jarak yang jauh tempat mereka itu menyelamatkan diri dari serbuan Belanda dan kekejaman PKI, kebakaran masih bisa dilihat dan dirasakan. Hingga pagi hari baru kebakaran padam ketika seluruh bahan bangunan telah menjadi abu.

Peristiwa tragis ini tentu menjadi kabar yang menggemparkan bagi umat Islam, tidak hanya di Tregnggaalek bahkan menyebar dari mulut ke mulut seluruh Jawa mengenai kekejaman PKI yang anti agama bahkan anti Tuhan. Berbagai peristiwa perampokan, penganiayaan bahkan pembunuhan yang dilakukan pada ulama dan pengasuh pesantren. Ditambah lagi dengan pembakaran Masjid Agung itu betul-betul melukai ketenagan masyarakat Islam dan menjadi peristiwa yang traumatik yang tidak pernah terlupakan, dan menjadikan umat Islam melakukan kewaspadaan yang sangat tinggi terhadap ulah PKI, sebab ini tidak hanya menyangkut soal politik kenegaran, tetapi sudah menyangkut masalah akidah, karena itu bagi umat Islam menahan serangan PKI ini merupakan perjuangan hidup atau mati.

Peristiwa tragis yang terjadi di berbagai tempat itu terus diingat bahkan disebarluaskan melalui berbagai forum, seperti pengajian, forum diskusi, forum silaturahmi, termasuk obrolan bebas di serambi masjid atau di warung kopi sehingga tertanam menjadi kesadaran masyarakat tentang bahayanya PKI. Dan keharusan mereka untuk melakukan pencegahan terhadap perkembangan PKI yang siap menumpahkan darah terhadap siapa saja yang berbeda dengan ideologi mereka.

2. Propaganda untuk Melepas Tanggung Jawab.

Noda hitam sejarah Peristiwa Madiun yang dilakukan FDR PKI beserta sekutunya PSI-Pesindo yang sudah sangat jelas kekejaman yang dilakukan mereka terhadap umat Islam dan aparat

pemerintah yang sah. Tetapi kelompok PKI dengan keculasannya mulai mengingkari petualangan yang membawa ratusan korban dan menyengsarakan ribuan rakyat yang tidak berdosa itu sebagai bukan tindakannya.

Penyangkalan pertama mengenai peristiwa Madiun yang terkutuk itu disampaikan seorang pemimpin PKI yang dahulu memasukkan Muso ke Indonesia yaitu Suripno yang menulis dari dalam penjara bahwa:

“Sepanjang pengetahuan saya, PKI tidak pernah membicarakan atau menerima rencana untuk mengadakan perlawanan menentang dengan kekuatan senjata.....

Selama saya berkenalan dengan saudara Muso di Praha dan di Indonesia, walaupun dalam pembicaraan privat atau dalam organisasi tidak pernah ada ucapan untuk mengadakan atau merencanakan pemberontakan atau *coup* atau revolusi dengan kekuatan senjata. Sepanjang pengetahuan saya pikiran saudara Muso ialah untuk menyelamatkan Revolusi dan Republik Indonesia....

Pembunuhan–pembunuhan dan lain-lain kekejaman yang terjadi di beberapa tempat, kami tidak merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kami tidak pernah memberi instruksi atau usul atau aanmoedigen untuk melakukan apa yang dinamakan pembersihan secara kejam.”²⁷

Dengan mudahnya FDR PKI beserta Pesindo memanipulasi sejarah, setelah melakukan pembantaian secara kejam dengan ribuan korban baik dari kalangan ulama, santri, para pejabat dan rakyat yang tidak berdosa, di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tetapi setelah mereka dilumpuhkan dengan mudahnya mengatakan tidak terlibat dan tidak ikut bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan. Padahal seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia menyaksikan peristiwa ini dengan seksama, sebagaimana disiarkan di media nasional dan internasional, semua bukti sangat jelas. Berbagai pernyataan Muso melalui siaran persnya termasuk pidato di radio, semuanya diucapkan sendiri dan tidak atas tekanan kelompok lain adalah bukti pemberontakan PKI itu. Semua

²⁷ Lihat Suripno, *Surat dari Penjara*, yang dimuat dalam buku Djamal Marsudi hal., 87-78.

pelaku kejahatan adalah kelompok FDR PKI yang terdiri dari Pesindo (PSI) dan Sobsi yang secara personal dikenal secara pribadi oleh para ulama dan pejabat yang menjadi korban. Inilah siasat PKI untuk membersihkan diri dengan memanipulasi sejarah.

Banyak tulisan yang dikeluarkan CC-PKI yang membantah keterlibatannya dalam peristiwa Madiun yang gagal itu, antara lain; *Buku Putih Tentang Peristiwa Madiun*. Kemudian juga buku *Menggugat Peristiwa Madiun*. Diterbitkan pula buku; *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948*. Tulisan Suripno dan berbagai buku yang diterbitkan CC PKI itulah yang kemudian juga digunakan oleh DN Aidit, Sekretaris FDR PKI yang kemudian juga menjadi Ketua CC PKI, yang dengan tegas menyangkal keterlibatan FDR PKI dalam pembantaian tragis dan pengemabialihan kekuasaan PKI di Madiun dengan menerbitkan buku putih yang berjudul; *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948 dengan Peristiwa Sumatera 1956*.

Dalam tulisannya ini Aidit lebih provokatif melakukan tantangan pada pemerintah untuk maju ke pengadilan. Bahkan ia melakukan tuduhan balik pada pemerintah bahwa PKI-lah yang menjadi korban peristiwa Madiun. Karena buku putih ini ditulis tahun 1957 saat PKI telah memiliki anggota sekitar enam juta orang sehingga mereka lebih berani dalam melakukan serangan balik. Dalam buku itu Aidit melakukan pemutarbalikan fakta:

“Kapan saja Hatta ingin Peristiwa Madiun dibawa ke pengadilan, kami dari PKI selamanya bersedia menghadapinya. Kami yakin bahwa jika sosial ini dibawa ke pengadilan bukan kami yang akan menjadi terdakwa (tersangka), tetapi kamilah pendakwa (penuntut). Kamilah yang akan tampil ke depan sebagai pendakwa atas nama Amir Syarifuddin, atas nama Suripno, Maruto Darusman, Dr Wiroreno, Dr Rustam, Harjono, Djokosujono, Sukarno Sutrisno.... yang menjadi korban keganasan satu pemerintah yang dipimpin oleh burjuis Minagkabau Muhammad Hatta.

Hatta bertanggung jawab atas penculikann, pembunuhan dan perang saudara 1948.... Sesudah penculikan dan pembunuhan di Solo yang diatur dari Yogya (Ibu Kota), keadaan di Madiun menjadi sangat tegang, sehingga terjadilah pertempuran antara pasukan dalam angkatan darat yang pro dan anti penculikan di Solo.....Dalam keadaan kacau demikian ini Residen Kepala

Daerah tidak ada di Madiun, Wakil Residen tidak mengambil tindakan apa-apa, sedang Wali Kota sedang sakit. Untuk mengatasi keadaan ini maka Front Demokrasi Rakyat di mana PKI Termasuk di dalamnya mendesak supaya Kawan Supardi Wakil walikota Madiun bertindak sementara sebagai pejabat Residen selama residen Madiun belum Kembali.

Nah, tindakan inilah tindakan mengangkat wakil wali kota menjadi Residen sementara inilah yang dinamakan pemerintah Hatta tindakan merobohkan pemerintah Republik Indonesia, tindakan mengadakan kudeta dan tindakan mendirikan pemerintah Soviet.”²⁸

Semua buku itu merupakan upaya PKI untuk membersihkan dirinya dari darah dan noda pemberontakan yang dilakukan di Madiun. Padahal siapapun tahu dan sejarah mencatat dengan cermat setiap peristiwa, pernyataan, pikiran sikap dan tindakan yang dilakukan oleh FDR PKI, semuanya terekam dalam media dan ingatan serta pengalaman massa, sehingga sulit bisa diingkari termasuk oleh PKI sendiri. Komunisme adalah sudara kembar dari kapitalisme dan imperialisme yang lahir dari filsafat barat mulai dari renaissance hingga zaman pencerahan, yang sangat menguasai teknik agitasi dan propaganda sangat baik melalui penerbitan berbagai karya ilmiah, maupun melalui media massa, yang sangat mereka kuasai. Karena itu propaganda mereka itu mudah mengecoh masyarakat yang tidak kritis dan kurang waspada.

3. Propaganda dan Trauma serta Kewaspadaan.

Selama ini PKI masih sering melontarkan propaganda damai bahwa mereka tidak anti agama, bersahabat dan menghormati kebebasan beragama. Mereka hanya membela rakyat dan melawan kapitalisme serta imperialisme dibuktikan masyarakat sendiri sebagai suatu taktik belaka. Memang hal itu sebagian bisa mereka buktikan beberapa tokoh agama yang menjadi tokoh PKI, tetapi masyarakat tidak mudah terkecoh oleh kenyataan yang langka itu. Sebaiknya masyarakat menganggap tokoh agama yang mengikuti

²⁸ Periksa, DN. Aidit, *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948 dengan Peristiwa Sumatera 1956*, Penerbit Jajasan Pembaruan, 1957. hal., 10-11.

garis perjuangan PKI itu dianggap tidak tahu agama dan tidak tahu PKI.

Berbagai propaganda itu tidak mengubah kepercayaan masyarakat yang berpegang sikap dan perilaku PKI sehari-hari di lapangan yang jauh berbeda dengan apa yang mereka propagandakan. Dalam perilaku sehari-hari PKI Pesindo sangat kejam menghadapi lawan politiknya dan sikapnya yang jelas sangat anti agama dan anti Tuhan. Selain itu partai ini juga diidentifikasi masyarakat sebagai partainya para preman dan perampok. Partai ini memang menampung dan melindungi para perampok untuk melancarkan tindakannya, bahkan oleh PKI dijadikan sebagai sarana melakukan subversi. Masyarakat merasakan semuanya ini sebagai pengalaman sehari-hari yang sangat meresahkan kehidupan mereka.

Walaupun terbukti telah melakukan pembantaian dan melawan pemerintah yang sah, tetapi PKI tidak dilarang dan tidak dibubarkan, bahkan masih diberi hak hidup yang sama dengan partai lainnya. Ketika diselenggarakan Pemilu 1955 PKI bisa mengikuti Pemilu dengan leluasa seolah tidak memiliki cedera dan noda politik. Bahkan kemudian mererka memutarbalikkan fakta bahwa mereka tidak melakukan pemberontakan, tetapi semata diprovokasi oleh Muhammad Hatta. Padahal mereka melakukan tindakan sendiri dengan melakukan kerjasama dengan musuh RI yaitu Belanda untuk menghancurkan Republik ini. Propaganda itu diterima oleh rakyat yang tidak mengerti sejarah, sehingga PKI bisa ikut pemilu dan tetap mendapat dukungan besar dari masyarakat. Bayangkan sehabis melakukan pemberontakan berdarah itu PKI masih mapu meraih posisi empat besar setelah PNI, Masjumi dan NU. Sementara itu di beberapa basis PKI, kekuatan PKI bisa menandingi partai lain. Di Trenggalek misalnya PNI mendapatkan 11 Suara, PKI 10 Suara, sementara NU mendapat 6 Suara. Maka Bupati di kota ini bisa dipegang oleh PKI.

Perolehan suara yang besar ini PKI juga semakin percaya diri baik di parlemen maupun di Majelis Konstituante. Di dalam majelis

itulah PKI mulai memasukkan ajarannya dan melakukan serangan secara sistematis terhadap para lawan politiknya. Sementara itu di lapangan terus melakukan provokasi dan agitasi. Sejak dalam kampanye Pemilu 1955 PKI selalu mengejek partai lain sehingga telah beberapa kali terjadi perkelahian dengan partai lain.

Berbagai peristiwa turut membantu perkembangan PKI, pertama adalah diperbolehkannya ikut Pemilu 1955 sehingga memanfaatkan sistem kampanye terbuka itu untuk mempropagandakan ajaran dan programnya. Kedua, pemberontakan PRRI-Permesta, dijadikan sarana PKI untuk menggebuk Masyumi dan mengambil beberapa posisi penting baik dalam kemiliteran maupun dalam birokrasi. Apalagi setelah dibubarkannya Masyumi dan PSI tahun 1960, maka salah satu lawan PKI telah tumbang, tinggal berhadapan dengan NU sementara PNI sangat lemah dalam menghadapi PKI.

Melihat pengalaman sejarah dan perilaku PKI selama ini maka kalangan masyarakat terutama umat Islam selalu waspada terhadap propaganda dan kehadiran PKI. Karena itu NU sendiri walaupun melihat kekuatan suara PKI cukup berimbang tetapi menolak keras masuknya PKI dalam Kabinet. Demikian juga masyarakat di bawah secara umum terus melakukan kewaspadaan terhadap kemungkinan hadirnya PKI. Sebab dalam kenyataannya mereka tidak pernah berhenti melakukan sabotase, perampokan dan penjarahan di berbagai tempat. Semuanya tercatat dalam ingatan masyarakat. Dengan pengalaman traumatis seperti itu mereka selalu waspada bahkan secara fisik siaga dalam menghadapi PKI. []

BAB III

AKSI PEMANASAN PKI 1950-1965

Dengan alasan politik dan keamanan tertentu maka kebijakan yang diambil pemerintah terhadap pemberontak Madiun ini sangat lunak, setelah gembong pemberontakannya seperti Muso, Amir Syarifuddin, Maruto Darusman serta pimpinan lainnya dieksekusi

mati di Medan tempur. Beberapa menyerah dan dihukum sementara lainnya lari. Setelah keadaan dipulihkan pengejaranpun dihentikan, TNI perlu menghemat tenaga untuk menghadapi Belanda. Untuk menjaga keutuhan pasukan dan persatuan ini pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan pengejaran secara tuntas bahkan menawarkan amnesti bagi bekas pemberontak yang mau balik dan bekerjasama dengan Pemerintah Republik.

Demi keselamatan mereka, maka banyak bekas aktivis dan juga pimpinan PKI-Pesindo yang kembali bergabung dengan TNI dan menyatu dengan masyarakat. Kebijakan Republik yang hati-hati dan lunak dengan tidak melarang dan membubarkan PKI itu memberi peluang besar bagi PKI, hanya pimpinannya saja yang ditangkap ada yang dibunuh dan diadili, tetapi partainya tidak dibubarkan. Langkah kompromi ini diambil PKI sebagai strategi untuk mengkonsolidasi partai yang sudah porak-poranda. Berbagai usaha untuk membersihkan diri dari noda pemberontakan dilakukan oleh patra kader PKI, sehingga hal itu kembali membangkitkan moral kader PKI yang sudah terpuruk. Masyarakat bahkan kalangan pemerintah juga mulai terpengaruh, sehingga membiarkan PKI kembali beraktivitas.

Dalam suasana yang sudah kondusif semacam itu PKI yang melarikan diri dan bersembunyi baik di dalam negeri maupaun dari luar negeri mulai berani menampakkan diri. Alimin seorang kader senior PKI segera mengambil kepemimpinan PKI. Peluang itu digunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki citra partai. Dedengkot PKI ini segera mengubah strategi PKI dari Partai masa menjadi partai kader, yang seolah membawa citra partai sebagai partai yang membawa perdamaian dan kesejahteraan. Strategi Alimin untuk memulihkan citra PKI ini kurang disetujui oleh kelompok muda yang lebih radikal. Kelompok muda ini dipimpin oleh DN Aidit, yang setelah pemberontakan Madiun melarikan diri ke Vietnam dan Cina dan belajar banyak tentang tentara merah di sana dan itu yang akan diterapkan di Indoneia.

Setelah kembali ke Indonesia tahun 1950, ia berusaha memperkuat barisannya di kalangan PKI muda.²⁹

A. **Provokasi Politik PKI**

Kelihatannya kelompok progresif itu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membangkitkan kembali PKI dalam waktu cepat, sebelum kelompok lain termasuk pemerintahan terkonsolidasi. Akhirnya dalam Sidang Pleno CC PKI yang diselenggarakan pada 7 Januari 1951, DN Aidit bersama kliknya yaitu Lukman, Nyoto dan Sudisman, bisa mendepak Alimin dan mengambil alih kepemimpinan PKI. Aidit berusaha mengembalikan agenda besar PKI yaitu sebagai partai kader dan sekaligus partai massa yang progresif. Namun demikian propaganda sebagai partai baru dengan program Jalan Baru terus dikumandangkan untuk mencitrakan diri sebagai partai yang demokratis dan cinta damai.

Kepemimpinan Aidit yang progresif itu berhasil menyatukan kekuatan PKI yang porak poranda. Maka dalam waktu singkat beberapa organisasi kiri seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan juga Pemuda Rakyat bisa dirangkul menjadi organ resmi PKI, selain itu berbagai organisasi profesi dan pekerjaan dibentuk untuk menunjang perjuangan PKI. Dengan menyatunya kekuatan kiri itu maka agresivitas PKI tidak terbendung lagi. Aksi kekerasan memang telah menjadi sikap dan ideologi PKI, karena itu watak dasar ini sangat sulit untuk disembunyikan.

Sekitar tahun 1951 berbagai perusahaan strategis baik di sektor industri maupun perkebunan serta transportasi masih di tangan Belanda, maka SOBSI dan BTI melakukan serangkaian pemogokan. Langkah itu tidak hanya mengganggu perusahaan tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat. Bahkan kemudian pada 5 Agustus 1951 PKI melakukan serangan terhadap Markas Brimob Tanjung Priok Jakarta. Ketika perilaku PKI sudah

²⁹ Arif Mudatsir (ed.) *Subchan Sang Maestro*, hal., 45.

dianggap membahayakan keamanan negara maka Jaksa Agung dan Mahkamah Agung maupun Presiden Soekarno menyerukan dilakukn tindakan tegas terhadap semua pengacau keamanan negara.³⁰

Dengan adanya perintah itu maka aparat keamanan pemerinmtah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyerbuan terhadap aparat negara itu. Terbukti beberapa CC PKI terlibat. Dengan tegas aparat kemanan menangkap beberapa tokoh penting PKI seperti DN. Aidit, Karim DP maupun Supranoto dan lain sebagainya. Selain itu beberapa Anggota DPR PKI juga ditangkap aparat seperti Ir. Sukirman, Peris Pardede, Hutomo Supardan dan lain sebagainya sebanyak 15 orang. Selain itu beberapa pimpinan PKI daerah juga ditangkap aparat keamanan. Ini menunjukkan PKI tidak serius dalam menempuh jalan baru, masih menggunakan jalan lama dan tradisi lama yaitu melakukan sabotase.

Tetapi sekali lagi dengan kelihaiannya sendiri maka PKI bisa melepaskan diri dari jeratan hukum, sehingga mereka bebas kembali bahkan kemudian menuduh DI/TII yang melakaukn perampokan dan penyerbuan. Untuk sementara PKI berhenti melakukan sabotase dan kembali meneriakkan propaganda Jalan baru. PKI menyatakan akan melakukan tindakan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan agenda politiknya. Apalagi saat itu sudah mendekati Pemilu 1955 maka PKI berusaha kembali menarik simpati Masyatrakat. Bahkan secara terbuka dalam HUT PKI ke 23 pada 23 Mei 1952 di Jakarta, Sekjen CC PKI DN Aidit secara terbuka mengatakan bahwa bentuk kegiatan PKI selalu terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 1952 ini NU telah menjadi Partai sendiri setelah menyatakan keluar dari persekutuannya dengan Masyumi yang dinilai tidak adil dalam pembagian posisi baik dalam partai seperti

³⁰ Agus Sunyoto Dkk, *Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiuan*, Penerbit Grafiti, Jakarta, 1990, hal. 124.

pembagian posisi penting dalam kepengurusan, mulai dari pusat hingga daerah, malah banyak memasukkan wakil perorangan (independen). Sebagai kelompok besar NU hanya ditempatkan di Majelis Syuro, yang mengurus masalah diniyah syariah. Demikian juga pembagian posisi dalam Parlemen maupun dalam Kabinet pihak NU tidak diberi jabatan yang penting. Padahal NU banyak memiliki tokoh besar dan kontribusi NU pada Masyumi juga sangat besar.

Selain itu banyak sekali kebijakan politik Masyumi yang jauh menyimpang dengan kebijakan politik NU, baik soal dalam negeri seperti ketidaktegasannya dalam menghadapi DI/TII, dan juga politik luar negaranya yang menyimpang saat Perdana Menteri Soekiman (Masyumi) dan menteri luar negeri A. Subadjo juga Masyumi menandatangani perjanjian Pakta Keamanan Bersama dengan Amerika (MSA) 1952 yang berarti menempatkan Indonesia ke dalam blok Amerika, yang ini menodai politik netral atau bebas aktif yang ditempuh negara Indonesia. Pakta pertahanan itu gagal diratifikasi oleh Parlemen, sehingga Indonesia tidak jadi masuk menjadi anggota SEATO seperti Thailand dan Philipina. Melihat penyimpangan garis politik itu bagi NU sudah tidak ada alasan untuk bergabung dalam partai Masyumi, walaupun turut merintis dan mendirikan.

Dalam partai, kelompok NU hanya ditempatkan sebagai badan penasehat, sementara nasehat politiknya tidak pernah didengar, sehingga banyak terjadi penyimpangan kebijakan. Dalam Parlemen NU hanya diberi jatah 8 kursi, sementara dalam kabinet hanya dijatah satu menteri, itupun kalau kebetulan memberi, pernah sama sekali NU tidak mendapatkan porsi sama sekali. Karena perbedaan orientasi politik bahkan ideologi itulah kemudian NU keluar dari Masyumi dan menjadi Partai Sendiri yang diputuskan dalam Mukhtamar NU di Palembang pada Oktober 1952.

Ketika hendak memasuki Pemilu 1955 itu mulai terjadi benturan langsung antara NU dengan PKI, bermula dengan cara PKI saat mendaftarkan tanda gambarnya pada Kementerian dalam Negeri

yang menyebutkan PKI sebagai partai orang Komunis dan orang-orang tidak berpartai. Pendiri PKI itu ditentang keras oleh NU karena berusaha mengklaim kelompok lain yang belum tentu PKI. Setelah berdebat keras antara KH Idham Chalid sebagai Ketua Umum Partai NU dengan DN Aidit Sekjen CC PKI yang dimoderatori oleh Menteri Dalam Negeri R Soenarjo yang berasal dari NU itu, akhirnya PKI bisa dikalahkan. Dengan hadirnya NU ini PKI ketambahan lawan tangguh satu lagi, kalau biasanya yang dihadapi Masyumi sekarang harus berhadapan pula dengan NU.³ Tetapi dalam menghadapi NU tidak sekeras dalam menghadapi Masyumi sebagai musuh bebuyutan PKI. Apalagi NU selalu piawai dalam membawakan diri sehingga tidak menjadi target utama PKI dan partai lain.

Mengingat sejarah perjuangan PKI yang penuh dengan tindakan subversif dan penuh dengan pertumpahan darah maka dalam hal itu NU sangat tegas sikapnya dalam menghadapi PKI. Bahkan tema kampanye pemilu 1955 yang dirumuskan oleh Lajnah Pemilihan Umum NU (LAPUNU) pada Juli 1955 dengan tegas menempatkan PKI sebagai lawan politik yang harus dibendung perkembangannya. Tema Kampanye NU dalam Pemilu ialah:

1. NU hanya loyal kepada Negara Republik Indonesia yang di-Proklamasikan Oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.
2. Loyalitas NU itu dilandasi oleh semangat menggalang kerjasama Islam-Nasional agar potensi rakyat Indonesia yang mayoritas Muslimin dan Nasionalis itu tetap kompak tidak terpecah-pecah.
3. Menentang paham komunisme dan segala bentuk atheisme yang lain-lain.

³¹ Lihat, Arief Mudatsir Mandan, *Napak Tilas Perjuangan Idham Chalid*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, hal 48. Pristiwa ini juga ducatat oleh KH Saifuddin Zuhri dalam otobiografinya, *Berangkat dari Pesantren*.

4. Menjaga dan membela 6 perkara yang menjadi inti hak asasi manusia:
 - Agama
 - Keselamatan nyawa
 - Harta benda
 - Keturunan
 - Akal pikiran
 - Kehormatan
5. Hal-hal yang lain yang berhubungan dengan cita-cita Perjuangan NU.³²

Dari tema kampanye tersebut bahwa NU masih sangat curiga terhadap munculnya negara Indonesai versi lain baik versi Negara Indonesia serikat nya Van Mook, Negara Front Nasional ala FDR-PKI, atau negara Islam versi Darul Islam versi DI-TII. Prinsip itu juga yang digunakan NU dalam menghadapi pemberontakan dewan banteng maupun PRRI Permesta serta RMS. Yang lebih tegas lagi dalam poin ketiga yakni menentang paham komunisme dan segala bentuk atheisme. NU tidak ingin PKI diberi hak hidup di republik ini sebaba kalau dibiarkan akan merepotkan negara meresahkan masyarakat karena akan selalu melakukan sabotase dan akan selalu memberontak dan melakukan berbagai kekejaman di luar perikemanusiaan padahal tujuan agama adalah untuk menjunjung hak dasar manusia sebagaimana disebutkan dalam poin 4 yang disebut *kuliyatul kbmas* (lima prinsip), sebagai bentuk dari *maqashidus Syariah*.

Komunisme bertentangan dengan tujuan syariah untuk menegakkan hal dasar karena itu komunisme merupakan bagian dari *madlaorot*, sementara dalam hukum fikih ditegaskan bahwa *ad dloraru yuzalu* (bencana haraus disingkirkan) maka Komunisme

³² Sikap Politik NU ini dimuat dalam buku Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, hal., 432-433.

sebagai sumber bencana harus disingkirkan. Penyingkiran NU selain merupakan keharusan politik tetapi juga merupakan kewajiban sya'ri. Karena itu NU menolak segala macam bentuk komunisme dan atheisme. Hal itu yang mawarnai politik NU selama masa demokrasi parlementer tahun 1950-an, hingga masa Demokrasi Terpimpin tahun 1960-an. Dalam situasi krisis semacam itu KH Saifuddin Zuhri menegaskan bahwa agama merupakan unsur mutlak dalam pembangunan bangsa, dengan agama itu pulalah bisa menumpas segala bentuk ateisme, baik ateisme yang melahirkan komunisme maupaun ateisme yang melahirkan liberalisme dan fasisme.³³

Dalam pelaksanaan kampanye Pemilu yang masing-masing secara terbuka bebas menyampaikan agendanya dan terbuka bersaing untuk menarik simpati rakyat, maka PKI tidak lupa selalu mengejek lawan Politiknya. Dan melakukan berbagai monuver bahwa dirinya partai paling peduli dengan rakyat. Dalam suatu Kampanye Pemilu di Jawa Tengah Masyumi mengundang KH Isa Anshory, kehadiran juru kampanye itu disambut dengan iring-iringan mobil. Pawai yang dimaksud untuk kekuatan itu dibalik oleh PKI bahwa Masyumi partai burjuis antek kapitalis yang senang mempertontonkan kemewahan di tengah rakyat yang sengsara.

Sebagai tandingannya PKI menyelenggarakan Kampanye di lapangan yang sama dengan menyelenggarakan pawai kerakyatan. Untuk menyambut kedatangan Juru Kampanye dari CC PKI DN Aidit itu dibuat arak-arakan mobil oplet yang lusuh, untuk mengesankan PKI anti kemewahan, anti kapitalis dan paling peduli terhadap nasib rakyat. Merespon pertarungan citra itu NU juga menyelenggarakan Kampanye di lapangan yang sama juga mengundang dari PBNU. Untuk menyambut datangnya Jurkam dari PBNU itu tidak disambut dengan iringan mobil bagus atau opelet, tetapi K Idham Chalid cukup naik ojek sepeda motor,

³³ Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, Penerbit Gunung agung, Jakarta, 1987. hal, 502.

sehingga walaupun tanpa slogan tetapi menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat. Langkah taktik NU ini mampu membungkam propaganda PKI yang selalu mengklaim sebagai partai paling merakyat.³⁴ Sebagai partai kaum santri justeru NU paling dekat dengan masyarakat.

Untuk meramaikan kampanye itu masing-masing memiliki slogan dan terjadi saling perang perjuangan. Kalau PKI menciptakan lagu *Genjer-Genjer* sebagai lagu resminya, maka NU menciptakan *Shalawat Badar*. Shalawat ciptaan Kiai Ali Manshur di Banyuwangi itu menjadi lagu resmi yang dikumandangkan setiap Pengajian dan kampanye NU. Lagu itu mampu menyihir dan menggerakakan militansi pendukung NU, sekaligus menyemarakkan kampanye. Dengan sendirinya Kampanye Pemilu ini semakin mempercepat pemanasan suasana politik, dengan sendirinya semakin memperuncing keadaan.

Setelah dilaksanakan Pemilu pada 29 September 1955, hasilnya sangat mengejutkan NU sebagai partai baru lahir telah mendapatkan 45 kursi di DPR. PNI 57 kursi, Masyumi 57, sementara PKI juga memperoleh hasil yang sangat meyakinkan yakni 39 kursi. Sebagai pemenang urutan ketiga NU didukung oleh 6.955.141 orang pemilih. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dibandingkan dengan PSI yang katanya dipimpin oleh kelompok intelektual pendidikan Barat, ternyata tidak mampu membangun jaringan politik sehingga hanya memperoleh 5 kursi.

Sementara PKI dengan 39 kursi itu berarti didukung oleh 6.176.914 orang pemilih,. PKI setelah bangkit dari keterpurukannya telah mampu mengejar partai lain dan semakin mengukuhkan posisinya. Itu perolehan di tingkat nasional, tetapi di tingkat daerah ada beberapa daerah yang pemilunya dimenangkan NU, tetapi juga banyak daerah yang pemenang utamanya adalah PKI, kalapua tidak mendapatkan suaraimbang dengan NU atau dengan PNI. Bahkan dibeberapa tempat kalangan militer sebagai contoh

³⁴ Saifuddin Zuhri, *Wahab Hasbullah, Ulama Pejuang*, Penerbit Falaakhiyah, Yogyakarta, 1985, hal.,74.

di Jawa Timur, Batalyon 513 yang bermarkas di Blitar dan batalyon 511 Malang serta batalyon 512 yang juga bermarkas di Rampang Malang sebagian anggota mereka adalah simpatisan PKI. Pada pemilu 1955 perolehan suara PKI di Batalyon tersebut 80 persen³⁵, di Yogyakarta Batalyon L atau Batalyon Kentungan juga didominasi unsur PKI, demikian juga di Divisi Diponegoro di Semarang, kelompok PKI cukup mendominasi, sehingga Markas Kodam sempat diungsikan ke Wisma Puri Wedari³⁶, ini sebuah petunjuk bahwa PKI telah menguasai berbagai lini strategis.

Hasil itu sangat mencemaskan NU karena dengan menguatnya posisi PKI maka ketenteraman dalam beragama dan bernegara akan mengalami ancaman. Namun demikian NU juga memperoleh optimisme baru sebab selama bergabung dengan Masyumi dengan kontribusi yang sangat besar hanya diberi 8 kursi. Paling banter dapat satu kabinet. Sekarang berdiri sendiri malah memperoleh 45 kursi serta mendapatkan kursi kabinet antara lima hingga delapan kementerian serta 91 kursi di Majelis Konstituante.³⁷

Dari hasil Pemilu yang telah ditetapkan itu terdapat empat besar partai, berdasarkan proporsi kemenangan yang diperoleh partai maka kesemuanya berhak mendapatkan posisi yang layak duduk di kabinet, baik PNI, Masyumi, NU maupun PKI. Tetapi kelihatannya partai-partai besar dan beberapa partai kecil enggan menerima duduknya wakil PKI di kabinet. Melihat kenyataan itu Bung Karno sebagai Presiden mencoba menjembatani dengan mengundang seluruh pimpinan partai pada 21 Februari 1957 tentang perlunya membentuk kabinet yang lengkap terdiri dari partai besar yang ada dengan mengeluarkan Konsepsi Presiden

³⁵ Hermawan Sulistyono, *Palu Arit di ladang Tebu*, Penerbit Pensil, Jakarta, 2011, hal, 24-25.

³⁶ Lihat Nasution, hal 132 dan 201.

³⁷ Verslaag Mukhtar NU 1959, Jakarta, hal. 45.

tentang Kabinet Kaki Empat.³⁸ NU beserta partai politik lainnya seperti Masyumi, PSII, Partai Katolik dan lain-lain menolak terbentuknya Kabinet Kaki empat. Sementara PNI, Murba dan PKI sendiri setuju dengan Konsepsi presiden tentang kabinet Kaki empat tersebut. Ini merupakan bentuk lebih lanjut tentang kewaspadaan NU terhadap bahaya komunisme.

Sikap keras NU tersebut membuat Bung Karno Marah dan mengundang tokoh NU KH Wahab Hasbullah, KH. Zainul Arifin dan KH. Idham Chalid. Kepada mereka Bung Karno mengatakan;

Bung Karno: Kenapa (NU) menolak Kabinet kaki empat”

KH. Idham: Karena banyak kiai NU disembelih (PKI) pada waktu Peristiwa Madiun, itu belum terlupakan oleh kami”

Bung Karno: Kalau kamu belum bisa melupakan bagaimana kita bernegara”

KH. Idham: Itulah Pak, saya ini membawa bukan suara saya pribadi, tapi suara semua orang (NU).”

Bung Karno: Tuan tuan ini keras kepala betul.”

KH. Idham: Memang Pak.....Jikalau PKI ditaruh dibahu dia akan naik kepala, itu pengalaman di negaraa-negara komunis.”

Bung Karno: Itu kan di Negara lain.

KH. Idham: Buktinya Pak sewaktu di Madiun kan (PKI) sudah menimbulkan korban banyak di kalangan rakyat’

Bung Karno: Ya itu kan lain, nanti saya yang menghadapi kalau mereka berani (memberontak) lagi”.

KH. Idham: Lebih baik PKI jangan diberi angin saja. Kami punya keyakinan suatu saat PKI akan memberontak lagi....Kalau seandainya NU tidak pantas ikut di Kabinet saya dengan suka rela akan mengundurkan diri.”

Bung Karno: Tidak ini prinsip saya. Kita harus kerja di satu meja, juga harus makan bersama di meja yang sama...”.

KH. Idham: Tidak bisa Pak, .. saya hanya satu di antar sekian juta orang NU yang memutuskan tidak bisa kerjasama dengan PKI”.

³⁸ Lihat Arief Mudatsir (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, Jararta, 2008 hl.,288. Dan sasifuddin Zuhri, hal., 444.

Bung Karno: Saudara tahu saya ini bukan PKI,...saya ini orang Islam, tapi kita ini harus mengurus dunia. Ada 6 juta suara (PKI) tidak diikuti. Ini berbahaya”

KH. Idham: “... Kami berpendapat justru kalau PKI diikuti berbahaya”

Bung Karno: Itu berarti saudara kena propaganda Masyumi”³⁹

Kekhawatiran terhadap perkembangan politik serta agresivitas PKI dalam mengembangkan agendanya juga dialami oleh umat Islam yang lain karena itu pada tahun 1957 di Palembang Sumatera Selatan Umat Islam mengeluarkan statemen tentang bahaya PKI dan mengingatkan pada umat Islam agar tidak terpengaruh propaganda PKI dan menjadi pendukung PKI.⁴⁰

Setelah itu diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Majelis Konstituante pada 15 Desember 1955. Konstituante ini bertanggung jawab dalam penyusunan undang-undang dasar. Dalam Pemilu Konstituante ini mendapatkan perolehan suara yang cukup besar yaitu mendapatkan 91 kursi dari 500 kursi yang diperebutkan. Dalam sidang Konstituante ini NU juga berhadapan dengan PKI, terutama ketika merumuskan dasar negara yang dimulai dalam Sidang Pleno tahun 1958. PKI yang berpaham Marxisme Leninisme itu ternyata bersatu dengan Partai Nasionalis lain mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Hal bukannya menarik simpati melainkan malah membuat NU dan kelompok Islam lain khawatir dan curiga, karena tidak mungkin PKI bisa menerima ideologi lain selain Marxisme, sebagaimana diucapkan sendiri oleh Nyoto dalam sidang Konstituante:

“Alasan PKI menerima Pancasila sama benar dengan alasan saudara saudara Nasionalis, Protestan Katolik Hindu Bali, Animis, Perbegu, dan umat Politeis lainnya serta kaum Ateis yang tergabung dalam partai apapun, yaitu demi keutuhan Republik kita, demi persatuan dan kesatuan segenap rakyat kita yang sama nasib dan sama tujuan yaitu mengenyahkan sisa-sisa kolonialisme di tanah air kita”

³⁹ Arief Mudatsir, *Napak Tilas*, hal., 288- 289.

⁴⁰ Antob Tabah, *Kesaksian Nasution terhadap G30 S PKI*. Hal,

Pernyataan PKI yang tegas itu membuat NU semakin mewaspadaai motif PKI untuk menggunakan Pancasila sebagai alat politik untuk mengecoh lawan-lawannya. Penerimaan ini dianggap hanya sebagai taktik, karena di manapun PKI memiliki cita-cita mendirikan negara komunis berdasarkan Marxisme. Apa lagi kemudian kalangan NU menjumpai pidato Ketua CC PKI DN Aidit di luar Konstituante, yaitu ketika dihadapan kadernya sendiri ia mengatakan:

“Pancasila sekadar alat pemersatu, jika rakyat sudah bersatu, maka Pancasila tidak diperlukan lagi...Jika PKI telah berkuasa mutlak rakyat akan bisa bersatu.”

Pernyataan Aidit itu membuat NU semakin berhati-hati menghadapi tipu daya PKI terhadap Pancasila itu. Sikap itu dipertegas lagi oleh pernyataan yang disampaikan oleh Nyoto bahwa:

“Partai Komunis Indonesia sebenarnya nmenganggap lebih bijaksana apabila rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diganti dengan Kemerdekaan Beragama.”⁴¹

Pernyataan itu semakin menjelaskan bahwa penerimaan PKI terhadap Pancasila itu bukan untuk mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi sebagai langkah untuk mengubah sila-sila dalam Pancasila agar sesuai dengan prinsip Komunisme. Untuk menyelamatkan Pancasila dari rongrongan dan manipulasi PKI itu maka dalam Rapat PBNU 20 Februari 1959 memutuskan perlunya penegasan Pancasila yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam,⁴² bukan Pancasila ala Marxisme. Sikap NU itu kemudian di disampaikan KH Saifuddin Zuhri dalam sidang Konstituante, yang banyak mendapat simpati dari berbagai kalangan. Dalam memahami Pancasila NU bersikap prinsipil, Pancasila sebagai landasan berpikir sebagai falsafah hidup dan sekaligus merupakan tujuan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Pandangan NU

⁴¹ Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, hal, 450

⁴² Lihat , *Verslag Muktamar NU XX*, Jakarta, 1959, hal., 108.

tentang Pancasila sangat substansialis, bukan pandangan yang instrumentalis seperti PKI atau beberapa partai lainnya yang menempatkan Pancasila hanya sebagai alat yang bisa dibuang kapan saja setelah dianggap tidak berguna.

Setelah dibubarkannya Masjumi dan PSI oleh pemerintah karena melakukan pemberontakan PRRI Permesta, maka posisi PKI semakin kuat. Tentu hal itu sangat menguntungkan PKI karena salah satu musuh utamanya telah tumbang. Dengan demikian peta politik telah bergeser, musuh PKI tinggal satu yaitu NU ini sangat menguntungkan PKI. Sebaliknya hal itu sangat mengkhawatirkan NU, karena akhirnya NU sendirian menghadapi PKI, paling hanya didukung beberapa partai kecil seperti PSII dan Perti. Kondisi ini membuat peluang dan posisi dalam pemerintahan juga cukup kuat. Dalam Pembentukan Kabinet Kerja II 1962 mengangkat Aidit sebagai Wakil Ketua MPRS dan Lukman sebagai Wakil Ketua DPR-GR dengan kedudukan sebagai Menteri. Begitu juga dalam Kabinet Kerja IV tokoh PKI Nyoto ditunjuk sebagai Menteri Negara. Dengan demikian masuknya PKI ke dalam kabinet sudah tidak terbendung lagi.

Dengan posisinya yang strategis baik dalam dewan eksekutif maupun legislatif itu posisi PKI semakin kuat, belum lagi di lingkungan TNI Polisi dan Birokrasi. Selain itu juga di kalangan petani, buruh, Guru, seniman, dan lain sebagainya betul-betul digunakan sebagai sarana revolusi. Belum lagi di berbagai daerah PKI mendapatkan suara besar bahkan mayoritas, sehingga dengan sendirinya posisi pimpinan daerah dipegang oleh PKI. Di Trenggalek Mislanja dalam Pemilu sela 1957 perolehan kursi PKI sama dengan PNI yaitu 10 sementara NU hanya mendapatkan 6 kursi⁴³. Di Banyuwangi suara PKI juga mayoritas sehingga berhasil memenangkan kadernya yaitu Suwarno Kanapi, SH.,

⁴³ Abdul Hamid Wilis, *Aku Menjadi Komandan Banser*, hal., 221.

sebagai Bupati Banyuwangi.⁴⁴ Semnataranya itu di Blitar Kader PKI Sumarsono menjadi Bupati.⁴⁵ Dalam pemilu ini PKI telah memperoleh kekuatan yang sangat berarti dengan menduduki berbagai kekuasaan eksekutif di daerah, sehingga dengan mudah menjalankan agendanya, baik dalam merebut aset-aset Negara maupun mempengaruhi ideologi rakyat.

Untuk merayakan semua kemenangan itu CC PKI menyelenggarakan hari ulang tahun (Ulah) ke -45 di Jakarta pada 23 Mei 1965 di Gedung Olah Raga Bung Karno Senayan yang dihadiri sekitar 150 ribu pendukungnya. Dalam kesempatan itulah Aidit kembali menggerakkan pasukannya untuk segera menhhabisi *tujuh setan desa*, dan untuk segera mengganyang *tiga setan kota*, dan menyerukan segera dibentuk Kabinet Gorong Royong yang berporoskan Nasakom, di situ pula dia menuntut segera dibentuk Angkatan kelima.⁴⁶ Seruan Aidit tersebut disambut gegap gempita oleh anggota dan simaptisannya dan dilaksanakan dalam bentuk nyata baik di pusat maupun di daerah, sehingga situasi politik semakin panas. Keresahan umum muncul di berbagai tempat akibat gerakan PKI yang mulai mengganggu ketenteraman masyarakat dengan berbagai teror dan agitasinya.

Perkembangan PKI semakin pesat sehingga Ketua badan Intelijen Pusat (BPI) yang menjadi simpatisan dan pendukung PKI Dr Subandrio memastikan bahwa;

PKI berkekuatan sekitar tiga juta anggota. Itu didukung oleh sekitar 17 juta anggota organisasi underbouw PKI seperti BTI, Sobsi dan Gerwani. Dengan jumlah itu PKI merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet.

⁴⁴ Agus Sunyoto, *Banser jihad Melawan PKI*, Yayasan Peta Tulungagung, 1999. hal. 77.

⁴⁵ Ibid, hal. 112.

⁴⁶ Arif Mudatsir, (ed), *Napak Tilas*, hal., 45.

PKI adalah partai besar, tentu memiliki ambisi politik tertentu, bahkan beberapa tokoh PKI masuk kabinet, banyak juga di ABRI, sebab saat itu PKI partai legal. Jadi wajar kalau tokohnya duduk di kabinet dan ABRI.

Jangan lupa PKI memiliki masa yang sangat besar sehingga tidak dapat ditumpas begitu saja tanpa taktik yang canggih.”⁴⁷

Dari situlah kemudian Subandrio berkesimpulan bahwa hanya ada tiga kekuatan yang mendominasi politik Indonesia yaitu pertama, Unsur Kekuatan Presiden RI, kedua, Unsur kekuatan TNI AD, ketiga Unsur kekuatan PKI. Dengan kekuatan besar lebih dari 20 juta orang itulah PKI semakin percaya diri, sehingga makin berani melakukan berbagai provokasi dan terror terhadap lawan politiknya, terutama kelompok Islam yang dianggap bagian dari setan kota dan setan desa.

Dari besarnya jumlah anggota PKI itu semua bisa membayangkan betapa dominannya PKI, sehingga diperkirakan dapat memerahkan Indonesia dalam sekejap. Kebesaran PKI itu digambarkan oleh Subandrio sebagai berikut:

“Betapa negeri membayangkan PKI dengan tiga juta anggota didukung 17 juta anggota organissi underbouwnya berperang melawan tentara yang hanya ratusan ribu.”⁴⁸

Dengan jumlah sebesar itu pada tahun 1965 dalam hitungan di atas kertas PKI bisa menggulung lawannya TNI yang hanya sekitar 300 ribu personel, itupun sebagian telah menjadi anggota PKI. Demikian juga musuh PKI yang lain yaitu NU yang jumlahnya hanya sekitar delapan juta. Tetapi kalaupun NU dengan penuh keberanian terus melakukan perlawanan terhadap PKI baik di pusat hingga ke daerah.

F. Penghinaan pada Agama

⁴⁷ Subandrio, *Kesaksianku Tentang G-30-S*, terbitan terbatas, Jakarta, 2000, hal. 4 dan hal. 27.

⁴⁸ *Ibid*, hal, 115.

Marxisme lahir dari gua garba filsafat Barat yang memiliki pandangan positivistik dengan prinsip bahwa hakekat yang ada adalah materi, tidak ada roh dan tidak ada kehidupan sesudah mati, karena itu Marxisme melihat agama secara filosofis hanyalah khayalan dan secara sosial sebagai candu. Hal itu tentu berbeda dengan pandangan kaum agama manapun, bahwa dunia tidak hanya materi percaya adanya roh dan percaya adanya Tuhan, dan agama hadir untuk memberikan petunjuk dan tuntunan terhadap kehidupan sosial dan kerohanian. Perbedaan kepercayaan itu setelah Marxisme menjelma menjadi komunisme dan di Indonesia komunisme mengejawantah dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terstruktur, maka perbedaan prinsip itu di masyarakat menjadi benturan keras. Kaum beragama merasa berkewajiban memperkuat agama, sementara PKI berkewajiban mengikis habis segala bentuk kepercayaan agama. Dengan segala cara PKI menghina agama yang dianggap suci, serta merendahkan martabat tokoh agama yang menjadi anutan masyarakat.

Sunan Ampel bapak para Walisongo yang dihormati umat Islam se Jawa bahkan se Nusantara mendirikan sebuah masjid di kawasan Kembangkuning persis di jantung kota Surabaya. Masjid tersebut dirawat dikeramatkan oleh umat Islam di Jawa hingga kini, masjid tersebut digunakan sebagai pusat dakwah Islam dan aktivitas keagamaan lainnya. Sejak Pemilu 1955 posisi PKI Surabaya yang semakin menguat apalagi didukung sebagian aparat tentara. Dengan kekuatan yang ada itu, maka pada tahun 1962 gerombolan Pemuda Rakyat di dukung kawanan Gerwani yang garang menyerbu Masjid keramat tersebut. Tempat suci itu diinjak-injak sambil menyanyi dan menari-nari menyanyikan lagu genjer-genjer. Bahkan mereka bermaksud mengubah masjid tersebut menjadi markas Gerwani.

Bagi Kader NU terutama Ansor dan umat Islam Surabaya pada umumnya tidak ada pilihan lain menghadapi PKI yang sudah berani menodai masjid yang suci dan dikeramatkan tersebut kecuali jihad. Maka terjadilah benturan dua kekuatan sosial itu, tetapi karena jumlah pasukan NU lebih banyak akhirnya

gerombolan PKI bisa diringkus dan diseret ke pengadilan.⁴ Peristiwa itu segera menjadi pembicaraan yang meluas di kalangan umat Islam sehingga semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan PKI yang posisinya sangat kuat, beberapa aparat militer bahkan Bupati di kawasan Jawa Timur seperti Blitar, Trenggalek dan banyuwangi telah direbut oleh PKI. Demikian juga birokrasi pemerintahan makin banyak disusupi PKI.

Peristiwa tragis berikutnya menimpa seorang muballigh Kondang KH Djufri Marzuqi di Pamekasan Madura 27 Juli 1965, Kiai kharismatik itu ketika hendak memberikan ceramah dalam pengajian umum ditikam oleh Anggota PKI saat dalam perjalanan menuju tempat Pengajian. Tentu saja pembunuhan kiai itu menyulut kemarahan masyarakat Madura dan Jawa timur pada umumnya. Bahkan saat peringatan 40 hari wafatnya, KH Idham Cholid Ketua Umum PBNU datang dari Jakarta untuk memberikan rasa simpati dan sekaligus memberikan gelar tokoh ini sebagai *Syahidul Kabir* (Syuhada Agung). Kehadiran Idham Cholid itu mereka baca sebagai bentuk memberikan semangat untuk melakukan perlawanan. Dan kehadiran yang diliput media itu menjadikan kasus Madura ini sebagai isu Nasional.⁵⁰

Penodaan agama juga terjadi di Malang 1965 saat Karim DP, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berideologi PKI itu memeberikan ceramah di hadapan pimpinn PKI Malang mengatakan kaum beragama terutama Kiai adalah termasuk kelompok burjuis feodal, musuk golongan proletar, karena itu PKI akan selalau berhadapan dengan kelompok agama, terutama para kiai. Ketika kelompok Pemuda Ansor Malang mendengar pidato Karim DP yang menjelekkan kiai sebagai kelompok feodal burjuis yang harus diganyang itu lasung menyerbu pertemuan PKI tersebut dan berusaha menemui Karim DP, tetapi usaha GP

⁴⁹ KH Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, hal., 509.

⁵⁰ Abdul Hamid Wilis, *Aku Menjadi Komandan Banser*, hal. 58.

Ansor tersebut dihadang oleh Pemuda Rakyat PKI, maka terjadilah perkelahian antar pemuda NU dan pemuda PKI.⁵¹

Untuk memperkuat perjuangannya itu PKI semakin mengaktifkan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) sebagai ujung tombak perjuangan. Lekra berhasil menguasai berbagai kesenian rakyat seperti Ludruk, Ketoprak, Reyog dan sebagainya. Sekita 15 Januari 1965 Ludruk Lekra membuat pementasan di Prambon dengan lakon *Gusti Allah Dadi Manten* (Allah Menjadi Pengantin). Pementasan yang menghina agama Islam tersebut langsung digerebek oleh pasukan Banser sehingga pertunjukan itu bubar dan pemainnya dihajar oleh Banser.⁵²

Rupanya Lekra di tempat lain juga melakukan hal yang sama seperti Kecamatan Kampak Trenggalek Jawa Timur mereka menyelenggarakan pertunjukan tayuban di halaman masjid pada hari Jum'at. Mereka ini sudah tidak bisa diperingatkan, bahkan saat mau dilaksanakan sembahyang Jum'at pertunjukan terus dijalankan dengan dihadiri penuh oleh penonton yang memenuhi halaman masjid, maka akhirnya terpaksa kelompok Islam mengalah dan terpaksa menyeleenggarakan sembahyang Jum'at di masjid lain. Hal itu membuat kalangan umat Islam khususnya NU sangat prihatin karena tidak lagi bebas menjalankan ibadah.⁵³

Setelah itu mereka mementaskan ketoprak dengan lakon *Rabine Gisti Allah* (Perkawinan Gusti Allah) di Kecamatan Kampak. Rupanya pihak NU terutama Pemuda Ansor tidak tinggal diam, terus mengadakan penyelidikan ke tempat pertunjukan. Ketika pementasan sedang berjalan sekelompok Pemuda Ansor yang sudah lama mengintai lakon yang melecehkan kesucian Tuhan tersebut segera melakukan penyergapan. Kelompok Pemuda Rakyat melindungi mereka akhirnya terjadi perkelahian, walaupun

⁵¹ Agus Sunyoto, *Banser jihad Melawan PKI*, hal. 68.

⁵² Ibid, hal. 80.

⁵³ Abdul Hamid Wilis, *Aku Menjadi Komandan Banser*, hal. 158.

akhirnya semua pemain ketoprak dan pimpinannya diringkus kemudian diadili dan dihukum penjara, karena pertunjukan itu dianggap menodai agama dan mengundang kerusuhan.⁵⁴

Penghinaan terhadap agama ini juga terjadi di Kecamatan Mojo Kediri sekitar tahun 1965, selain menggelar pertunjukan ketoprak dengan lakon *Gusti Allah Mantu*, juga menggelar lakon *Kiai Barbum*, yang mengisahkan seorang kiai pesantren yang suka mabuk, selalu sibuk bermain judi dan sekaligus berwatak culas sehingga sering membuat keributan dengan tetangga. Pertunjukan itu tidak diserang langsung tetapi hanya dilempar serpihan genting yang sudah diberi mantera oleh Kiai Zazuki. Keajaiban terjadi, tiba-tiba muncul badai besar yang meporak-porandakan panggung dengan segala peralatannya sehingga pertunjukan tidak jadi dilangsungkan. Sementara itu ketika lakon *Gusti Allah Mantu* dipentaskan di kecamatan Papar, Kediri, oleh para Banser tidak disergap, tetapi minta bantuan seorang kiai, lalu *disirep*, hingga semua pemainnya tertidur lelap saat itulah banser melakukan penyerbuan tanpa perlawanan dan pemain yang terlibat dieksekusi.⁵⁵

Di Kecamatan Pogalan Trenggalek, Lekra kembali menyelenggarakan pentas kesenian Langen Tayub persis disebelah masjid kecamatan selama dua hari dua malam tanpa henti. Karuan saja pertunjukan itu mengganggu aktivitas masjid terutama saat melaksanakan sembahyang, lalu diadakan kompromi, pertunjukan berhenti sejenak saat sembahyang lima waktu. Tetapi kesepakatan itu tidak dipatuhi PKI, namun untuk menjaga perdamaian pihak Ansor tidak mengusir mereka dari halaman masjid. Akhirnya pihak GP Ansor hanya berjaga di serambi masjid agar para simpatisan PKI tidak masuk dan merusak masjid.⁵⁶

⁵⁴ Ibid, hal. 157.

⁵⁵ Lihat catatan Makrufin, dalam Hermawan Sulistyono, hal., 352-353.

⁵⁶ Abdul Hamid Wilis, *Aku Menjadi Komandan Banser*, hal. 158.

Lain lagi dengan provokasi yang dilakukan oleh Lekra-PKI Kediri, mereka menyelenggarakan pertunjukan wayang di berbagai tempat. Sang dalang KI Jamadi seringkali mengangkat lakon yang menghina agama. Melihat terjadinya penghinaan agama itu, dalam sebuah penyergapan yang dilakuakn Ansor ke desa Kencong rumah KI Djamadi dibakar, selain itu kantor Kecamatan Kepung yang dikuasai PKI direbut kembali oleh Ansor dan diserahkan pada pemerintah. Dalam melakukan serbuan ini Ansor bekerjasama dengan pemuda PNI.⁵⁷

Menyerang agama rupanya telah menjadi naluri bahkan tugas utama para aktivis PKI, sehingga pada suatu ketika PKI Kecamatan Turen Malang yang dipimpin oleh Kusnan dan Niam seorang Ketua Pemuda Rakyat setempat yang terkenal sakti itu mengnginjak Qur'an dengan mengatakan bahwa Qur'an bukan kitab suci hanya buku yang berisi kebohongan, seraya menantang kelompok Muslim. Akhirnya Ketua Banser Turen Bernama Samad menantang Niam berkelahi akhirnya dalam perkelahian itu Niam mati terbunuh.⁵⁸ Peristiwa ini membuat kelompok PKI Turen ketakutan dan menahan diri tidak melakukan penghinaan terhadap kiai NU yang bisa mengundang kemarahan Ansor.

Walaupun setelah protes dan penggrebekan dilakukan Ansor NU berbagai lakon Ludruk dan ketoprak yang menghina agama dibubarkan, tetapi PKI di daerah lain tetap mementaskannya. Pada bulan Juli 1965 di Dampit Malang selatan ada kabar ludruk Lekra hendak mementaskan lakon *Rabine Maikat* (Malaikan Menikah). Setelah dibicarakan oleh pimpinan Ansor diadakan penyelidikan ke tempat pertunjukan, khawatir semuanya ini hanya isu yang sengaja dilontarkan PKI untuk menjebak Ansor. Setelah pertunjukan diintai ternyata lakon tersebut benar-benar dipentaskan. Saat itu juga Ansor yang sudah menyamar sebagai penonton dan sebagian bersembunyi di belakang panggung

⁵⁷ Agus Sunyoto, *Banser jihad Melawan PKI*, hal. 85.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 87.

melompat ke atas panggung dan menangkap semua pemainnya sehingga terjadi keributan, bahkan pimpinannya dipukuli oleh Ansor. Karena Ansor bisa menguasai keadaan lalu pertunjukan dibubarkan.⁵⁹

Pertunjukan yang menghina agama semacam itu juga terjadi di Pati, Kudus dan sebagainya, di kota-kota tersebut dipentaskan ketoprak dengan lakon *Gusti Allah Bingung*. Tentu hal itu memancing kemarahan kelompok santri. Perkelahian antar kedua kelompok PKI dan santri selalu terjadi di arena pertunjukan seperti itu yang berujung pada pembubaran acara, karena penonton panik dan pemain juga ketakutan.

Berbagai penistaan, penghinaan, serta serangan terhadap agama, baik ajarannya, kitab-kitabnya, pimpinannya serta para pemeluk agama itu membuat kebencian kalangan agama terhadap komunis semakin menjadi-jadi sehingga menempatkannya sebagai musuh agama dan juga musuh negara. Karena itu kelompok agama terutama kalangan santri pesantren NU dan seluruh jaringan NU menempatkan PKI sebagai musuh yang harus dihadapi.

G. Aksi Penyerobotan Tanah.

Kelambanan pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undanag Pokok Agraria (UUPA) yang sudah disahkan pada tahun 1960-an itu disayangkan oleh semua partai termasuk NU, tetapi yang dilakukan sebatas mendorong pemerintah agar segera melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Sementara itu PKI menggunakan kesempatan tersebut untuk menjalankan agendanya sendiri untuk mencari simpati di masyarakat. Dengan motif semacam itu, kemudian PKI melakukan aksi sepihak, dengan dalih melaksanakan Landreform seperti yang diamatkan UUPA itu mereka menjanjikan rakyat untuk mendapatkan tanah.

Tidak hanya mematok tanah milik negara, tetapi tanah milik rakyat yang dianggap melebihi batas yang ditentukan, bahkan setiap tanah yang dikehendaki dipatok dan dibagi bagi pada

⁵⁹ Ibid, hal. 88.

rakyat. Semangat PKI BTI dalam melakukan landreform ini semakin berkobar setelah salah seorang pimpinan PKI yaitu Nyoto diangkat sebagai Menteri Urusan Landreform. Tentu saja posisi seperti itu tidak disia-siakan PKI dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengembangkan agenda PKI menipu rakyat untuk merebut kekuasaan.

Kalangan PKI yang sudah masuk ke sektor birokrasi, sektor perkebunan dengan mudah bisa mengidentifikasi berbagai tanah yang bisa dibagi-bagi, termasuk tanah yang dimiliki oleh pada kiai dan pimpinan partai baik NU, PNI serta Masyumi. Memasuki tahun 1964 PKI Kediri dengan gencar menduduki berbagai tanah negara, karena langkah tersebut didukung oleh beberapa oknum pemerintah segera berjalan lancar. Dalam waktu singkat bisa menguasai 9000 hentar tanah negara. Tetapi ketika PKI mulai mengerahkan massanya untuk menjarah tanah milik H Samur, PKI mulai mendapat halangan, dengan berani ia mencabuti patok beserta tanaman yang sudah digarap oleh PKI. Tetapi PKI mematok tanah itu lagi dan menanaminya dengan tanaman baru. Melihat kenekadan PKI itu H. Saimur meminta Bantuan GP Ansor, lalu oleh Ansor tanah itu di tancapi bendera NU dengan sesumbar kalau PKI berani mencabuti bendera NU itu maka Ansor akan menyerang PKI. Mendengar ancaman itu PKI tidak berani lagi menjarah tanah warga NU tersebut.

PKI tidak berhenti membuat provokasi dan membiarkan suasana tenang, tetapi kali ini kena batunya, perkebunan tebu milik H. Abu Sudjak seorang Rais Syuriah PCNU Kabupaten Kediri. Tanaman tebu seluas tiga hektar itu ditebang PKI BTI dan langsung dijual ke pabrik gula Ngadireja. Karena pemilik tanah itu sudah kenal dengan pimpinan pabrik, maka tebu yang dijual PKI itu uangnya diambil Abu Sudjak. Tentu saja PKI sangat marah, merasa terkecoh. PKI tidak habis akal kemudian memagari lahan tebu yang masih tersisa dan mengklaim sebagai lahan BTI. Ketika merasa pemimpinnya diganggu maka dengan spontan para pimpinan Ansor bahkan para pendekar merasa tersinggung. Akhirnya semuanya berangkat merobohkan dan mencabuti pagar

lahan yang dibuat oleh BTI, lalu ditancapi bendera Ansor. Karena jumlah mereka sedikit, sementara jumlah Ansor lebih banyak maka mereka lari meninggalkan ladang tebu yang mereka kuasai.⁶⁰

Ansor tidak hanya menjadi penolong bagi warga NU tetapi juga kelompok lain yang membutuhkan terutamna yang mendapat ancaman PKI beserta organisasi nevennya yang beraneka ragam itu. Suatu hari 14 Februari 1965 PKI menyerang Sudarno seorang anggota PNI yang sedang menggarap tanahnya. Tanah itu diduduki 100 orang BTI dan saat itu juga Sudarno dianiaya mereka karena tidak mau meninggalkan tanahnya. Kepala desa yang hendak melerai mereka malah dianiaya oleh gerombolan PKI itu hingga pingsang. Akhirnya Sudarno meminta bantuan pada pimpinan Ansor Kediri. Saat itu pula Ansor menurunkan pasukan Banser bersenjata lengkap untuk merebut kembali tanah Sudarno, setelah terjadi percekocokan dan perkelahian akhirnyan BTI bisa diusir. Beberapa pimpinanya ditangkap lalu diserahkan ke kantor polisi. Karena tindakannya itu mereka dihukum selama 4 tahun. Mulai saat itu Sudarno bisa menggarap tanahnya kembali.⁶¹

Lain halnya dengan yang terjadi di Trenggalek di mana PKI sangat dominan dan meemgang tampuk kekuasaan, pelaksanaan Landreform ini lebih semena-mena pertama dengan membuat ketetapan baru, yaitu: *Pertama*, pembagian hasil antara pemilik sawah dengan penggarap tidak lagi menurut tradisi, tetapi penggarap berhak mengambil separuh.

Kedua, menggarap tanah orang lain yang melebihi ketentuan undang-undang; *Ketiga*, membuka hutan untuk ditanami tanpa harus seijin mandor atau Mantri hutan.⁶²

⁶⁰ Ibid, hal. 66.

⁶¹ Ibid, hal. 82.

⁶² Abdul Hamid Wilis, *Aku Menjadi Komandan Banser*, hal. 165-166.

Perubahan seluruh tradisi garap-menggaarap sawah yang ada sehingga aturan jadi kacau balau, selain itu juga memicu konflik antara penggarap dengan pemilik lahan, sehingga kerukunan berubah menjadi pertikaian. Pada suatu hari BTI mengundang para pimpinan partai serta pejabat kabupaten kecamatan setempat. Ketika tiba di tengah sawah para pejabat dan pimpinan partai itu dikepung oleh kawan PKI BTI, kemudian dipaksa untuk menandatangani surat ijin pengagaran hutan pemerintah. Melihat kejadian itu Ketua Ansor Trenggalek mengerahkan Banser untuk melindungi para pimpinan tersebut. tetapi di tengah jalan Ansor ditemui polisi agar segera kembali karena persoalannya akan ditangani polisi sendiri. Akhirnya BTI juga mundur sendiri ketika melihat aparat kepolisian dan Ansor siap mengepung mereka.⁶³

Terjadinya konflik antara Ansor dengan pihak PKI yaitu BTI dan Pemuda rakyat di Kediri dan Jawa Timur pada umumnya itu telah sampai kepusat pemerintahan di Jakarta sehingga suatu ketika KH Idham Chalid dalam sidang Kabinet dilaporkan Aidit kepada Presiden bahwa Ansor di Kediri menghambat pelaksanaan landreform, menjadi musuh rakyat dan musuh petani dan bertindak kontrarevolusi. bahkan DN Aidit kemudian mengusulkan agar GP Ansor dibubarkan. Dalam kesempatan itu KH Idham Chalid menjelaskan duduk persoalannya, bahwa selama ini BTI melakukan aksi sepihak yang dengan tidak sah menduduki tanah orang lain, rakyat bersama Pemuda Ansor hanya melawan karena mempertahankan haknya. Kemudian di hadapan Presiden dan Aidit, Idham Chalid yang dikenal lembut itu dengan tegas mengatakan;

“Kalau Ansor ditampar oleh BTI maka haram hukumnya bagi saya untuk melarang membalasnya. Ansor tidak bisa dibubarkan justeru BTI yang harus dibubarkan, karena aksi sepihak melanggar hukum”⁶⁴

⁶³ Ibid, hal. 168.

⁶⁴ Ibid., hal 186.

Mendengar keterangan NU yang tegas itu Aidit terdiam dan Presiden memahami duduk persoalannya. Kemampuan NU memberikan argumen itu tentu mendapat apresiasi dari partai-partai yang lain yang selama ini takut menghadapi PKI dan tidak berani tegas dihadapan Presiden. Bahkan setelah itu secara demonstratif pada tahun 1964 KH Idham Chalid kemudian datang ke Blitar dan Kediri tempat terjadinya berbagai konflik agraria, untuk mendeklarasikan berdirinya Baruisan Ansor Serba Guna (Banser) guna melindungi ulama dan menghadapi berbagai provokasi PKI. Bahkan setelah itu para pimpinan Banser Kediri dipanggil ke Jakarta dan dengan didampingi PP GP Ansor serta pimpinan PBNU menemui Ketua Badan Pusat Intelijen (BPI) yang diketua Soebandrio, yang mengingatkan agar Ansor ikut menjaga ketenangan tidak terlalu agresif dalam menghadapi PKI. Dengan tegas Subandrio mengingatkan:

“Di bidang intelijen saudara-saudara kalah dengan PKI. Orang PKI tahu dimana saudara sekarang sedang berada. Bahkan tahu dimana Pak Idham Chalid dan tokoh-tokoh lainnya berada. Tetapi saudara dan tokoh NU tidak tahu di mana DN Aiidit berada. Saudara harus mengerti hal ini.”⁶⁵

Tidak lama setelah itu segerombolan Pemuda Rakyat BTI serta Gerwani menduduki tanah milik Muslimat yang ada di tengah Surabaya. Tanah milik Muslimat NU itu langsung dipagari dan dipasang pendera PKI, Gerwani dan neven PKI lainnya. Keberanian PKI ini tumbuh karena Wali Kota Surabayaa saat itu Dr. Satrio adalah pilihan PKI sehingga menjadi pembela PKI yang gigih⁶⁶. Tetapi Pemuda Ansor tidak takut dengan Wali Kota dan PKI, lalu bendera itu dicabuti oleh Ansor diganti dengan bendera NU. Besoknya PKI sudah mencabuti bendera NU dan memasanga lagi bendera PKI. Ansor Jawa Timur khususnya Surabaya di gerakkan oleh PP GP Ansor antara lain Kiai Yusuf Hasyim dan H Chalid Mawardi untuk merebut kembali tanah

⁶⁵ Ibid., hal.,187.

⁶⁶ Chairul Anam, *Gerak Langkah Pemuda Ansor*, Aula, Surabaya, 1990, hal. 97.

Muslimat tersebut. Akhirnya dengan mengobarkan semangat jihad dikerahkan umat Islam se kota Surabaya untuk merebut kembali tanah tersebut yang sudah dijaga ketat oleh PKI, sehingga terjadi bentrokan keras. Banyak anggota PKI terluka dan yang lainnya maelarikan diri, sehingga tidak berani menduduki tanah Muslimat NU itu kembali. Tanah ini kemudian didirikan sekolah dan Rumah Sakit Islam Surabaya milik NU.

Kejadian itu rupanya dilaporkan PKI Jawa Timur pada CC PKI di Jakarta, sehingga tidak lama kemudian Kiai Yusuf Hasyim dan H Chalid Mawardi selaku Pimpinan Pusat Ansor dipanggil oleh Ketua BPI dan sekaligus Wakil Perdana Menteri Dr. Subandrio. Chalid Mawardi dan Yusuf Hasyim langsung dimarahi karena dituduh membuat keributan dengan Pemuda Rakyat. Lalu menyarankan Ansor agar menyerahkan tanah itu kembali pada PKI. Dengan tegas Chalid Mawardi mengatakan;

” Bukan kami Pak yang membuat keributan, tetapi orang-orang PKI yaitu BTI dan Pemuda Rakyat, mereka yang menduduki tanah kami. Kami juga tidak akan menyerahkan tanah itu pada PKI, karena tanah ini jelas-jelas milik Muslimat NU, maka harus tetap menjadi milik Musimat, dan Ansor akan siap mempertahankan tanah itu sampai kapanpun, tidak akan membiarkan tanah tersebut direbut PKI.”⁶⁷

Karena Ansor tetap teguh dalam pendiriannya akhirnya Subandrio tidak lagi memaksakan kehendaknya menuruti permintaan PKI. Ini menunjukkan bahwa PKI di bawah sudah kesulitan menghadapi Ansor, sehingga perlu menggunakan kekuasaan di Pusat baik dari kalangan CC PKI sendiri kalangan pemerintahan, kepada para menteri, pada kepala Intelijen bahkan pada presiden sendiri. Di sisi lain peristiwa ini menunjukkan bahwa PKI telah berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah dari jenjang yang paling bawah hingga paling tinggi.

Dukungan Subandrio semacam itu bernilai sangat penting bagi PKI, karena dia merupakan orang terpenting kedua setelah Bung Karno, mengingat jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri,

⁶⁷ Wawancara dengan Drs. H. Chalid Mawardi, Jakarta 26 Agustus 2013.

sekaligus Menteri Luar Negeri dan Ketua Badan Pusat Intelijen (BPI). Karena rasa simpatinya yang begitu tinggi pada PKI maka kalangan NU terutama KH Idham Chalid dalam otobiografinya, menggolongkan Subandrio itu sebagai PKI⁶⁸. Padahal Subandrio menolak digolongkan sebagai PKI, dia mengaku sebagai aktivis PSI.

“Saya menyalurkan hobi diskusi saat mahasiswa, saya masuk PSI. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, pada tahun 1940 saya sudah menjadi Wakil ketua PSI”⁶⁹.

Tetapi rupanya kalangan NU tidak mau melihat alasan semacam itu, yang jelas Subandrio selama berkuasa selalu membela dan melindungi dan meng-anakemas-kan PKI, maka secara politik NU menggolongkan Subandrio sebagai PKI dan disikapi sebagai PKI.

H. Awal Provokasi PKI Bali 1965

Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu, mereka memiliki fanatisme yang tinggi terhadap Presiden Pertama RI Soekarno yang dianggap memiliki darah Bali. Karena itu mereka juga memiliki ikatan yang kuat dengan partai politik yang didirikan Proklamator itu, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Masyarakat Bali masih semi feodal di situ terdapat banyak puri (keraton) dan banyak pula para brahmana yang berada di berbagai pura. Selebihnya adalah masyarakat biasa. Komposisi penduduk yang feoalistik ini dengan sendirinya menjadi ajang kampanye yang empuk bagi PKI yang memperjuangkan persamaan kelas.

Propaganda PKI ini sangat mengena di masyarakat yang merasa didiskriminasi oleh sistem keraton dan agama, sehingga mereka banyak yang masuk dalam barisan PKI. Bahkan beberapa di antara keluarga Puri yang menjadi anggota PKI, padahal partai ini berjuang melawan segala bentuk kraton. Kelompok ini dalam

⁶⁸ Lihat, Idham Chalid, hal 335.

⁶⁹ Subandrio, *Kesaksianku tentang G-30-S*, hal., 119.

kenyataannya banyak benturan dengan kelompok PNI yang dianggap sebagai pendukung feodal.

Hubungan NU dengan PNI yang di Jawa biasanya sangat dekat tetapi di Bali lain halnya, hal itu karena Jam'iyatul Muslimin (Jamus) PNI sejak tahun 1960 dipegang oleh Habib Abdul Qadir, seorang Muhammadiyah bekas aktivis Partai Masyumi yang sudah dibubarkan. Jamus banyak mengecam perilaku NU sehingga hubungan NU dengan Jamus dan dengan Masyumi renggang. Sementara PKI tidak pernah secara terang-terangan memusuhi NU, karena NU bukan target utama mereka.

Komposisi masyarakat Bali khususnya yang ada di Negara, Kabupaten Jembrana secara politik pertama adalah PNI yang anggotanya ditaksir 15.000 orang. Sementara PKI berjumlah sekitar 12.000 orang anggota aktif, sedangkan kekuatan NU diperkirakan hanya 1000 orang. Persaingan PNI -PKI menjadi sangat berimbang kekuatan NU justeru sebagai penyeimbang. Di desa Loloan Jawa misalnya terjadi upaya mengkomunikasikan struktur Desa. Kepala desa di desa itu dipegang oleh Asy'ari seorang PKI asal Madura, karena itulah lembaga adat yaitu Rukun Kipayah Desa (RKD) yang beraktivitas sekitar masalah sosial terutama dalam mengurus masalah keselamatan desa termasuk pengurusan kematian, mulai diambil alih oleh PKI. Walaupun kegiatan keagamaan tetap boleh berjalan, tetapi aktivitas lain dibatasi dan diarahkan untuk kegiatan PKI, karena itulah kemudian para aktivis NU mendirikan Rukun Kifayah Ansor (RKA) agar berbagai kegiatan keagamaan bisa dijalankan secara utuh tanpa diintervensi kelompok PKI.

Ketegangan memang terjadi hanya di kalangan pengurus, tetapi di level masyarakat hingga tahun 1964 masih kelihatan cukup menyatu. Selain itu juga banyak orang Islam yang tidak bisa membedakan antara NU, PNI dan PKI semuanya dianggap sama, sehingga antara anggota partai bergaul secara ketentangaan sebagaimana sebelumnya. Justeru dengan pergaulan yang serba terbuka dan saling percaya itulah berbagai rencana PKI diketahui oleh warga dan pimpinan NU.

KH Habib Abdul Qadir memiliki seorang pembantu pekerja kasar, sebagai seorang Hindu Bali maka mereka menghormati sanga Kiai dengan sangat tinggi, sebab Kiai di Bali dikategorikan sebagai bagian dari kasta Brahmana, karena itu dihormati seperti menghormati seorang pedanda, setia bila disuruh dan tidak mau berdusta terhadapnya. Suatu ketika pembantu sang Kiai yang ternyata anggota PKI itu kelihatan sibuk sekali bekerja, lalu oleh sang kiai ditanya:

“Kamu sibuk sekali memang lagi membuat apa?”. Sang Kiai

“Lubang ini untuk mengubur para tokoh agama, termasuk Pak Kiai kata mereka juga akan dikubur di sini.” Begitu jawaban sang pembantu dengan lugu.

Sejak saat itu Habib Abdul Qadir selalu waspada dengan menyuruh para santrinya selalau berjaga siang malam mengamankan pesantrennya.

Lalu ada seorang buruh bangunan di desa *Melayu* lagi sibuk mengumpulkan bambu, ketika ditanya kiai:

”Apakah kamu mau membikin rumah, kok mengumpulkan bambu sebegitu banyak”.

Sang pembantu mengatakan; “saya sedang disuruh oleh pimpinan PKI untuk membuat bronjong babi besar.”

“Kenapa perlu membuat keranjang besar tidak seperti biasanya”, tanya sang kiai

“Ya karena ini keranjang itu bukan untuk babi tetapi untuk menculik para Kiai untuk dibuang ke laut.” Jawabnya dengan lugas.

Warga ini menceritakan begitu saja tanpa rasa takut dan tanpa berusaha menutup-nutupi rencana partainya itu.

Tidak lama setelah itu memang beberapa orang yang berkeliling memasuki halaman pesantren, mereka mau menculik para kiai, tetapi karena para Anggota Ansor telah mengetahui rencana itu terus berjaga sehingga tidak terjadi penculikan. Sejak saat itu

suasana di lingkungan masyarakat NU dan pesantren menjadi semakin tegang. Walaupun belum ada warga yang diculik tetapi berita terjadinya penyerbuan di desa lain selalu terdengar sehingga membuat kalangan NU terus waspada.

Sementara itu di Loloan Jawa di Kabupaten Jembrana daerah mayoritas Muslim itu kepala desanya seorang tokoh PKI dari suku Jawa bernama Asy'ari dan Wakilnya Mat Rais. Dengan memanipulasi berbagai macam cara akhirnya banyak warga desa yang tak sengaja dijadikan anggota PKI, termasuk banyak warga NU tiba-tiba didaftar sebagai anggota PKI oleh dua aparat desa itu. Dengan anggota yang sedemikian banyak maka struktur dan pamong desa juga mulai dikomunikasikan. Termasuk salah satunya adalah sebuah lembaga yang mengurus masalah ritual dan seremonial agama di desa yang bernama Rukun Kipaya Desa (RKD). Dengan menguasai lembaga adat ini PKI bisa leluasa menyebarkan ajarannya di lingkungan umat Islam. Hal itu yang meresahkan warga NU, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena mereka lebih kuat dan lebih berkuasa. Karena tidak mengertiannya maka banyak warga NU termasuk di kalangan mudanya yang belum mengenal NU secara mendalam, begitu pula banyak di kalangan orang tua terutama yang buta huruf dengan mudah didaftar dan dibelokkan menjadi PKI.

Akhirnya para aktivis NU terutama dari kalangan pemuda Ansor memisahkan diri dari RKD yang sudah diisi orang PKI dan diarahkan untuk propaganda PKI maka dibuatlah lembaga alternatif yang dinamai Rukun Kipaya Ansor (RKA). Dengan demikian bisa membendung perluasan ajaran PKI di lingkungan warga NU. Melihat gelagat ini bukannya RKD mundur atau mengurangi kegiatannya bahkan makin terang-terangan mengajarkan komunisme melalui RKD yang sudah dikuasainya itu.⁷⁰ Secara umum suasana masih aman walaupun sudah sangat tegang. Tetapi karena kekuatan NU sangat terbatas yang ditaksir hanya 1000 orang dibanding dengan PKI yang belasan ribu orang,

⁷⁰ Wawancara dengan Akromo, mantan Anggota RKA Loloan Bali.

maka pihak NU bersikap hati-hati dan penuh kewaspadaan. Di tengah ketegangan yang mencekam itu tiba-tiba ada kabar terjadinya kudeta yang dilakukan oleh PKI di Jakarta 30 September 1965.

I. Provokasi PKI di Sumatera Utara 1956-1964.

Sumatera Utara yang merupakan mayoritas Muslim, sejak Pemilu 1955 Posisi NU di kawasan ini sangat kuat, beberapa bupati dan pimpinan militer berasal dari NU sehingga pada tahun 1956 NU menyelenggarakan Mukhtar di kota yang sedang bergolak itu. Kesatuan TNI Dewan Gajah yang dipimpin Kol. Maludin Simbolon memberontak terhadap pemerintah pusat, sehingga menimbulkan pergolakan bersenjata. Setelah ada pembicaraan serius antara KH Idham Chalid dengan Simbolon, maka Mukhtar bisa dijalankan dengan lancar. Rupanya Simbolon tidak mengusik NU, sebab yang dimusuhi Simbolon hanya Ali Sastroamidjyo beserta partainya yaitu PNI.

Medan menjadi basis PKI, di pulau ini terutama setelah terjadinya pemberontakan Simbolon dan PRRI berlangsung. Operasi pembasmian pemberontakan Simbolon dan PRRI oleh TNI yang banyak berasal dari unsur kiri, terutama dari kelompok Merapi-Merbabu Kompleks sempat dikirim ke daerah ini. Kelompok itu merupakan penggerak PKI di daerah tersebut, sehingga posisi PKI makin kuat.

Sementara NU mulai menguat di daerah itu dengan munculnya tokoh besar seperti H Zainul Arifin seorang Wakil Perdana Menteri, H. Djamaluddin Tarigan (DPR-GR), serta H Nuddin Lubis, ketua Konsul NU Sumatera Utara yang kemudian diangkat sebagai anggota DPR GR dan pengurus PBNU. Pada saat yang bersamaan PKI juga mulai tumbuh pesat setelah penaklukan pemberontakan Simbolon. Tokoh yang muncul antara lain Jusuf Adji Torop Simandjuntak (CC PKI), Amat Johar Nuri, Makmun Duana (DPRGR) dan Kusniawati (Gerwani) juga seorang tokoh Sobsi bernama Bebas Pakpahan. Daerah yang paling pesat

perkembangan PKI-nya adalah Langkat dan Labuhan Batu karena di sana terdapat perkebunan besar, yang menjadi sarangnya Sobsi dan Pemuda rakyat serta BTI.

Orang-orang yang menjadi anggota PKI ini banyak yang berasal dari transmigran Jawa, mereka menjadi PKI karena ditipu. PKI menyembunyikan ateismenya sehingga masyarakat terkecoh. Bahkan pada mereka dikatakan bahwa BTI itu singkatan Barisan Tani Islam, sementara PKI merupakan Partai Kebangkitan Islam. Bahkan karena saking percayanya pada propaganda PKI tersebut ada beberapa muballigh di kawasan transmigrasi yang menjadi pengikut PKI, karena mengira PKI sebagai gerakan perjuangan Islam.

Pada umumnya para tokoh PKI itu berlatar belakang Islam sehingga mereka memakai nama Islam, setelah mereka masuk PKI, mulai mengubah nama-nama Islam, misalnya Ahmad diganti Amat, Hayat diganti Hayad, Sa'id diganti Sait. Dari situ para tokoh PKI mengganti berbagai kalimat suci menjadi mainan seperti *bismillahirrahmanir rahim* mereka ganti dengan *basmi lalat yang mengotori bumi*, kemudian ucapan *assalamualaikum* diganti dengan *asam kumbang*. Asam Kumbang adalah nama sebuah rawa angker tempat buaya liar. Kalimat itu diucapkan sebagai bentuk ancaman, bahwa para tokoh Islam akan dilempar ke rawa Asam Kumbang untuk dijadikan santapan buaya.

Tidak hanya itu mereka juga sudah mulai melakukan berbagai teror dan ancaman, cara membunuh orang NU tidak dengan cara kasar, tetapi ditipu melalui undangan selamatan, yang mengundang para kiai serta jamaahnya. Beberapa kali acara semacam itu diadakan di beberapa desa yang memakan banyak korban. Suatu ketika seorang keturunan Cina dan Tokoh Baperki bernama Koh Abi, yang selama ini dikenal sebagai dermawan mengundang para kiai dan jama'ahnya untuk selamatan di rumahnya. Para kiai beserta jamaahnya mendatangi undangan tersebut. Tetapi para kiai yang makrifat itu tahu bahwa hidangan yang ada di depan mereka mengandung racun, sementara yang lain tidak. Untuk menuduh bahwa makanan tersebut beracun tidak

enak, lalu makanan pura-pura diangkat, kemudian sengaja ditumpahkan sehingga tidak termakan. Maka selamatlah para kiai dari usaha pembantaian terselubung.

Bahkan kemudian di Tapanuli Selatan seorang Kiai kharismatik bernama Syekh Hadi Hassan, diundang ke rumah seorang tokoh PKI. Dalam gelas yang dusuguhkan kepada Kiai itu sudah diisi racun. Kiai waspada terhadap rencana itu, lalu oleh sang Kiai gelas dipandangi secara cermat, tiba-tiba gelas tersebut meledak, akhirnya kopi beracun itu tumpah tidak jadi diminum, maka gagal upaya pembunuhan. Melihat sasarannya lepas PKI langsung meringkus Kiai tersebut, tetapi para santrinya segera lari membunyikan kentongan, sehingga para santri lain berdatangan menyelamatkan Kiainya tersebut. Beberapa orang pimpinan NU termasuk KH Hasan Basri Siregar beberapa kali mau dibunuh oleh PKI, tetapi selalu lolos dari sergapan.

Peristiwa tragis dialami oleh Syekh Maksum Rambe, seorang Khalifah atau musrsyid dari tarikat Naqshabandiyah, punya anak bernama Hasan Basri Rambe seorang tokoh PKI. Ayahnya yang juga seorang Mustasyar NU Sumatera Utara itu dipaksa meninggalkan ajarannya dan menjadi pendukung PKI, karena tidak mau maka ayah dan keluarganya diteror bahkan hendak dibunuh, karena itu kiai beserta keluarganya mengungsi, karena rumah yang biasanya untuk istighatsah dan khusushiyah itu digunakan untuk rapat-rapat PKI. Akhirnya sang kiai mengungsi ke MC NU setempat, yang kemudian ditampung oleh para kiai NU selama beberapa bulan. Dari Syekh Maksum Rambe itu diperoleh keterangan bahwa dalam rapatnya PKI telah mempersiapkan pemberontakan dan pembantaian terhadap umat Islam. Kerasnya intimidasi yang dilakukan PKI terhadap NU itu membuat warga NU sangat hati-hati dalam melakukan kegiatan. Agar pertemuan mereka tidak diketahui maka para ulama NU kalau mau menghadiri rapat dengan sandi pergi *nan bulek* (pergi ke bulatan) atau pergi pertemuan NU yang bersimbol bola dunia. Dengan demikian rapat-rapat NU tidak lagi diintai oleh mata-mata PKI.

Selain itu pimpinan PKI Amat Jauhar Nuri memerintahkan agar masyarakat membuat lubang persembunyian sebab gerombolan Sombolon akan melakukan serangan kembali. Seruan itu bahkan diperkuat oleh pamong desa setempat, sehingga orang NU pun disuruh membuat lubang perlindungan. Padahal lubang tersebut hendak digunakan untuk mengubur orang-orang Islam yang akan dibantai saat pemberontakan nanti. Setelah itu PKI membuat teror membunyikan sirine yang seolah serangan gerombolan Simbolon telah datang, sehingga membuat warga tidak tenang, saat itu Sobsi, Gerwani dan pemuda rakyat selalu unuk kekuatan dengan karnaval keliling desa dengan membawa senjata.

Dalam posisi kuat seperti itu PKI mulai menggunakan kekuatannya untuk merebut tanah yang ada. Di Sumatera Utara persoalan pertanahan memang sangat rawan selain luasnya wilayah, maka sebagian besar tanah adalah milik Kesultanan Deli, sementara lainnya adalah milik Negara, tetapi karena tidak pernah diatur dan dikelola maka menjadi tanah tidak bertuan, karena itu menjadi ajang rebutan PKI. Tanah Sultan dan tanah Negara, serta beberapa perkebunan peninggalan perusahaan Belanda itu banyak yang dikapling BTI dan Pemid Rakyat untuk dibagikan pada rakyat. Rakyat yang menerima pembagian itu didaftar dan langsung dijadikan anggota PKI tanpa sepengetahuan mereka sendiri, sehingga rakyat berbondong-bondong masuk PKI.

Terjadinya peristiwa berdarah di Bandar Bertsy tahun 1964 adalah merupakan bagian upaya PKI merebut tanah kesultanan dan Negara. Ketika Negara hendak menggarap perkebunan tersebut dihadang oleh ratusan anggota BTI dan Pemuda Rakyat, sehingga terjadi keributan. Dalam keributan itu seorang pasukan keamanan dari TNI bernama Pelda Sudjono dikeroyok oleh anggota BTI hingga tewas. Kemudian diketahui salah satu pembunuh Pelda Sudjono itu adalah Bebas Pakpahan seorang tokoh Sobsi Sumatera

Utara yang sangat militan. Beberapa orang yang terlibat dalam pembantaian itu dihukum penjara sebagian meloloskan diri.⁷¹

Tidak hanya tanah Negara, tanah-tanah milik para kiai dan pesantren juga tidak luput dari serobotan anggota BTI dan Pemuda Rakyat. Terutama tanah yang berada di daerah yang sepenuhnya dikuasai PKI seperti Kampung Kolam, tanah warga NU yang luas-luas menjadi sasaran aksi sepihak PKI. Seorang kiai di Marga Batu memiliki tanah seluas dua hektar tiba-tiba dikuasai PKI, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena Ansor dan NU di kawasan itu lemah, akhirnya tanah tersebut betul-betul hilang sampai sekarang. PKI merasa kuat karena didukung oleh aparat pemerintah dan TNI setempat. Sementara tanah yang jauh dari kekuasaan PKI seperti yang ada di Medan dan sekitarnya bisa dipertahankan.

Sejauh ini dalam menghadapi provokasi dan teror PKI, kalangan NU dan kelompok Islam serta kelompok non PKI lainnya lebih banyak menahan diri, tidak melakukan serangan balik, sebagaimana yang terjadi di Jawa. Berbagai serangan dihadapi dengan kewaspadaan dan hanya membela diri seperlunya. Kalau ada peristiwa provokasi dan teror yang bersifat criminal dilaporkan pada aparat setempat. Bila aparat tidak tanggap cenderung dibiarkan masyarakat termasuk NU tidak mengambil tindakan sendiri, tetapi menyerahkan pada pihak yang berwenang seperti kasus Bandar Betsy dan lain sebagainya, sehingga ketegangan itu tidak meletus menjadi konflik horizontal.

J. NU Membela Kelompok Lain

Sejak akhir 1950-an NU tampil sebagai imamnya umat Islam, bukan saja organisasi ini memiliki prinsip yang kuat tetapi juga memiliki kekuatan politik yang disegani, sejak dibubarkannya Masyumi NU telah memiliki peran menonjol, apalagi setelah

⁷¹ Wawancara dengan KH Hasan Basri Batubara salah seorang Wakil ketua PWNU Sumatera Utara tahun 1060-an. Wawancara dilakukan pada, 10 September 2013.

partai Islam modernis itu dibubarkan maka NU menjadi kekuatan utama kelompok Islam di Indonesia. Kekuatan yang dimiliki NU itu tidak dipergunakan untuk memupuk kekuasaan sendiri atau untuk menginjak lawan politiknya. Sebaliknya digunakan untuk membela Negara dan membela hak dasar kelompok lain. Ketika PKI menyerang PNI, Muhammadiyah dan eks Masyumi, maka tampil membela mereka padahal selama ini menjadi pesaing dalam politik nasional. Tetapi ketika berhadapan dengan musuh dari luar maka ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah (kebangsaan) dibangun kembali.

Di kecamatan Grogol Kediri PKI menduduki tanah milik H. Amir seorang warga Muhammadiyah, Pihak BTI-PKI menuduh bahwa tanah milik H Amir tersebut bukan tanah hak milik tetapi hanya hak pakai, karena itu akan diambil untuk kepentingan rakyat. Karena Muhammadiyah kecil pendukungnya di daerah itu, lagi pula tidak memiliki pasukan khusus maka ia melaporkan kasusnya kepada NU yaitu pada Gus Maksum Pemimpin Pesantren Lirboyo. Saat itu juga santri Lirboyo dengan bersenjata lengkap, celurit dan pedang dikerahkan untuk menjaga tanah H Amir, sejak saat itu BTI tidak berani lagi datang ke tempat itu, sehingga tanah itu bisa digarap dengan aman.

Tidak hanya membela Muhammadiyah, NU dan Ansor juga membela PNI dalam peristiwa perebutan tanah masih terjadi di Pagu Kediri, ketika PKI menguasai tanah bengkok dusun, saat itu Parmin Kepala Dusun berasal dari PNI meminta bengkok desa tersebut diserahkan tetapi PKI menolak, lalu setelah panen Kamituwo mengambil secara paksa harta desa tersebut. Saat itu pasukan BTI datang menyerang pertemuan tersebut dan mengeroyok Parmin sang Kepala Dusun. Selain itu K Muhammad Said yang mencoba menolong Parmin ikut dianiaya tetapi tidak mempan. Berita tentang penganiayaan Parmin dan Kiai Said itu memancing kemarahan Ansor, karena itu Ansor menyerbu markas BTI, ketuanya Kasdi dan Kasidi ditangkap dan

pengikutnya dihajar ramai-ramai, kemudian mereka diserahkan pada polisi lalu diadili dan dimasukkan penjara.⁷²

Musuh utama PKI adalah Masyumi karena dianggap kebarat-baratan, karena itu ketika Masyumi di larang, maka PKI paling diuntungkan, satu lawan sudah disingkirkan dalam merebut kekuasaan nasional, PKI tidak menyangka bahwa NU jauh lebih kuat ketimbang masyumi dalam menghadapi PKI. Ketika Masyumi di larang sementara Underbauwnya Masyumi seperti GPII, HMI dan PII tidak dilarang, maka selalu menjadi bulan-bulanan PKI karena dianggap sudah tidak memiliki induk sebagai pelindung.

Sebagai contoh pada 13 Januari 1965 PII sebuah organisasi pelajar yang berafiliasi ke Masyumi, mengadakan pelatihan di Kanigoro Kediri. Pada pagi dini hari pesentren pusat latihan PII tersebut diserbu oleh ribuan Pemuda Rakyat dan BTI yang bersenjata lengkap. Qur'an dan berbagai macam buku agama diinjak-injak. Para pengasuh Pesantren Kiai Said Koenan dan KH Jauhari dianiaya. Sementara para pengurus PII digiring ke Polsek, dengan tuduhan Masyumi sebagai organsasi terlarang, telah melakukan tindakan makar dengan menyelenggarakan training politik di Kanigoro tersebut.

Rupanya pimpin pesantren yang ditempati training PII tersebut adalah Milik tokoh NU Kiai Jauhari, yang anaknya adalah pengasuh pesntren Lirbooyo dan sekaligus sesepuh Banser. Maka pada 13 januari 1965 segera dilakukan serangan balasan untuk membebaskan para kiai dan pengurus PII yang ditahan polisi dan BTI. Delapan truk berisi Banser Kediri menyerbu menggerebek rumah para pimpinan PKI dan menangkap pelaku penyerbuan PII yaitu Suryadi dan Harmono yang kemudian diserahkan ke Kantor Polisi. Seterusnya para aktivis PII banyak minta perlindungan pada para kiai dan tokoh NU Kanigoro.⁷³ Maka

⁷² Agus Sunyoto, *Banser jihad Melawan PKI*, hal. 84.

⁷³ *Ibid*, hal. 79-80.

dengan mudah dikepong oleh PKI sehingga pelaksanaan Pelatihan tersebut terhenti. Saat itu Pemuda Ansor beserta segenap santri Lirboyo yang dipimpin Gus Maksum datang untuk membebaskannya.

PKI juga masih belum rela sebelum seluruh organisasi neven Masyumi dibubarkan semuanya, ketika gagal mensabot PII, maka PKI ganti memprovokasi Bung Karno Untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebuah organissi mahasiswa nevennya Masyumi. Demikian Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) milik Masyumi. Bung Karno berharap NU membantu dalam pembubaran HMI itu. Karena baru saja HMI Yogya dan Jakarta melakukan pengganyangan terhadap NU, PMII dan Menteri Agama Saifuddin Zuhri yang dituduh mengNUkan IAIN dan Departemen Agama dalam Peristiwa 10 Oktober 1963, yang menggemparkan, sehingga harus melibatkan Pakualam VII dan Bung Karno untuk menyelesaikannya.⁷⁴

Bung Karno kaget ternyata sikap NU sangat lain, walaupun Masyumi merupakan rivalnya dan HMI sendiri pernah mensabotnya, tetapi NU tidak ingin balas dendam, tidak ingin HMI ikut dibubarkan karena tidak terlibat pemberontakan PRRI, karena itu NU menolak permintaan Bung Karno dan dengan gigih membela HMI karena NU tahu bahwa ini merupakan provokasi PKI.⁷⁵ Untuk mempreteli satu-persatu kekuatan Islam. Untuk membela HMI itu sampai Mnteri Agama berani berdebat dengan Presiden Soekarno, bahkan Kiai NU itu mengancam kalau HMI dibubarkan Kiai Saifuddin Zuhri akan mengundurkan diri sebagai Menteri. Dengan sikapnya yang tegas dari Kiai Saifuddin Zuhri, Bung Karno tidak jadi membubarkan

⁷⁴ Baca harian Duta Masyarakat, 11-23 Oktober 1963.

⁷⁵ Lihat, Syaifuddin Zuhri dan Hasyim Ning,

HMI dan SBI.⁷⁶ Betapapun sulitnya NU tetap menjaga *ukhuwah Islamiyah* walaupun pihak lain belum tentu mampu melaksanakan.

Begitu Juga ketika Hamka seorang tokoh terkemuka Masyumi diserang Lekra PKI, dengan tuduhan plagia, maka Lesbumi sebagai organisai kebudayaan NU melakukan pada tokoh Masyumi tersebut, karena tidak ada yang berani membela pimpinan Masyumi sebagai partai terlarang karena khawatir dituduh anti pemerintah.

Tetapi Lesbumi dan Koran NU *Duta Masyarakat* yang dipimpin H Mahbub Djunaidi dan H Said Budairi gigih melakukan pembelaan. Terhadap ulama dan sastrawan dari Masyumi dan pimpinan Muhammadiyah tersebut.

TABEL ORMAS BESERTA UNDRBOUW⁷⁷

NO	UNDERBOW	PARTAI POLITIK				
		PNI	PKI	NU	MASYUMI	PARKINDO
1	Pemuda	P.Marhaen	P.Rakyat	GP Ansor	GPII	P.Kristen
2	Wanita	W.Marhaen	Gerwani	Muslimat	W.Islam	W.Kristen
3	Mahasiswa	GMNI	CGMI	PMII	HMI	GMKI
4	Pelajar	GSNI	IPPI	IPNU	PII	GSKI
5	Petani	Pertani	BTI	Pertanu	GTH	-
6	Buruh	KBKI	SOBSI	Sarbumusi	Gasbindo	SBKI
7	Seni Budaya	LKN	Lekra	Lesbumi	HSBI	-

Ruang lingkup perjuangan NU dengan demikian menjadi luas, tetapi karena perangkatnya sudah sangat luas, sehingga berbagai

⁷⁶ Lihat Saifussin Zuhri, *Bengkat dari Pesntren*, hal. 528-529. Hal itu juga ditegaskan kembali oleh Sulastomo saat Khaul KH Saifuddin Zuhri, Juli 2013 di PBNU.

⁷⁷ Dinukil dari buku Biografi Idham Chalid., hal., 365.

tugas tersebut diperankan dengan sangat baik dan efektif, untuk menjaga kekuatan Islam dan kekuatan nasional dalam mempertahankan Negara Indonesia dan falsafah Pancasila.

K. Propaganda, Trauma dan Kewaspadaan

Selama ini PKI masih sering melontarkan propaganda damai bahwa mereka tidak anti agama, bersahabat dan menghormati kebebasan beragama. Mereka hanya membela rakyat dan melawan kapitalisme serta imperialisme dibuktikan masyarakat sendiri sebagai suatu taktik belaka. Memang hal itu sebagian bisa mereka buktikan beberapa tokoh agama yang menjadi tokoh PKI, tetapi masyarakat tidak mudah terkecoh oleh kenyataan yang langka itu. Sebaiknya masyarakat menganggap tokoh agama yang mengikuti garis perjuangan PKI itu dianggap tidak tahu agama dan tidak tahu PKI.

Berbagai propaganda itu tidak mengubah kepercayaan masyarakat yang berpegang sikap dan perilaku PKI sehari-hari di lapangan yang jauh berbeda dengan apa yang mereka propagandakan. Dalam perilaku sehari-hari PKI Pesindo sangat kejam menghadapi lawan politiknya dan sikapnya yang jelas sangat anti agama dan anti Tuhan. Selain itu partai ini juga diidentifikasi masyarakat sebagai partainya para preman dan perampok. Partai ini memang menampung dan melindungi para perampok untuk melancarkan tindakannya, bahkan oleh PKI dijadikan sebagai sarana melakukan subversi. Masyarakat merasakan semuanya ini sebagai pengalaman sehari-hari yang sangat meresahkan kehidupan mereka.

Dalam pemberontakan dalam waktu yang cukup singkat di Madiun dan sekitar Jawa timur Jawa Tengah yang mereka kuasai telah mengakibatkan banjir darah yang mengorbankan para ulama, kalangan pejabat pemerintah dan rakyat biasa. Peristiwa pembantaian para tokoh agama, dan pengrusakan terhadap masjid serta pesantren yang mereka lakukan selama pemberontakan itu tidak pernah dilupakan oleh umat Islam. Selain itu umat Islam

dan bangsa ini mengetahui betul kekejaman yang dilakukan oleh partai komunis di Negara yang mereka kuasai melalui kudeta berdarah, yang mengorbankan ribuan rakyat, seperti di Uni Soviet dan Cina yang mengorbankan hingga puluhan Juta, sementara itu di Vietnam dan Korea Utara Partai Komunis telah membantai dua jutaan rakyat.

Walaupun terbukti melawan pemerintah yang sah dan mengakibatkan korban jiwa, tetapi PKI tidak dilarang dan tidak dibubarkan, bahkan masih diberi hak hidup yang sama dengan partai lainnya. Ketika diselenggarakan Pemilu 1955 bisa mengikuti Pemilu dengan leluasa seolah tidak memiliki cedera politik. Bahkan kemudian mereka memutarbalikkan fakta bahwa mereka tidak melakukan pemberontakan, tetapi semata diprovokasi oleh Muhammad Hatta. Padahal mereka melakukan tindakan sendiri dengan melakukan kerjasama dengan musuh RI yaitu Belanda untuk menghancurkan Republik ini. Propaganda itu diterima oleh rakyat yang tidak mengerti sejarah, sehingga PKI bisa ikut Pemilu dan tetap mendapat dukungan besar dari masyarakat. Bayangkan sehabis melakukan pemberontakan berdarah itu PKI masih mapu meraih posisi empat besar setelah PNI, Masjumi dan NU. Sementara itu di beberapa basis PKI, maka kekuatan PKI bisa menandingi partai lain. Di Trenggalek misalnya PNI mendapatkan 11 Suara, PKI mendapatkan 10 Suara, sementara NU mendapat 6 Suara, maka Bupati di kota ini bisa dipegang oleh PKI.

Perolehan suara yang besar ini PKI juga semakin percaya diri baik di parlemen maupun di Majelis Konstituante. Di dalam majelis itulah PKI mulai memasukkan ajarannya dan melakukan serangan secara sistematis terhadap para lawan politiknya. Sementara itu di lapangan terus melakukan provokasi dan agitasi. Sejak dalam kampanye Pemilu 1955 PKI selalu mengejek partai lain sehingga telah beberapa kali melakukan perkelahian dengan partai lain.

Berbagai peristiwa turut membantu kebangkitan dan perkembangan PKI; *Pertama*, Adalah diperbolehkannya ikut Pemilu 1955 sehingga memanfaatkan sistem kampanye terbuka itu

untuk mempropagandakan ajaran dan programnya. *Kedua*, Sikap konfrontatif Masyumi yang menempatkan siapapun yang tidak anti PKI sebagai PKI, dan harus dihadapi dengan keras, termasuk pada Presiden Soekarno yang menggagas Nasakom. Bahkan NU oleh Masyumi juga dianggap simpatisan PKI. *Ketiga*, Pemberontakan PRRI-Permesta, dijadikan sarana PKI untuk menggebuk Masyumi dan mengambil beberapa posisi penting baik dalam kemiliteran maupun dalam birokrasi. Apalagi setelah dibubarkannya Masyumi dan PSI tahun 1960, maka salah satu lawan PKI telah tumbang, tinggal berhadapan dengan NU sementara PNI sangat lemah dalam menghadapi PKI. *Keempat*, Pandangan Soekarno tentang *The New Emerging Forces* yang berkonfrontasi dengan Barat, sehingga semakin bergeser ke Blok Soviet dan RRC, hal itu sangat menguntungkan politik PKI. *Kelima*, Apalagi dengan dibentuknya poros Jakarta, Hanaoi, Peking, Pyong Yang, hal itu semakin melancarkan gerakan PKI dalam revolusi Komunis. Semuanya itu memberikan peluang dan kesempatan besar bagi PKI untuk mengembangkan diri dan menyiapkan revolusi komunia yang diagendakan.

Melihat pengalaman sejarah dan perilaku PKI selama ini maka kalangan masyarakat terutama umat Islam selalu waspada terhadap propaganda dan kehadiran PKI. Karena itu NU sendiri walaupun melihat kekuatan suara PKI cukup berimbang tetapi menolak keras masuknya PKI dalam Kabinet. Demikian juga masyarakat di bawah secara umum terus melakukan kewaspadaan terhadap kemungkinan hadirnya PKI. Sebab dalam kenyataannya mereka tidak pernah berhenti melakukan sobotase, perampokan dan penjarahan di berbagai tempat. Semuanya tercatat dalam ingatan masyarakat. Dengan pengalaman traumatis seperti itu mereka selalu waspada bahkan secara fisik siaga dalam menghadapi PKI.[]

BAB IV

MELETUSNYA GERAKAN 30 SEPTEMBER

Pada saat masyarakat menghadapi kecemasan dan keresahan yang berkepanjangan sejak terjadinya berbagai aksi dan teror yang dilakukan oleh PKI beserta segenap organisasi nevennya baik dalam propagandanya yang anti agama, penyerobotan tanah dan penyerbuan kantor organisasi sosial atau instansi pemerintah, maka tiba pada pagi pagi buta 1 Oktober 1965, masyarakat dikejutkan oleh adanya kabar bahwa terjadi pembunuhan para jenderal pimpinan tertinggi ABRI di Ibu Kota. Tentu saja berita itu semakin memperparah kerisauan sosial yang selama ini mereka hadapi dengan penuh ketidakpastian, ketika keamanan telah tidak lagi ada jaminan, termasuk bagi pemerintah sendiri dan aparat terpentingnya yaitu Angkatan Bersenjata.

Kemudian diketahui dengan pasti bahwa para jenderal yang diculik kemudian dibunuh adalah Menteri/Panglima AD Letnan Jenderal A. Yani : Mayor Jendral Suprpto; Mayor Jenderal S. Parman; Mayor Jenderal M.T. Harjono; Brigadir Jenderal Sutojo; Brigadir Jenderal Panjaitan; Letnan Pier Tendean dan Jenderal AH Nasution,⁷⁸ tetapi ada penculikan dan pembunuhan yang gagal dilakukan terhadap Menko/Hankam/KASAB Jenderal A.H.NAsution.

Dari siarannya itu bisa diketahui ada sekelompok perwira yang mencoba melakukan pengambilan kekuasaan. Gerakan yang dilakukan pada 30 September itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, komandan Batalion Kawal Kehormatan Cakrabirawa, bersama-sama dengan Kolonel A. Latif dan Brigadir Jenderal Supardjo. Peristiwa itu tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga secara serentak terjadi di kota-kota besar lain, seperti di Jawa Tengah gerakan ini dipimpin oleh Kolonel Sahirman dan Letnan Kolonel Usman, apapa lagi di Divisi Diponegoro ini dicurigai sebagai pusat persemaian PKI dalam tubuh ABRI.

⁷⁸ Chalid Mawardi, "Pristiwa Gerakan 30 September", dalam buku *Practica Politica Nahdlatul Ulama*, Yayasan Pendidikan Practica, Jakarta 1967, hal., 51-52.

Belakangan terungkap bahwa pembunuhan terhadap Jenderal Nasution itu dipimpin langsung oleh Kol. Abdul Latif seorang kader Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Jawa Timur yang dulu terlibat dalam peristiwa PKI di Madiun tahun 1948.⁷⁹ Pada masa pendudukan Belanda di Yogya ia menjadi Komandan Kompi Merah yang bermarkas di kota itu. Kemudian Latif menjadi perwira menengah dengan kedudukan strategis sebagai Komandan Brigade Infantri I Jaya Sakti di Kodam Jaya Jakarta Raya⁸⁰, sehingga bisa memimpin Gestapu. Tetapi justru operasi Kol Latif itu gagal, karena pimpinan tertinggi ABRI yang anti PKI ini lolos dari sergapan pemberontak yang sudah mengepung rumahnya. Pada saat bersamaan gerombolan Gestapu Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono seorang pimpinan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang bermarkas di Benteng Vredenburg Yogyakarta menculik dan membunuh Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugijono di Yogyakarta⁸¹. Saat itu pula di berbagai markas militer yang ada di berbagai kota membentuk Dewan Jenderal.

Pada saat itu juga kelompok penculik itu juga menduduki berbagai objek vital, seperti RRI dan kantor telepon yang langsung digunakan untuk mengumumkan perbuatannya. Dalam upaya perebutan kekuasaan tanggal 30 September 1965 itu, Untung, Latif dan Supardjo mempergunakan satu kompi Pasukan Tjakrabirawa, dan dua batalion para yaitu dari Jawa Tengah (Yon 454) dan dari Jawa Timur (Yon 530), yang merupakan kekuatan inti yang sudah dipengaruhi PKI, sehingga pasukan itulah yang bisa diandalkan dalam perebutan kekuasaan.

Alasan kelompok ini mengambil alih kekuasaan dengan dalih untuk menggagalkan usaha perebutan kekuasaan negara

⁷⁹ Anton Tabah, *Jenderal NASution Bicara tentang G-30-S/PKI*, Penerbit, Sahabat Klaten, Klaten, 2009, hal., 41.

⁸⁰ Subandrio, *Kesaksianku Tentang G-30-S*, Jakarta, 2000, Hal, 47.

⁸¹ Anton Tabah, *Jenderal Nasution Bicara Tentang G-30S/PKI*, hal., 132.,

yang direncanakan oleh Dewan Jenderal yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution dan Letnan Jenderal A. Yani, dan para jenderal senior lainnya yang mereka sebut sebagai jenderal flamboyan yang mendapatkan bantuan dari CIA. Mereka menuduh “Dewan Jenderal” ini akan merebut kekuasaan negara pada tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan peringatan Hari Angkatan Perang yang dipusatkan di Jakarta. Karena itu mereka menghabisi terlebih dulu para Dewan Jenderal, sebelum bertindak lebih jauh.

Pada hari itu juga sekitar jam 12.30 pimpinan pemberontak Letnan Kolonel Untung mengumumkan bahwa mulai hari itu dibentuk Dewan Revolusi yang diketuai oleh Untung sendiri. Saat itu juga ia mengumumkan Dekrit pen-demisioner-an Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dan segera ditetapkan bahwa pemegang kekuasaan negara berada di tangan Dewan Revolusi. Pada saat itu para pemimpin tertinggi NU seperti Rais Aam KH Wahab Hasbullah dan Wakil Rais KH Bisri Sansuri serta beberapa pimpinan NU lainnya sedang berada di Jakarta dan berkumpul di rumah Ny. Sholihah Wahid Hasyim Jalan Amir Hamzah. Di tempat itulah para pimpinan NU memantau keadaan.⁸² Setelah mendengar Siaran RRI itu serta melihat rangkaian situasi sebelumnya maka pada saat itu juga PBNU berkesimpulan bahwa pelaku atau dalang Gerakan 30 September itu adalah PKI. Karena itu pada 1 Oktober itu PBNU membuat pernyataan yang isinya;

pertama, mencela dengan keras tindakan perebutan kekuasaan oleh apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”;

Kedua, menolak dan menentang pembentukan “Dewan Revolusi”.⁸³

⁸² Baidlowi Adnan, *Gerakan 30 September 1965/PKI, NU Menumpas, NU Menolong*, Naskah belum diterbitkan., hal., 25.

⁸³ Ibid. hal., 56.

Apalagi dalam Dewan Revolusi NU dicatut namanya, karena itu PBNU segera melakukan tabayyun. Dugaan bahwa pelaku G-30-September adalah PKI itu semakin kuat dan semakin meyakinkan ketika surat kabar PKI *Harian Rakjat* yang terbit pada 2 Oktober 1965 dengan tegas editorialnya memberikan dukungan pada gerakan 30 September untuk menyelamatkan revolusi daru kup yang akan dilakukan Dewan Jenderal⁸⁴. Dengan diketahuinya secara pasti siapa pelaku Gerakan 30 September dan siapa para pemimpin Dewan Revolusi yang melaksanakan gerakan tersebut, maka NU yakin bahwa pelaku Gerakan 30 September 1965 adalah PKI, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan G-30-S/PKI. Dengan adanya sikap dan kepastian itu pula maka NU segera menyusun beberapa langkah strategis untuk menghadapi situasi krisis yang sedang terjadi. Langkah ini diambil di samping untuk menciptakan ketenteraman di lingkungan masyarakat juga sebagai langkah untuk menyelamatkan negara. Dengan diketahuinya secara pasti siapa pelaku Gerakan 30 September dan siapa para pemimpin Dewan Revolusi yang melaksanakan gerakan tersebut, maka NU yakin bahwa pelaku Gerakan 30 September 1965 adalah PKI, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan G-30-S/PKI.

A. Langkah NU Menghadapi G30S PKI

Proses pengambilan sikap untuk itu terjadi seperti ini, persis pada pagi-pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 itu, Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda ANSOR sedang menyelenggarakan rapat pleno lengkap di Jakarta. Pada awalnya semua pihak termasuk PP Ansor masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan siapa pelakukanya. Saat itu juga dilakukan usaha untuk mengumpulkan berbagai keterangan tentang situasi yang sebenarnya, maka pada siang harinya, setelah mendengarkan

⁸⁴ Baca *Harian Rakyat*, Jakarta Sabtu 2 Oktober 1965 tahun ke XV. No 4238. Kliping editorial Koran ini disimpan dalam Arsip PBNU. Saat ini kliping tersebut disimpan di Arsip Nasional No. 172.

Pengumuman tentang susunan dan personalia Dewan Revolusi yang diumumkan oleh Letnan Kolonel Untung, situasi menjadi sedikit terang siapa pelakunya dan apa tujuannya, yang tidak jauh yang didukan oleh Ansor dan kalangan NU pada umumnya, mengingat pemanasan dan persiapan yang dilakukan PKI sudah cukup lama.

Saat itulah PP Gerakan Pemuda Asor menyelenggarakan rapat kilat dan mengambil kesimpulan dengan tegas dan yakin bahwa: (1) Apa yang dilakukan oleh “Gerakan 30 September” adalah suatu perebutan kekuasaan negara; (2) Bahwa telah jatuh beberapa korban terdiri dari Perwira-Perwira Tinggi Angkatan Darat yang telah diculik dan dibunuh oleh “Gerakan 30 September” adalah didalangi dan dilaksanakan oleh PKI, sehingga perebutan kekuasaan Negara pada hari itu pada hakekatnya dilancarkan oleh gerombolan PKI. Pada 1 Oktober 1965 jam 14.30 itu pula PP Gerakan Pemuda ANSOR mengeluarkan suatu pernyataan yang sama dengan yang dikeluarkan PBNU, walaupun tidak berhubungan satu sama lain, karena situasi rawan tidak memungkinkan keduanya bertemu saat itu.⁸⁵

Rupanya seluruh jajaran pengurus NU di daerah baik di wilayah maupun di cabang juga mengadakan pertemuan di tempat masing-masing. Walaupun tanpa komunikasi satu sama lain, tetapi melihat situasi pemanasan sebelumnya, maka mereka sepakat bahwa PKI-lah yang melakukan kudeta itu. Sebagai contoh pertemuan di rumah Kiai Sofyan Ketua PCNU Trenggalek dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa pelaku penculikan para jenderal adalah PKI. Kalangan militer sendiri juga belum mendapatkan gambaran yang pasti siapa pelaku Gerakan itu Letnan Suyatno Komandan Koramil Kampak yang datang tengah malam pada pertemuan itu juga baru menduga pelaku Kudeta adalah PKI. Karena itu dia menyaraknan para Kiai untuk waspada karena

⁸⁵ Chalid Mawardi, “*Pristiwa Gerakan 30 September*”, hal. 52.

tidak menutup kemungkinan PKI akan melakukan serangan pada ulama NU.⁸⁶

Mengingat gawatnya situasi maka PP-GP Ansor menyerukan kepada anggota PP-GP Asor, agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan menghimbau untuk sementara waktu tidak tinggal di rumah. Kemudian rapat yang semula di Jakarta pusat itu tidak aman, maka dicari tempat yang lebih aman di pinggiran kota yaitu di Klender. Dari persembunyian itulah PP Ansor memantau perkembangan situasi dan memberikan instruksi lebih lanjut kepada pimpinan Wilayah dan Cabang NU seluruh Indonesia. Sebagai rasa tanggung jawab pada NU yang nama baiknya dicemarkan oleh Dewan Revolusi, maka pada malam hari itu, Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor mengeluarkan suatu Pengumuman atas nama PBNU, yang isinya membantah keterlibatan para pimpinan NU dalam Dewan Revolusi, hal itu tidak lebih hanya maneuver Letkol. Untung Samsuri.

Menghadapi pemberontakan kelompok jenderal PKI itu kalangan TNI yang terdiri Kostrad serta RPKAD dengan cepat berhasil merebut kembali RRI dan Kantor Telepon dan menggiring pasukan Gestapu ke arah Lubang Buaya, maka Panglima Kostrad waktu itu, yaitu Mayor Jenderal Suharto mengeluarkan pengumuman melalui RRI yang menyatakan, bahwa Kostrad telah mengambil tindakan terhadap pasukan “Gerakan 30 September” dan menyebutkan perbuatan mereka kontra revolusi. Dengan adanya pengumuman RRI dari Mayor Jenderal Suharto ini, maka PP-GP Ansor semakin yakin akan kebenaran pengamatannya mengenai peristiwa yang terjadi pada hari itu, dan berketetapan hati untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk mengikut sertakan Gerakan Pemuda Ansor dalam penumpasan terhadap Gestapu itu lebih lanjut.

⁸⁶ Abdul Hamid Wilis, *Aku menjadi Komandan Banser*, hal. 200.

Dalam waktu singkat, maka pada tanggal 4 Oktober, jenazah para jenderal ditemukan di dalam sumur yang ada di daerah Lubang Buaya, yang terletak berdekatan dengan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah. Penemuan jenazah para Perwira Tinggi Angkatan Darat itu kemudian disiarkan ke seluruh Surat Kabar di Ibu Kota dan Surat-Surat Kabar Daerah. Tersiarinya berbagai berita disertai gambar para perwira tinggi AD yang menjadi korban itu, dengan sendirinya berita itu membawa efek psikologis yang mendalam pada Rakyat Indonesia, sehingga membangkitkan kecaman, kebencian dan mengundang lahirnya gerakan perlawanan terhadap pelaku pemberontakan itu.

Setelah penemuan para korban dan semakin jelas pelakuknaya PP-GP ANSOR yang terus menerus berkumpul diberbagai tempat dan selalu berpindah-pindah itu. Dalam menghadapi situasi yang genting itu mereka dengan berani mengambil suatu keputusan dengan tegas menuntut pembubaran PKI beserta seluruh Ormas, yang selama ini selalu membuat kerusuhan dan keresahan masyarakat. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan bahwa kalau saat ini yang menjadi sasaran pembunuhan adalah para Jenderal, maka dalam waktu dekat sebagaimana perilaku PKI selama ini maka PKI pasti akan lebih kejam lagi menganiaya dan membunuh para ulama atau para kyai yang selama ini mereka golongkan sebagai setan desa. Oleh karena itu, karena PKI telah terbukti melakukan tindakan makar maka Ansor sebagai pembela agama dan penjaga negara harus melakukan serangan dengan segera.

Dalam waktu singkat dibuatlah suatu rumusan pernyataan yang akan ditandatangani oleh PBNU dan seluruh Pucuk Pimpinan Ormas underbouw terpenting NU. Isinya dengan tegas menuntut agar PKI dan segenap ormas-nya dibubarkan, karena jelas bahwa PKI adalah pelaku peristiwa perebutan kekuasaan negara pada tanggal 1 Oktober 1965. Setelah Draft Pernyataan itu telah siap, maka dilakukan upaya untuk meminta tanda-tangan PBNU, tetapi keberadaan mereka tidak diketahui. Namun besok pagi tanggal 5 Oktober, jenazah Perwira-Perwira Tinggi AD itu

akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para pimpinan PP-GP ANSOR dan pengurus PB-PMII menemui para Pengurus NU saat pemakaman para korban di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk menandatangani pernyataan bersama yang sudah disiapkan.

Setelah ketemu para pengurus PBNU antara lain K.H. Masjkur, Rois Syuriah PBNU langsung memberikan tandatanganannya. Begitu juga Ketua I PBNU K.H. M. Dachlan juga memberikan tandatangan terhadap draf yang dibawa oleh KH Yusuf Hasyim dari Ansor itu. Di situ pula K.H. Achmad Sjaichu Ketua II PBNU juga membubuhkan tandatanganannya. Setelah resmi pimpinan Syuriah dan Tanfidziyah membubuhkan tandatanganannya, maka semua Pucuk Pimpinan badan otonom NU itu seperti PP-GP Ansor, PB-PMII, PP Sarbumusi, PP Pertanu, PP Muslimat NU, PP Lesbuni, dan lain sebagainya, semuanya membubuhkan tandatanganannya pula. Maka selesailah surat pernyataan resmi PBNU beserta badan otonomnya mengenai Gerakan makar 30 September itu. Adapun bunyi lengkap surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut.

RESOLUSI MENGUTUK GESTAPU

Pernyataan PB Nahdlatul Ulama beserta segenap organisasi massanya;

MENGINGAT:

1. Mengingat pernyataan PB Nahdlatul Ulama beserta beberapa Ormas-nya yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 dan bertalian dengan peristiwa yang digerakkan oleh apa yang dinamakan Gerakan 30 September.
2. Bukti-bukti yang berada di tangan yang berwajib bahwa golongan kontra revolusioner Gerakan 30 September telah mempersenjatai Pemuda Rakyat dan anggota-anggota serikat buruh Pekerja Umum/SOBSI.
3. Pernyataan yang telah dikeluarkan oleh berwajib bahwa Pemuda Rakyat dan Gerwani secara khusus telah didatangkan dari jauh

untuk dilantik di Lubang Buaya Jakarta, di mana kemudian telah dikubur dalam sumur tua, jenazah dari 6 Jendral dan seorang perwira Pertama TNI yang telah menjadi korban kebuasan G30 S.

4. Kenyataan bahwa Harian Rakyat organ resmi PKI bukan saja menyiarkan secara besar-besaran aksi-aksi dari gerakan kontra revolusi itu, bahkan juga editorialnya, karikaturanya, serta rubrik-rubrik khusus lainnya menyatakan dukungan yang penuh terhadap gerakan yang mencoba hak prerogratif Presiden/Panglima Tertinggi ABRI dan Pimpinan Revolusi Bung Karno yang telah mendapat dukungan sepenuhnya dari semua kekuatan revolusioner dalam negeri di dalam menghadapi partai/ormas yang kontra revolusi.

MENIMBANG:

Bahwa setiap gerakan revolusioner harus secepatnya dikikis habis sampai ke akar-akarnya demi teramankannya jalannya revolusi, demi terlaksananya azimat revolusi setra terpenuhinya Amanat Penderitaan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

1. Memutuskan kepada Presiden Panglima Tertinggi ABRI/ Pimpinan Besar Revolusi agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya membubarkan Partai Komunis Indonesia., Pemuda Rakyat, Gerwani, Serikat Buruh Pekerja UMUM/ SOBSI serta Ormas lainnya yang ikut serta mendalangi dan bekerjasama dengan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.
2. Memohon kepada Presideen Panglima Tertinggi ABRI/ Pimpinan Besar Revolusi agar mencabut ijin terbit untuk selamalamanya semua surat kabar/media publikasi lainnya yang langsung atau tidak langsung telah membantu apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.
3. Menyerukan segenap umat Islam dan segenap kekuatan revolusioner lainnya untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada ABRI di dalam usahanya untuk melaksanakan perintah Presiden Panglima Tertinggi ABRI/ Pimpinan Besar Revolusi menyelesaikan / menertibkan kembali segala akibat yang ditimbulkan oleh Gerakan 30 September.

1965.

PB Partai Nahdlatul Ulama

PP Muslimat Nahdlatul Ulama

PP Sarbumusi

PP Fatayat

PP Lesbumi

PP. GP Ansor

PB PMII

PP Pertanu

PP Sernemi.

Kalau selama ini PKI hanya melakukan tindakan makar dengan menyerang kelompok agama serta tuan tanah, tetapi sejak dilakukannya Gerakan 30 September itu dengan membentuk Dewan Revolusi, maka PKI telah merebut kekuasaan yang menurut NU tindakan tersebut termasuk *bughat* (berkhianat/ memberontak) terhadap pemerintah yang sah. Sesuai dengan kaidah ahlussunnah wal jamaah yang dipegangi NU maka setiap tindakan *bughat* tersebut wajib diperangi. Tidak lama setelah itu PBNU mengeluarkan instruksi yang menyerukan pada pimpinan NU beserta warganya di semua Wilayah dan Cabang untuk melakukan sembahyang ghaib pada jenderal yang menjadi korban PKI.⁸⁷

Pernyataan NU yang berani dan penuh risiko itu kemudian secara serentak diikuti oleh partai dan organisasi lainnya. Pernyataan resmi PBNU mengena tuntutan pembubaran PKI itu diliput dan disiarkan secara luas oleh RRI dan surat-surat kabar baik nasional maupun internasional ke segenap penjuru dunia. Kalangan politik di dalam negeri mendengar tuntutan

⁸⁷ Intruksi ini dikeluarkan pada 9 Oktober 1965 yang ditandatangani oleh Ketua I PNU KH Muh Dachlan. Lihat Asip Nasional RI 31. No.106.

PBNU dan PP Ormas-Ormas-nya agar PKI dibubarkan itu seolah-olah seperti menerima suatu isyarat, bahwa jihad secara terbuka terhadap PKI sudah dimulai. Partai lain dan berbagai ormas lain, kemudian bertubi-tubi mendukung tuntutan PBNU itu, atau mengeluarkan pernyataan tersendiri yang isinya sama dengan isi Statement PBNU. Hal itu terjadi karena sudah lama masyarakat kesal dengan olah PKI. Dengan munculnya berbagai statemen itu posisi PKI makin terpojok.

D. Respon NU Jawa Timur.

Sejak mendengar siaran tanggal 1 Oktober tentang pengambilalihan Dewan Jenderal di Jakarta seluruh bangsa Indonesia mengalami kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk NU di Jawa Timur, lalu di tengah ketidakpastian itu mereka mengadakan pertemuan di PCNU masing-masing pada tgl 1 Oktober itu. Hal itu terjadi di PCNU Trenggalek, Blitar, Malang, Tulungagung, Kediri, Jombang dan sebagainya. Pada umumnya mereka menduga keras bahwa pelakunya adalah PKI, karena itu mereka juga selalu siaga secara fisik. Bahkan kalangan TNI sendiri dari Kodim Trenggalek, yang sempat menghadiri pertemuan PCNU dan Ansor di Trenggalek malah menanyakan keterlibatan NU dalam Dewan Revolusi sebagaimana yang diumumkan. Kodim juga baru menduga pelakunya PKI, karena itu meminta para ulama untuk siaga menghadapi serangan PKI.

Kemudian PWNU Jawa Timur di Surabaya pada 3 Oktober mengumpulkan seluruh Pengurus Cabang NU yang ada di Propinsi itu, untuk membahas situasi yang tidak menentu itu, sambil menunggu pengumuman dari PBNU di Jakarta. Bagi para ulama dan aktivis Ansor yang sudah berpengalaman menghadapi manuver PKI itu. Merekapun berkesimpulan dengan pasti bahwa pelaku Gerakan 30 September dan penggagas Dewan Revolusi itu adalah PKI. Namun demikian mereka masih penuh menunggu adanya informasi dan komando dari PBNU di Jakarta.

Baru setelah menerima pernyataan PBNU beserta seleluruh ormasnya itu masa Ansor terutama pasukan Banser

sudah bergerak terlebih dahulu mengadakan pembersihan terhadap para tokoh PKI. Pasukan Ansor dan Banser bergerak sendiri secara cepat dan melakukan penangkapan terhadap para tokoh PKI yang ada di daerah mereka. Dari rumah para Pimpinan PKI setempat telah menemukan setumpuk Dokumen PKI, satu di antaranya yang terpenting adalah rencana penangkapan dan pembunuhan atas diri sejumlah tokoh NU. Langkah cepat itu ditepuh dengan alasan sebelum PKI sempat melakukan penyerangan maka Ansor dan Banser sebagai penjaga ulama dan bangsa harus bertindak lebih dahulu.

Apa yang diperkirakan PP GP Ansor benar di daerah yang mayoritas PKI seperti Banyuwangi pada tanggal 6 Oktober, anggota-anggota PKI secara mendadak mengadakan pengepungan dan pembunuhan terhadap para anggota Ansor. Sebelum Ansor melakukan serangan maka pihak PKI berinisiatif melakukan serangan terlebih dahulu, akibatnya Ansor menjadi korban untuk kesekian kalinya. Karena Ansor juga siaga maka terjadi perkelahian yang seru, tetapi karena persiapan dan perlengkapan kurang, maka dalam serangan itu. 40 orang anggota Ansor Banyuwangi telah gugur seketika itu juga. Peristiwa di Banyuwangi yang telah meminta korban sekian banyak anggota ANSOR ini dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru daerah Jawa Timur dan Bali. Gerakan Pemuda ANSOR diseluruh Jawa Timur dan Bali kemudian bersiap-siaga, untuk mencegah jangan sampai pengalaman pahit di Banjuwangi itu sampai terjadi di daerah lain.

Kemudian di Trenggalek pemuda Ansor Banser bersama aparat keamanan setempat serta DPRGR yang non PKI memecat Bupati Trenggalek yang berasal dari PKI Sutomo Bk, kemudian menggantinya dengan salah seorang pegawai Pemda yaitu H Hardjito. Dengan adanya Bupati baru yang non PKI itulah Ansor bisa bekerja leluasa memberikan keterangan yang sebenarnya tentang situasi, sehingga kekuatan anti PKI semakin bertambah untuk menghadapi PKI yang masih mempertahankan posisinya. Dalam situasi genting ini seorang Anggota Kodim dibunuh PKI, sehingga suasana menjadi makin genting.

Sama halnya Banser Blitar segera mengadakan Apel Akbar yang dihadiri sekitar 10.000 orang dengan membawa senjata tajam memadati alun-alun dan jalan raya kota itu. Dengan adanya apel itu nyali PKI beserta nevennya menjadi kecil hati, pegawai kantor serta guru PKI tidak ada yang berani mengajar. Sementara itu Sumarsono Bupati Blitar dari PKI yang dikenal sangat kejam dan mendalangi berbagai aksi sepihak dan penghinaan terhadap agama itu melarikan diri ke luar kota, tetapi kemudian tertangkap dan langsung dibantai oleh Banser. Begitu juga ketua DPRD nya yang gembong PKI ditangkap oleh ABRI.

Untuk memperluas upaya membendung gerakan PKI itu maka pad 4 Oktober 1965 itu H Subchan ZE Ketua IV PBNU membuat rintisan berdirinya Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu (KAP Gestapu), diketuai sendiri dan Sekjenya Harry Tjan Silalahi dari Partai Katolik dan melibatkan pemuda dari berbagai agama dan partai politik serta mahasiswa yang ada. Kesatuan ini didukung oleh tujuh partai politik, tiga ormas dan 130 organisasi lain⁸⁸. Sehingga cakupannya cukup luas. Nama Kesatuan itu sendiri telah begitu tegas sebagai organisasi yang hendak menghapus PKI dari bumi Indonesia. Dan semua partai politik beserta ormas termasuk organsai mahasiswa memang sepakat untuk menyingkirkan PKI dari Republik ini. KAP Gestapu ini segera melakukan serangan pada berbagai aset PKI termasuk membakar gedung CC PKI di Jalan Kramat Raya dan asset PKI lainnya.

Berdirinya KAP Gestapu ini juga dilanjutkan dengan berdirinya Front Pancasila yang dipimpin Oleh Subchan ZE dan Harry Tjan Silalahi, tujuan berdir Front ini antara lain; *Pertama*, adalah untuk memepertahakan Pancasila sebagai ideologi negara; *Kedua*, menuntut dibubarkannya PKI dengan segala neven organisasinya, yang berafiliasi dan mendukungnya; *Ketiga*, menuntut dilarangnya ajaran Marxisme, Leninisme di bumi

⁸⁸ Arief Mudatsir Mandan, *Subchan ZE Sang Maestro*, Penerbit yayasan Indonesia Satu, Jakarta, 2001, hal., 44.

Indonesia; *Keempat*, Memebersihkan orang PKI dari pemerintahan, angkatan bersenjata dan badan usaha; *Kelima*, menggalang seluruh kekuatan bangsa Indonesia dalam waktu singkat Fron Pancasila ini sudah berdiri dan bergerak di berbagai daerah terutama yang ada PC NU nya.⁸⁹

Di Jakarta sendiri PKI tidak dibiarkan melakukan serangan, melainkan diserang lebih dulu oleh Banser. Pada 13 Oktober rumah seorang tokoh BTI di Grogol beserta segala isinya itu dibakar oleh masa. Di Surabaya pasukan Banser menyerang perkampungan PKI di Karangrejo, untung mereka segera lari menyelamatkan diri, sehingga tidak jatuh korban, hanya saja rumah mereka dibakar oleh masa.⁹⁰

Dalam berbagai penggerebekan ke kantor dan rumah tokoh PKI, maka di situ semakin jelas bahwa PKI-lah yang mendalangi dan melaksanakan Gestapu itu, maka ketegangan yang sudah memuncak itu menjadi sangat memuncak. Suasana saling mengincar terjadi antara massa PKI data masa NU, terutama Banser. Dalam suasana demikian ini, tiba-tiba di banyak tempat diketemukan dokumen-dokumen yang isinya antara lain sebuah daftar tokoh-tokoh penting setempat, seperti Komandan Kodim, Bupati, para tokoh NU serta para Ulama yang akan dijadikan sasaran pembunuhan.

Selain tumpukan dokumen, dibeberapa tempat diketemukan pula berbagai macam senjata tajam, seperti panah beracun, golok dan senjata milik PKI. Juga banyak sekali lobang yang disiapkan untuk mengubur mayat para tokoh yang akan dibunuh itu. Dengan diketemukannya berbagai dokumen dan persenjataan itu, semakin membuat kemarahan masyarakat. Masa NU/ANSOR berhadapan dengan kenyataan bahwa para pemimpin mereka akan dibunuh oleh PKI. Daftar-Hitam sudah diketemukan. Juga berbagai macam senjata yang hendak dipergunakan untuk pembunuhan itu

⁸⁹ Ibid, hal. 212.

⁹⁰ Agus Sunyoto, *Banser jihad Melawan PKI* , hal. 110.

sudah berhasil mereka rebut dari tangan para tokoh PKI atau dari Kantor PKI. Dalam situasi yang demikian, maka tercipta suasana pelik : Menyerang, menangkap dan membersihkan anggota PKI dan seluruh Ormas-nya terlebih dahulu, atau sebaliknya yaitu mereka sendiri yang diserang, ditangkap dan dibersihkan oleh orang PKI sendiri.

Khusus di Jawa Timur pada waktu meletusnya Gestapu pada awal bulan Oktober 1965, di sana hanya ada sekitar 4 batalion infanteri dari Angkatan Darat. Kekuatan Divisi Brawijaya sebagian besar bertugas ke daerah operasi diluar Jawa. Sudah barang tentu, kekuatan militer yang sedikit ini tidak cukup untuk menghancurkan PKI di wilayah Jawa Timur. Maka bagi massa NU dan Ansor tidak ada pilihan lain kecuali harus bertindak sendiri, sebab menunggu tindakan ABRI berarti membuang waktu yang memberikan keuntungan kepada PKI, baik untuk mengkonsolidasi diri atau untuk menyerang terlebih dahulu.

Melihat situasi seperti itu maka dibentuk kerjasama antara Korem dan Kodim, maka diaturlah strategi serangan massa NU dan Ansor di depan dan ABRI di belakang, mulailah mereka menyerang, menangkap dan membersihkan PKI di seluruh Jawa Timur. Pada bulan Oktober dan Nopember 1965, berlangsunglah suatu kampanye pembersihan terhadap anggota-anggota dan masa PKI di seluruh Jawa Timur dan di Bali. Kampanye ini dihentikan setelah batalion Brawijaya kembali ke-Jawa Timur, dan atas instruksi Jenderal Sumitro Pangdam VIII/Brawijaya. Pembersihan PKI itu dilakukan oleh pihak TNI dengan demikian peran NU dan Ansor bergeser. Kalau pada bulan Oktober dan November Ansor berbaris di depan, sementara TNI/AD berjalan di belakang, kemudian berganti posisi. Ansor berbaris di belakang, sedang TNI berjalan di muka. Dengan kerja yang serentak seperti itu maka pada bulan Desember 1965 hingga Januari 1966, kekuatan PKI di Jawa Timur dan Bali praktis mengalami kemerosotan. Pimpinan dan kader serta anggota mereka satu persatu dilumpuhkan, akhirnya kekuatan yang masih tersisa melarikan diri ke daerah pedalaman.

E. Respon NU Bali Terhadap Keputusan PBNU

Berita terjadinya Kudeta PKI 30 September 1965 itu sangat mengejutkan terutama dari kalangan NU di Bali, terutama ketika mendengar keputusan PBNU yang pada tanggal 1 Oktober 1965 ini sudah membuat pernyataan bahwa PKI melakukan pemberontakan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat Resolusi untuk pembubaran PKI pada 5 Oktober 1965 yang disiarkan melalui RRI yang tentu saja didengar oleh semua pihak terutama PKI. Kenyataan ini yang sangat mengkhawatirkan para pimpinan NU di Bali khususnya di Jembrana, di mana posisi mereka minoritas, sementara harus berhadapan dan membubarkan kelompok PKI yang posisinya mayoritas⁹¹.

Tidak sedikit kalangan pengurus NU di Bali yang melihat ini keputusan yang sangat kontroversial dan bisa menjadi malapetaka bagi umat Islam Bali, warga NU Bali akan dijadikan korban dan tumbal dari keputusan tersebut. Melihat kenyataan seperti itu akhirnya pimpinan NU Cabang Jembrana intensif melakukan kontak dengan Kodim setempat. Sementara itu di lingkungan pimpinan NU dan Pesantren seperti Pesantren Syamsul Huda, Pesantren Darut Ta'lim, Pesantren Mambaul Ulum dan sebagainya disiagakan penuh untuk menjaga keamanan terutama menjaga para tokoh agama.⁹²

Pada suatu ketika Agung Kupit seorang tokoh Pemuda Rakyat-PKI mendatangi Adnan Arham, Pimpinan Ansor Jembrana menggeledah tas dan saku bajunya, tetapi tidak ditemukan senjata api atau senjata tajam. Lalu dengan setengah mengancam meminta pada pimpinan Ansor itu: *Soal Jakarta kita tidak perlu ikut-ikutan, mari kita jalin kekeluargaan saja*. Rupanya PKI tidak ingin Ansor melaksanakan perintah PBNU. Padahal saat itu Pemuda Rakyat sudah mulai siaga menjaga setiap kemungkinan,

⁹¹ Wawancara dengan H Damanhuri Ketua Ansor jembrana tahun 1962-1966.

⁹² Wawancara dengan Adnan Arham, April 2013.

sehingga Ansor juga terus bergerak mengabaikan ajakan tokoh PKI itu. Walaupun terjadi ketegangan tetapi belum terjadi perang terbuka hingga akhir Oktober 1965, karena masing-masing belum tahu apa yang akan terjadi dan saling menimbang kekuatan lawan.

Tetapi begitu memasuki 1 November 1965 situasi berubah, ketegangan telah meletus menjadi pertikaian. Serangan dan ejekan pada komunitas Hindu dan kalangan PNI yang dianggap sebagai kapitalis birokrat telah memuncak menjadi pertikaian. Sejak saat itu terjadi perang terbuka antara NU dan juga PNI dan TNI AD berhadapan dengan PKI. Para Pimpinan PKI, dan anggota dan simpatisan PKI mulai ditangkapi dan dimasukkan kedalam Toko Wong sebuah bangunan kosong di pusat kota Jembrana. Toko itu penuh sesak karena banyak anggota PKI yang dimasukkan. Termasuk Asy'ari kepala desa Loloan Jawa tertangkap dalam penggerebekan itu. Di situlah terjadi pembantaian terhadap semua anggota PKI. Rumah dan kantor PKI dibakar masa, kalangan NU hanya berjaga dan menjadi saksi dari peristiwa tragis tersebut.

Hingga tahun 1965 hubungan masyarakat bawah di beberapa tempat masih harmoni, sebagai contoh dua orang peternak yaitu Sarmin dan Sarman yang berkawan sejak kecil yang satu Islam yang satu Hindu, yang Islam masuk Partai NU yang Hindu masuk PKI. Tetapi perbedaan Partai itu mengganggu hubungan sehari-hari mereka sebagai penyabit rumput, mereka terbiasa melakukan perjalanan jauh untuk mencari rumput, dan di sela itu berbicara berbagai hal termasuk bicara soal partai tetapi hanya dari sudut pandang mereka yang sangat awam.

Suatu ketiga keduanya bertemu dalam suatu ladang untuk menyabit rumput, ketika tengah menyabit si Putu bergegas pulang duluan walaupun hari masih siang dan rumput yang diperoleh belum banyak, sehingga menjadi tanda tanya buat si Sarmin; *“Kenapa kamu pulang duluan” Ya Karena saya akan ikut jaga*

rapat PKI di rumah Pan Santun nanti jam 5 sore, sehingga sekarang harus pulang.”⁹³

Rupanya Sarmin menanggapi cerita itu bukan sebagai informasi biasa, tetapi sebuah informasi penting adanya rencana pembantaian, sebab di Jakarta dan di kota sudah banyak terjadi pembunuhan antara PKI dan Non PKI. Melihat gelagat itu Sarmin juga ikut pulang lalu melintas di dekat rumah Pak Santun yang ternyata banyak sepeda diparkir di sekitar rumah anggota Polisi yang menjadi aktivis PKI itu. Sarmin segera tergerak untuk melaporkan terjadinya rapat rahasia itu kepada pimpinan NU dan Ansor di kampungnya.

Selanjutnya Pimpinan NU melaporkan adanya rapat itu ke pihak Kodim setempat, maka bersama dengan Sarmin beberapa aktivis NU dan dua orang tentara dari Kodim mereka mendatangi rumah Pak Santun untuk menghentikan rapat gelap itu. Kebetulan rapat masih berlangsung, sehingga aktivis NU dan kalangan tentara yakin betul bahwa rapat gelap memang benar adanya, lalu mereka diingatkan. Tetapi peringatan itu tidak digubris malah Siregar Komandan Kodim itu ditembak oleh Santun dengan pistol ke arah dadanya, sehingga membuat tentara ini tewas seketika. Di sisi lain PKI juga berhasil menembak dua orang aktivis pemuda Ansor yang ikut membubarkan pertemuan itu. Akhirnya terjadi baku tembak dan saling menyerang, kemudian pertemuan itu bubar. Dua orang anggota Ansor yaitu Arifin dan Suparmin gugur dan seorang TNI menjadi korban. Ketiganya dimakamkan di Makam Pahlawan, terbunuhnya aktivis Ansor dan anggota TNI itu membuat situasi politik di Bali semakin tengang.

Mulai saat itu Ansor dan NU yang selama ini hanya diam dan berjaga-jaga mulai aktif melakukan pembalasan. Beberapa rumah yang terdapat gambar PKI diserang dan anggota PKI yang tertangkap diserahkan pada aparat keamanan. Suatu ketika di daerah perbatasan Loloan Timur, pusat pemukiman umat Islam ditemukan puluhan jirigen berisi bahan bakar yang akan

⁹³ Wawancara dengan Adnan Arham.

digunakan oleh kelompok PKI untuk menyerang Loloan Timur dan Loloan Barat pusat Umat Islam Jembrana. Kenyataan itu membuat kalangan Ansor makin waspada, pada umumnya mereka tidak ada yang berani tidur di rumah, biasanya tidur dikantor, di sawah atau di kuburan atau tempat yang aman seperti di kantor. Situasi itu membuat Ansor juga makin agresif dalam melakukan penggerebekan pusat pertahanan PKI.⁹⁴

Serangan balik pada PKI dilakukan di berbagai tempat, sehingga mengakibatkan terjadinya pembantaian. Pembantaian ini merupakan reaksi langsung dari masyarakat, kelompok agama dan beberapa partai politik yang selama ini telah diteror bahkan menjadi korban kekejaman PKI dalam menerapkan kebijakan partainya, sehingga rakyat dan kelompok lain menjadi sasaran.

Walaupun jumlah warga NU terutama Ansor tidak begitu besar, jauh lebih kecil dibanding PKI, tetapi karena telah menang secara mental, maka ia dapat menaklukkan PKI hanya dengan membawa rotan. Pernah suatu ketika 22 orang Anggota Ansor yang hanya bersenjatakan tongkat rotan berhasil menangkap 250 orang anggota PKI, mereka hanya dibariskan tanpa diikat tetapi menurut saja dengan komando Ansor, lalu diserahkan ke TNI. Para tawanan PKI itu meminta pada Ansor agar pada Pemuda PNI atau TNI atau lebih senang kalau yang membunuh Ansor saja mereka ikhlas. Tetapi Ansor tetap menyerahkan pada TNI karena ini masalah dan tanggung jawab aparat Negara.⁹⁵ Tetapi karena penjara yang ada sudah tidak muat, maka kemudian anggota PKI tersebut dibebaskan dengan berjanji tidak akan melakukan pembalasan, bahkan sebagian mau kembali ke Islam. Akhirnya mereka bebas, hanya ada beberapa pimpinanya kemudian ditangkap dan diadili dan dipenjarakan oleh TNI.

⁹⁴ Lihat, Andan Arham, *Gerakan 30 November/PKI*, naskah yang belum diterbitkan.

⁹⁵ Peristiwa itu juga terkonfirmasi dalam wawancara dengan H Damanhuri, mantan Ketua GP Ansor..

Sebenarnya pemegang peran utama dalam konflik dengan PKI di Bali ini adalah kekuatan PNI sebagai kelompok mayoritas yang didukung TNI, semenmtara kalangan NU dan khususnya Ansor hanya turut membantu itupun di daerah yang penduduknya Muslim seperti di Negara, Kabupaten Jembrana. Tetapi karena memiliki konteks nasional yang cukup kuat yakni dengan PBNU di Jakarta, sehingga baik kalangan TNI, PNI bahkan PKI sendiri sangat segan terhadap keberadaan NU di Bali. Menurut pengakuan H Damanhuri kenapa hanya sepuluh sampai dua puluh orang Ansor bisa menaklukkan sampai ribuan orang PKI, tidak lain karena para pasukan Ansor ini mendapat ijazah ilmu kesaktian dari Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbonda. Bagi yang mengamalkan wirid yang diberikan Sang kiai itu seorang Ansor bisa kelihatan seribu⁹⁶, hal itu membuat PKI gentar menghadapinya, sehingga mudah ditaklukkan.

F. Respon NU Sumatera Utara Terhadap Keputusan PBNU

Resolusi yang dikeluarkan PBNU tentang pembubaran PKI beserta seluruh underbouw nya telah diterima para pimpinan NU Sumatera Utara yang saat itu diketuai oleh H Nuddin Lubis pada hari itu juga melalui siaran RRI dan kemudian dilengkapi dengan telegram. Tetapi para pimpinan NU Setempat masih mempelajari seruan tersebut. Jelas bahwa dalam Resolusi itu hanya berisi seruan untuk membubarkan PKI, bukan untuk membantai PKI. Tetapi karena PKI telah melakukan percobaan kudeta maka PKI dianggap telah berkhianat terhadap Negara apalagi setelah mendengar khabar kalanagan NU di Jakarta telah mendirikan KAP Gestapu serta Front Pancasila maka semakin jelas bagi NU Sumater Utara apa yang harus dilakukan dalam upaya melakukan aksi pengganyangan PKI.

Dalam situasi yang tidak menentu seperti itu Amat Johar Nuri seorang tokoh PKI mendatangi tokoh NU KH Hasan Basri

⁹⁶ Wawancara dengan H damanahuri, Ketua Ansor Jembrana Bali.

Batubara untuk mengajak melakukan kesepakatan dengan mengatakan:

“Kalau langit Medan ini memerah Abang jangan kejar dan bantai saya, sebaliknya kalau PKI menang Abang tidak akan saya kejar dan saya bantai. Kita berkawan saja”⁹⁷

Mendengar ajakan itu KH Hasan Basri diam saja, karena tidak mungkin melakukan perjanjian dengan PKI yang kebohongan dan pengkhianatan telah menjadi kebiasaan sehari-hari karena itu tidak ada gunanya dan tidak bisa dipercaya.

Setelah situasinya sudah serba jelas, maka sekitar tanggal 12 Oktober 1965, NU dengan segenap *anderbouwnya* seperti Ansor, Banser, PMII, IPNU dan IPPNU serta Muslimat dan Fatayatnya semuanya bergerak turun ke jalan dan berkumpul di lapangan Benteng yang menuntut pemerintah agar segera membubarkan PKI. Di sana juga berkumpul ormas dan organisasi lain yang memiliki aspirasi sama. Dari lapangan Benteng itulah kemudian mereka bergerak menuju kantor Sekretariat PKI di jalan Sultan Iskandar Muda. Lalu secara spontan masa membakar kantor PKI tersebut hingga musnah selama-lamanya.

Saat itu banyak kalangan TNI yang berorientasi PKI, sehingga bagi NU susah memilah, tetapi ada beberapa yang memang dikenal sangat Islami, simpatisan NU dan anti PKI antara lain Mayor Nur Nasution, tentara dari Kodam Bukit Barisan itu banyak membantu pada aktivis NU, bahkan meminjamkan beberapa senjata api untuk melindungi diri. Beberapa petinggi militer yang PKI antara lain Untung Sitepu menjadi incaran masyarakat. Sementara itu ada anggota TNI seperti Let. Kol. Latif Mangundiharjo dari Kodim 0206 yang menjadi tokoh PKI tapi selalu menyembunyikan identitasnya, bahkan untuk menutupi identitasnya itu dia tega menembak Hayat Sait Ketua PKI Labuhan Batu, agar dia dianggap bukan PKI. Tetapi Akhirnya identitas aslinya Latif ketahuan oleh atasannya,

⁹⁷ Dalam kenyataannya Amat Johar Nuri ini bisa lolos dari pembantaian, kemudian melarikan diri ke Jakarta dengan mengubah identitasnya.

kemudian ia segera dibebastugaskan dan diseret ke Jakarta serta dihukum di sana.

Saat itu di Medan juga muncul kekuatan anti PKI yang menamakan diri sebagai Pemuda Pancasila, sebagai penjelmaan dari Front Pancasila. Organisasi yang didirikan oleh H Effendi Nasution itu segera bergandeng tangan dengan kekuatan anti komunis lainnya baik NU atau Tentara. Dengan bekerja sama dengan pasukan TNI yang tersisa itu NU melakukan serangan terhadap perkampungan PKI baik di Kampung Kolam dan tempat lainnya, sehingga PKI ketakutan dan tidak berani lagi menampakkan diri. Saat itu diperkirakan korban sekitar 4000-an orang di Labuhan Batu dan Langkat. Selainnya tidak dibunuh karena menyerahkan diri tidak melakukan perlawanan. Mereka ini mudah dikembalikan karena mereka ikut PKI karena terpaksa atau terkecoh dengan janji mendapatkan tanah, atau ditipu sekadar didaftar saja tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.⁹⁸

Serangan terhadap pusat-pusat kegiatan PKI juga dilakukan di Kota lain di luar Medan seperti yang terjadi di Binjai pada 15 Oktober 1965, Pemuda Ansor beserta kelompok lainnya pelajar dan mahasiswa menyerang Kantor PKI dan kantor organisasi sayap kirilainnya termasuk Baperki dihancurkan dan dibakar hingga habis, yang nyaris tanpa perlawanan. Penyerbuan terhadap kantor PKI dilakukan juga oleh para pemuda di Tanjung Balai, Asahan dan sebagainya. Hampir semua serangan itu dijalankan tanpa perlawanan berarti. Baru dalam serbuan yang dilakukan oleh sekitar 500 orang Pemuda dan pelajar ke Kantor PKI Sumatera Utara di Medan, mendapatkan perlawanan dari PKI, sehingga terjadi bentrokan seru. Dalam bentrokan itu empat orang anggota PKI tewas dan 17 lainnya mengalami luka-luka. Beberapa perabot serta kendaraan bermotor milik PKI dibakar oleh masa.⁹⁹ Selain itu banyak pembantaian dilakukan oleh rakyat

⁹⁸ Wawancara dengan H Yaskuri, aktivis NU Sumatera Utara.

⁹⁹ Lihat Agus Sunyoto, *Banser jihad Melawan PKI*, hal. 116. Dan Wawancara dengan KH Hasan Basri.

secara sporadis yang dipicu oleh berbagai persoalan kemasyarakatan, soal agama soal tanah dan soal politik yang bersifat horizontal sehingga menimbulkan banyak korban.

G. Serangan Balik PKI

Walaupun tidak ada komando dari pusat, tetapi kekuatan PKI di berbagai daerah terus melakukan perlawanan bahkan melakukan serangan balik. Di Kediri setelah beberapa pimpinan PKI berhasil dibunuh Banser, maka kelompok PKI sesumbar akan melakukan pembalasan. Anacam itu betul-betul dilaksanakan secara membabi buta, dua orang santri yang sedang dalam perjalanan dicegat oleh kawan PKI, seorang yang bernama Imam Mursyid disiksa lalu dibunuh dan badannya disayat-sayat. Sementara temannya Zainuddin seorang anggota Banser diikat tangannya lalu dikubur hidup-hidup. Setelah itu beberapa rumah tokoh NU diserang untung penghuninya sudah lama mengungsi sehingga selamat dari pembantaian PKI.

Pondok Ploso Mojo Kediri pimpinan KH Djazuli sejak menjelang September 1965 telah terus diteror PKI, sehingga santri yang mula jumlahnya 600 orang tinggal 22 orang. Kecamatan Mojo dan Kecamatan Keras merupakan mayoritas PKI. Dalam kondisi terjepit semacam itu PKI kecamatan Keras menyerbu Pesantren di siang hari, tetapi segera diketahui oleh para intelejen santri, karena K Djazuli menyiapkan 19 orang santrinya untuk menghadang saat PKI menyeberang sungai sementara santri yang lain menjaga pesantren dan melindungi Kiai. Setelah 19 orang santri yang dipimpin K Ghozali Burdah itu digembleng diberngaktkan menghadang ribuan PKI yang menyerang mereka, sehingga terjadi perang yang tidak seimbang. Kawan PKI bersenjatakan panah dan bom molotof. Tetapi 19 santri itu lolos dari hujan panah dan api, akhirnya ribuan pasukan PKI bisa dipukul mundur. Dalam pertempuran itu anggota PKI yang tewas delapan orang. Sejak kekalahan itu PKI tidak lagi menyerang Pesantren Ploso.

Tidak lama kemudian dari arah selatan dan barat pasukan PKI dari Jurang Wuluh yang berbasis di Pabrik Karet bergerak menyerang Pesantren Ploso, tetapi K Djazuli menggembelng kembali 19 orang santrinya itu untuk menghadapi mereka. Maka terjadi pertempuran di Kaki Gunung Wilis. Pertempuran tidak seimbang terjadi 19 orang itu menghadapi ribuan pasukan PKI yang bersenjatakan panah dan bom molotof. Setelah berperang selam setengah harian, kembali 19 santri tetap terbebas dari hujan panah dan api bahkan berhasil mendesak mereka dan berhasil merebut markas mereka Pabrik karet yang berada di tengah perkebunan itu. Dalam serangan itu Letnan Sunaryo Komandan Ramil Mojo ikut dengan membawa senjata api, tidak berdaya menghadapi ribuan masa, tetapi hanya di belakang sambil geleng-geleng kapala melihat kekuatan 19 santri yang hanya bersenjatakan pedang mampu melumpuhkan ribuan PKI. Sekitar 11 orang anggota PKI tewas dan tak terhitung yang terluka dalam bentrokan itu, karena hanya pimpinannya yang ditarget.¹⁰⁰ Setelah itu PKI tidak berani lagi menyerang pesantren. Kiai Ghazali berkesimpulan bahwa senjata paling ampuh dalam menghadapi musuh adalah keberanian.

Di Besuki sekawanan PKI berencana melakukan seranagan terhadap jamlah NU yang sedang melaksanakan tahlilan, tetapi rencana itu terendus oleh Banser. Ketika mereka hendak melakukan sergapan kemudian Banser melakukan serangan duluan. Di situlah terjadi pertarungan, PKI telah menyiapkan berbagai macam senjata termasuk bola-bola yang diisi cairan cuka dan cabe. Tetapi senjata itu tidak mempan pada Banser, akhirnya kawanan PKI yang terdiri dari pemuda Rakyat dan Gerwani itu ditawan oleh Ansor, kemudian dibunuh, yang lainnya melarikan diri.

Di Jombang PKI menyelenggarakan pameran senjata di alun-alun, tetapi para kiai sudah tahu bahwa pengumpulan senjata tersebut untuk menghabisi para kiai, karean sejak 14 tahun yang lalau K

¹⁰⁰ Wawancara dengan KH Ghazali Burdah, pemimpin pasukan santri,

Chalik Hasyim dari Tebuireng telah menyelundupkan santrinya masuk ke dalam jajaran pengurus Komite Seksi (CS) PKI Kabupaten Jombang, sehingga tahu apa yang dilakukan PKI. Ketika pameran senjata itu di buka, maka KH Chalik Hasyim dengan pasukannya segera mengorbak-abrik pameran tersebut hingga bubar. Dengan demikian rencana PKI membantai para Kiai besar yang ada di Jombang juga urung.

Rombongan Banser yang mau melakukan razia ke Karangasem tercium oleh PKI, lalu dibuatlah jebakan, para Gerwani yang didandani dengan pakaian Muslimat lengkap dengan kebaya dan kerudung, demikian pula PKI menggunakan pakain santri lengkap dengan sarung dan kopyah. Di markas mereka juga dikibarkan bendera NU. Rombongan Banser yang menaiki truk itu ditawarkan istirahat makan dan minum di markas mereka. Dengan tanpa curiga semua makan dan minuman dihabiskan, saat itu pula mereka satu persatu terkapar, karena makanan dan minuman yang diberikan telah diberi racun. Para Banser yang belum sempat minum segera melawan tetapi segera dilumpuhkan. Dari kejadian itu 93 orang anggota Banser menaaji korban, hanya seorang yang selamat kemudian melaporkan kejadian itu pada Ketua Ansor dan Kodim setempat.

Masih di Banyuwangi sarangnya PKI itu, ketika rombongan pawai Banser melewati suatu daerah yang rupanya sudah menjadi kawana PKI, padahal daerah itu sudah diblokade PKI, maka ketika truk rombongan banser lewat kemudian pohon yang ada dipinggir jalan dirobuhkan sehingga truk tidak bisa terus, ketika hendak balik pohonpun sudah ditumbangkan sehingga terjebak sehingga langsung diserang gerombolan PKI, dalam kondisi terpojok itu pasukan Banser berhamburan akhirnya dengan mudah dihabisi oleh PKI. Korban dalam peristiwa ini sebanyak 62 orang. Sehingga total korban dua kali serangan itu sudah mencapai 115 orang, yang ini sangat dimanfaatkan oleh PKI untuk membangun kekuatan kembali. Sebaliknya bagi kalangan NU musibah ini dijadikan alat untuk mengobarkan semangat perlawanan pada PKI yang hendak bangkit kembali.

Ketika pada 12 Oktober 1965 Banser Kediri menggelar Apel dan karnaval dengan bersenjata lengkap itu tiba-tiba diserang oleh PKI di Burengan dengan berbagai senjata berbahaya seperti cairan kimia yang disemprotkan ke arah pawai banser yang sedang bergerak dari arah selatan menuju ke utara. Tiba tiba angin yang semula mengarah ke utara berbalik arah ke selatan sehingga barisan Banser selamat semenmtara semprotan bahan kimia itu mengenai PKI sendiri. Kemudian sekelompok PKI yang lain menyerang dengan batu dan bambu runcing serta senjata tajam lainnya. Pihak Banser yang telah bersenjata lengkap itu menghadapi serang PKI dengan gagah berani sehingga terjadi perang dahsyat di anantara keduanya.

Tetapi karena pihak Banser banyak yang *jaduk* (kebal) dengan kedigdayaan yang tinggi banyak yang tidak mempan dibacok akhirnya satu persatu kawan PKI yang jumlahnya puluhan orang itu bisa dilumpuhkan. Bahkan para pendekar andalan PKI yang dibanggakan itu dengan mudah ditaklukkan Bintoro seorang Komanadan Banser. Kantor PKI Kediri yang kebetulan ada di sampingnya itu dibakar, sehingga anggota PKI berlarian ke desa lain. Di sanapun mereka sudah dicegat Banser yang telah lama berjaga disetiap sudut kota dan pelosok desa. Komandan Banser Kediri sendiri, Makrufin mengakui bahwa akibat adanya gembengan maka para Banser yang apel di alun alun Kediri itu tidak mempan dibacok dan tumbuh keberanian dalam menghadapi lawan yang lebih kuat, bahkan pihak TNI pun berdecak kagum melihat keberanian para anggota Banser itu.¹⁰¹

Serangan balik PKI pada NU dan juga aparat keamanan terus dijalankan secara seporadik bahkan langkah ini terus dijalankan hingga tahun 1967 - 1968, yang ternyata dikomando dari Blitar selatan. Di berbagai daerah para ulama masih menjadi incaran, dua ulama terkemuka Bojonegoro yaitu KH Abdul Fattah dan KH Tasrifin dibunuh PKI, sementara itu Kepala Desa Prampon Tuban juga dibunuh oleh gerobolan PKI. Dan banyak peristiwa lainnya

¹⁰¹ Agus Sunyoto, *Banser Jihad Melawan PKI*, hal. 136.

yang dilancarkan sisa-sisa laskar PKI. Serangan PKI ini dilakukan secara sporadik dengan modus perampokan dan penculikan, tetapi yang menjadi korban keseluruhannya adalah para pimpinan NU yang jumlahnya mencapai puluhan orang.¹ Padahal saat itu kalangan NU telah mulai memberikan santunan pada para korban PKI terutama para janda dan anak yatim mereka.

Terjadinya berbagai konflik antara PKI dengan NU terutama Banser itu membuat Bung Karno sangat marah. Suatu ketika Presiden memanggil Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid dengan mengatakan, "Kenapa NU gontokgontokan dengan PKI", "NU tidak Gontok-gontokan tetapi NU diserang PKI lalau NU ganti membalas, kalau NU tidak diserang NU tidak akan membalas. Tetapi kalau digontok dan dikasari maka NU akan bertindak kasar dan siap gontok-gontokan. Demikian jawab Idham Chalid dengan tegas, karena merasa benar dan bertindak adil.

H. NU Sebagai Kekuatan Utama

Sejak memasuki dasawarsa 1960 NU tampil sebagai imamnya umat Islam, terutama sejak dibubarkannya partai Islam besar Masyumi, maka setelah PKI dilumpuhkan dan PNI juga kehilangan daya setelah G-30 S/PKI maka NU menjadi kekuatan politik nasional terkemuka. Hal itu ditunjukkan NU saat menyelenggarakan Harlah NU yang ke-40 di Jakarta sehabis penumpasan G30S/PKI yang dihadiri oleh NU dan terutama pasukan Banser dari seluruh Indonesia yang memadati Jakarta. Harlah yang dihadiri oleh Bung Karno itu berjalan dengan tertib dan aman, sehingga menunjukkan bahwa NU menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik dan bagi terjaminnya keamanan nasional.

¹⁰² Lihat *Daftar Nama Warga NU Korban akibat Gerakan G-30-S PKI II, Pembunuhan Penculikan dan Perampokan di Daerah Jawa Timur*. Koleksi Arsip Nasional No. 127. Dalam daftar ini dijelaskan nama serta jumlah harta yang dirampas PKI.

Atas prestasiinya itu Bung karno sangat berharap NU bisa menjadi kelompok yang memelopori kembalinya stabilitas nasional di bawah kepemimpinannya. NU menerima tawaran itu tetapi dengan syarat tanpa melibatkan PKI sebagai pembuat onar dan pelaku subversi. Tetapi Presiden Soekarno belum menerima usul itu, tetap tidak mau membubarkan PKI sebagaimana yang diharapkan oleh NU. Sebagai organisasi yang sangat konsisten anti komunis maka NU terus melakukan kampanye di masyarakat untuk menolak segala bentuk ajaran Marxisme-komunisme. Bahkan pernah suatu ketika diselenggarakan Simposium di IAIN Syarif Hidayatullah yang antara lain mengundang pembicara dari NU yaitu KH Saifuddin Zuhri (menteri Agama) dan KH Muhammad Ilyas (Menteri Penghubung Alim Ulama). Saat itu makalah KH Muhammad Ilyas membahas Bahaya Ateisme terhadap Sila Ketuhanan Yang Mahsa Esa. Dalam tulisannya itu K Muhamamad Ilyas menjelaskan bahwa paham komunisme itu sama dengan ateisme karena sama-sama bersumber pada ajaran Karl Marx, yang tidak dipisahkan satu sama lain, karena itu seseorang yang mengakui ajaran Karl Marx tetapi sekaligus mengaku beragama dan ber-Pancasila, sama halnya dengan orang yang mengaku beragama dan ber-Pancasila tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Ketika Statemen itu membuat marah Presiden Soekarno. Saat itu pula KH Muhamamad Ilyas diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Penghubung Alim Ulama.¹⁰³ Tidak urung KH Idham Chalid dimarahi oleh Bung Karno atas pernyataan Muhammad Ilyas tersebut.

NU selama ini selalu sejalan dengan kebijakan politik Bung Karno baik masalah dalam negeri maupun luar negeri, karena semuanya itu sesuai dengan kaidah dan prinsip politik NU yang bertumpu pada kedaulatan nasional dan kedaulatan rakyat. Tetapi sejak awal pandangan NU berbeda dan bertolak belakang dengan Presiden Soekarno. Dalam hal itu pandangan NU tidak pernah bergeser dan tidak bisa ditawar. Sikap itu yang membuat hubungan NU dengan Bung karno semakin renggang. Kerenggangan NU Bung

¹⁰³ Biografi KH Muhammad Ilyas, hal., 70-80.

Karno itu yang membuat posisi Bung Karno semakin lemah, karena doktrin setengah kelakar dari NU yang berbunyi "*Sukarno tanpa NO akan menjadi Sukar, Bung Karno tanpa NO menjadi Bungkar*". Ketika tidak ada lagi kemitraan antara Bung Karno dengan NU maka posisi Bung Karno goyah, sehingga dengan mudah dijatuhkan oleh TNI yang dipimpin Jenderal Soeharto, yang berusaha keras menghapus PKI. Sementara NU sejak awal telah menuntut pembubaran PKI, karena situasi rumit ini hanya bisa dibenahi setelah tidak ada PKI.[]

BAB V

REKONSILIASI NU-PKI

Melihat paparan di depan menunjukkan bahwa benturan antara NU dengan PKI itu terjadi dalam waktu yang amat panjang, dimulai sejak terjadinya peristiwa tragis pembantaian para ulama dalam Pemberontakan PKI di Madiun 1948. Bahkan bisa dirunut hingga peristiwa sebelumnya yaitu pemberontakan PKI di Pekalongan 1945. PKI secara agresif menyerang NU baik ajaran agamanya maupun merampas asset yang dimiliki baik tanah, hasil pertanian maupun pendudukan dan pembakaran masjid. NU bangkit melawan. Dengan demikian konflik antara NU dengan PKI adalah konflik horizontal, sebuah perang saudara. Penyulutnya bukan pihak ketiga apakah tentara atau inteleijen asing, tetapi langkah PKI itu sendiri. Keduanya memang memiliki ajaran dan strategi yang berbeda yang satu bersikap agresif NU hanya bersifat defensif, perang melawan komunisme hanya untuk membela diri.

Marxisme mengajarkan paham ateisme, kemudian oleh komunisme ajaran tersebut dilaksanakan dalam bentuk anti-ateisme, yang berusaha mengikis segala bentuk kepercayaan pada Tuhan, karena ini merupakan

penghambat menjadikan masyarakat tidak progresif. Sebagai salah satu wujud dari komunisme maka PKI merupakan bagian dari kelompok yang bertujuan menyingkirkan semua kepercayaan agama. Semangat anti agama dengan sendirinya telah terbangun dalam PKI. Apa yang menjadi prinsip PKI tersebut dilaksanakan dalam aktivitas sosial dan politik mereka di Indonesia. Dengan sikap itu maka benturan NU dengan PKI tidak bisa dihindari.

Sementara kalangan NU dalam posisi bertahan dari serangan mereka yang agresif yang tidak hanya menghina Tuhan tetapi juga menduduki dan merusak masjid serta pesantren dan membunuh para kiai selama beberapa dekade. NU menyerang PKI memiliki alasan *syar'i* (teologis) untuk membela dan melindungi ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah, serta alasan *siyasi* (politis) yaitu membela Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Perang menghadapi PKI bagi NU adalah jihad yang wajib dilaksanakan untuk membela Islam dan membela Negara, karena itu tugas tersebut dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Hampir semua tulisan NU menyebutkan bahwa perang melawan PKI merupakan bagian dari jihad.

Karena perang melawan PKI adalah berdasarkan perintah agama dan tugas Negara, ini berarti tindakan yang dilakukan NU tidak didorong adanya rasa dendam antar tokoh atau persaingan antara partai, tetapi betul-betul dilaksanakan atas nama agama dan Negara. NU juga mengeluarkan fatwa bahwa apabila ada PKI yang

telah menyatakan tobat dengan mengucapkan kalimat syahadat maka mereka tidak boleh dibunuh dan harus dipulihkan hak-hak mereka. Sesengit apapun perang, tetapi dendam harus dijauhkan.

Karena itu setelah perang selesai dengan kemenangan pihak NU dan TNI. Sementara kekalahan telak dialami PKI, maka di situ tidak tercermin adanya kebencian, bahwa beberapa pasukan Ansor yang ikut membunuh orang-orang komunis, mereka ikut datang ke rumah mereka melakukan takziah, membacakan tahlilan dan sebagainya inilah yang disebut dengan rekonsiliasi alami, sebuah konflik sosial yang diselesaikan secara sosial. Selain itu juga ada usulan untuk melakukan rekonsiliasi politik, yang menempatkan konflik ini sebagai konflik politik yang bersifat vertikal dan horizontal.

A. Rekonsiliasi Sosial yang Alami

Pertikaian antara NU dengan PKI merupakan konflik sosial yang bersifat horizontal. Benturan antara dua kekuatan sosial yang berbeda keyakinan dan bertentangan ideologi. Tetapi pada dasarnya mereka sebelumnya hidup saling bertetangga, karena itu wajar kalau kemudian se usai konflik tanpa disuruh oleh siapapun terjadi proses rekonsiliasi secara alami di antara mereka sendiri, sesuai dengan tradisi dan norma sosial yang berlaku. Bahkan sebagai tanggung jawab sosial, para korban PKI seperti para janda dan anak yatim, termasuk orang-orang yang salah tangkap, semuanya

disantuni oleh masyarakat NU dan pesantren di mana mereka berada.

Langkah rekonsiliasi itu telah terjadi sejak usainya peristiwa Madiun. Berbagai upaya dilakukan oleh Jamaah NU untuk menyantuni para bekas keluarga PKI bahkan juga orang PKI yang telah menyatakan kembali ke ajaran Islam. Dalam peristiwa Madiun terdapat beberapa tokoh PKI lokal yang tobat dan masuk ke dalam komunitas NU-Pesantren, salah satunya bernama Kadis, tobat mereka diterima, dan mereka menjadi Islam sungguhan, terbukti ketika diuji bisa menjadi ujung tombak pasukan pesantren dalam menghadapi serangan balik Pesindo-PKI dan agresi Belanda di kawasan Ponorogo Trenggalek.¹⁰⁴ Keberhasilan rekonsiliasi ini menjadi contoh yang lain yang masih ragu melakukannya.

Upaya kehati-hatian yang dilakukan NU dalam menghadapi PKI ini tercermin dengan dibentuknya Tim Pembela Korban di Trenggalek, yang bertujuan untuk membela orang-orang yang salah tangkap atau tidak pantas dituduh sebagai PKI. Termasuk orang-orang yang hanya ikut-ikutan atau ditipu PKI mereka juga disendirikan, belum termasuk orang yang mengaku PKI untuk menyelamatkan orang terdekatnya, atau ada orang sama sekali tidak terlibat tetapi difitnah¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Abdul Hamid Wilis, *Aku menjadi Komandan Banser*, Penerbit, Public policy Institute, Trenggalek, 2011, hal. 93.

¹⁰⁵ Ibid, hal. 218.

Kelompok semacam itu berusaha dipisahkan dengan kader PKI yang sesungguhnya. Mereka itu perlu diselamatkan dari hukuman.

Demikian juga yang terjadi usai pembasmian PKI pada Desember 1965 terdapat desa-desa yang penduduknya mayoritas PKI, dengan sendirinya meninggalkan banyak janda dan anak yatim. Sebagai rasa tanggung jawab terhadap orang yang terlantar maka NU memberikan santunan, perlindungan layanan dan pendidikan terhadap mereka. Para keluarga mereka yang menjadi korban meninggal dunia diselamati dibacakan tahllil dan berbagai ritual keagamaan dan tradisi lainnya, masyarakat NU silih berganti datang untuk mendoakan mereka.

Kelompok NU melakukan hal ini karena keluarga PKI belum ada yang berani melakukan selamatan sendiri dengan mengundang banyak orang, khawatir dituduh aparat melakukan penggalangan masa. Tetapi karena mereka mendapatkan perlindungan dari NU mereka merasa aman. Kemudian mereka diberi pelajaran tentang agama dan anak mereka disekolahkan sehingga dalam waktu singkat mereka menjadi warga yang mendapatkan hak-hak sosial dan budaya dan tidak lagi terdiskriminasi. Karena memang yang salah adalah bapaknya atau kakanya, bukan istri dan anaknya.

Begitu juga setelah dilakukan Operasi Trisula di Blitar Selatan tahun 1968, banyak sekali PKI yang dibantai oleh aparat keamanan. Di daerah yang terkena operasi

itu para Kiai dan pimpinan NU seperti Kiai Abdurrahim Shiddiq mengambil sekitar 30 orang anak yatim dari daerah perkampungan PKI. Mereka itu diasuh, kemudian disekolahkan hingga lulus di pesantren maupun sekolah umum, bahkan dilindungi diakui sebagai anaknya, sehingga memungkinkan mereka itu bisa masuk menjadi pegawai negeri. Mereka itu tidak mengenal lagi Marxisme ataupun komunisme bahkan PKI sebagaimana orang tua mereka. Upaya kalangan NU dan Kiai Pesantren yang penuh risiko itu dijalankan dengan penuh kesungguhan, karena bisa saja mereka dituduh melindungi anak PKI atau dianggap tidak bersih lingkungan. Semua risiko berat itu diabaikan demi tercapainya kemaslahatan umat. Kesungguhan itu membuahkan hasil selain para tokoh NU tetap selamat dari berbagaimacam tuduhan. positifnya banyak bekas PKI pemuda atau orang dewasa yang kembali ke pesantren dan diterima sebagai santri pesantren sebagaimana santri yang lain dan diterima sebagai warga masyarakat apa adanya tanpa ada diskriminasi..

Hal serupa juga terjadi di Jembrana Bali setelah pertempuran antara NU-PKI usai banyak ada beberapa tokoh PKI desa yang menyatakan keluar dari PKI dan minta perlindungan pada NU. Permintaan mereka diterima dengan tangan terbuka. Cara yang ditempuh, sebagian mereka dimasukkan dalam Rukun Kifaya Ansor (RKA), sehingga mereka bisa merasa aman mendapatkan perlindungan di situ, kemudian mereka diajari kembali agama, sejak saat itu gelombang menjadi

Islam kembali sangat besar, sehingga kekuatan kaum santri juga semakin membesar.

Bahkan yang diterima kembali bukan hanya kalangan awam, salah satu tokoh PKI adalah Mat Rais sekretaris desa Loloan Jawa, ketika tokohnya masuk RKA maka banyak kalangan rakyat yang mengikutinya, bahkan beberapa anggota PKI yang berasal dari agama Hindu juga masuk RKA dengan sendirinya mereka menjadi Muslim, karena dalam komunitas ini mereka merasa lebih terlindungi. Kemudian Rukun Kifaya Ansor itu diubah menjadi Rukun Kifaya Ahlussunnah wal jamaah (RKA). Beberapa bekas anggota PKI yang dirawat Ansor itu sampai sekarang masih hidup bahkan mengelola beberapa masjid.¹⁰⁶ Santunan terhadap para bekas aktivis dan simpatisan PKI itu membuat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pasca konflik itu cepat tercapai. Mereka kembali diterima sebagai anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi, karena mereka telah menjadi warga masyarakat secara tulus tanpa diwarnai dendam, bahkan mereka merasa mengikuti jalan yang salah. Ketulusan itu yang membuat masyarakat juga bisa menerima secara tulus.

Langkah serupa juga terjadi di beberapa tempat di Sumatera Utara, para tersangka terlibat partai terlarang PKI, atau PKI yang hanya ikut-ikutan segera disadarkan kembali menjadi warga biasa yang bermasyarakat secara

¹⁰⁶ Wawancara dengan Akromo, seorang aktivis Ansor Jembrana Bali tahun 1960-an.

baik dan beragama dengan baik. Sementara keluarga dari korban PKI baik orang dewasa dan terutama anak-anak mereka ditampung oleh para tokoh NU disekolahkan dan dimasukkan pesantren, sehingga mereka menjadi muslim yang taat¹⁰⁷. Hal itu terjadi di hampir semua kota yang ada di Sumatera Utara, terutama di kawasan Tapanuli Selatan yang Islamnya sangat kuat.

Bagi mereka yang keras kepala dan tidak mau bergaul lagi dengan masyarakat setempat, karena keangkuhannya, perasaan berdosa atau kebenciannya, biasanya mereka itu menyingkir ke daerah lain untuk menyembunyikan identitasnya. Tetapi bagi yang sadar mereka segera bergabung kembali dengan masyarakat dan merekapun diterima dengan tangan terbuka, setelah menunjukkan kesungguhan dan ketulusannya. Masyarakat, khususnya warga NU menerima kehadiran mereka dengan alasan jumlah mereka terlalu banyak untuk dipenjara apalagi dibunuh, tentu akan susah merawatnya. Karena itu mereka disadarkan, dibimbing agar menjadi warga Negara yang baik dan menjadi muslim yang baik. Dan langkah itu dianggap mereka tepat karena dianggap membawa kedamaian yang lebih langgeng.

Hal ini bisa terjadi karena ada kejujuran dan ketulusan dari keduanya sehingga tumbuh rasa saling percaya. Bagi masyarakat semacam itu tidak muncul dendam justeru

¹⁰⁷ Wawancara dengan KH Hasan B Batubara, Medan 10 September 2013.

rasa simpati dan hormat pada NU, karena dalam membasmi PKI semata demi tugas suci jihad mempertahankan agama dan membela Negara bukan atas dasar kebencian, setelah pelaku di hukum maka mereka juga diperlakukan sebagai manusia pada umumnya yang memiliki martabat dan harga tinggi yang harus dihormati.

Kalau tidak didasari dengan hukum dan keadilan, maka pemberantasan PKI itu mengarah pada pemusnahan manusia dalam jumlah massal, karena dalam Pemilu 1955, PKI didukung enam juta orang, dan setelah itu terus berkembang. Dari jumlah itu DN Aidit mengklaim diantaranya sekitar dua setengah juta adalah kader militan. Setelah itu berkembang lagi hingga sekitar 20 Juta. Maka kalau pembasmian yang dilakukan maka akan memusnahkan manusia dalam jumlah besar itu. Tetapi di sini juga aspek penyadaran dan pembinaan lebih dikedepankan. Mereka menjadi anggota PKI tidak semuanya atas kesadaran dan kemauan sendiri. Mereka terjerumus menjadi aktivis PKI karena ketidaktahuannya atau terkecoh dengan bujukan PKI, mereka itu bisa disadarkan kembali.

Hal itu tercermin dalam upaya yang dilakukan kelompok NU dan Ansor di Kecamatan Kepung Kediri, rumah orang-orang PKI diberi symbol NU dan Ansor agar mereka tidak menjadi sasaran pembantaian massal. Upaya itu berhasil dengan baik sehingga tidak terjadi pembantaian massal di kecamatan yang mayoritas penduduknya PKI. Langkah simpatik itu mempercepat

pemulihan keamanan, sehingga tidak lagi muncul PKI di kawasan itu karena adanya dendam. Mereka juga merasa sebagai korban provokasi sehingga menjadi pendukung PKI. Setelah merasa aman masyarakat berbondong-bondong masuk NU untuk memperoleh perlindungan.

Langkah rekonsiliasi yang terjadi secara alami yang menumbuhkan simpati juga terjadi di Kediri, Jawa Timur di Desa Trisula Kecamatan Ploso Klaten yang dulu penduduknya mayoritas PKI itu pada tahun 1997 penduduk desa itu mengajukan permohonan kepada PCNU Blitar untuk dibentuk PCNU. Mengingat posisi NU dihadapan Orde Baru sangat kritis maka PCNU tidak berani memberi izin karena khawatir dituduh Orde Baru sebagai simpatisan PKI. Tetapi kemudian ketika disampaikan pada Ketua Umum PBNU di Jakarta KH Abdurrahman Wahid permohonan tersebut diluluskan dengan langsung dibawah perlindungan Pesantren Tebuireng, akhirnya desa Trisula yang dulu mayoritas penduduknya PKI, sekarang anak cucu mereka menjadi aktivis NU dan pemudanya masuk Ansor atas kesadaran dan kemauan sendiri. Mereka paham bahwa apa yang dilakuakn pendahulu mereka menyerang agama dan melawan Negara yang diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta adalah tindakan salah, karena itu selain beragama dengan baik mereka juga bernegara dengan baik.

Pada diri mereka tidak tercermin rasa dendam, karena mereka merasa apa yang dilakuakn PKI salah dan apa yang dilakukan NU untuk membela agama dan Negara

itu benar. Dengan kesadaran itu mereka bersimpati pada NU yang sejak awal melindungi dan melayani mereka ketika dalam keadaan krisis eksistensial dan dalam ancaman dan represi yang sangat keras. Sementara mereka mengalami trauma berkepanjangan sejak pembersihan terhadap sisa-sisa PKI dimulai. Mereka butuh perlindungan dan rasa aman, karena mereka hanya keluarga dan anak cucunya. Mereka tidak ikut melakukan provokasi atau pemberontakan. Mengingat konflik antar NU dengan PKI pada dasarnya adalah konflik sosial, maka rekonsiliasi secara sosial akan lebih mudah untuk dilaksanakan, bahkan oleh masyarakat yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Pola itu berlangsung dengan lancar dan berjalan baik, sehingga reintegrasi sosial bisa kembali terjadi setelah dialanda pertikaian berkepanjangan yang menelan banyak korban.

B. Rekonsiliasi Politik

Sejak masa akhir Orde Baru para bekas tahanan politik (Tapol) sudah banyak yang dibebaskan, mereka mulai menulis berbagai buku memoar yang berisi pembelaan mereka, bahwa mereka tidak bersalah bahkan menyalahkan TNI dan rezim Orde Baru pada umumnya. Bahkan tidak sedikit yang menuduh NU dan terutama Ansor sebagai jagal. Saat itu para bekas Tapol itu bergabung bersama kekuatan Pro demokrasi untuk melawan Orde Baru, sehingga suara mereka mulai terdengar di kalangan para aktivis.

Tentu saja informasi mereka sangat berbeda dengan informasi yang beredar selama ini, yang banyak menyudutkan mereka, karena itu mereka berusaha melakukan klarifikasi dengan mengeluarkan buku memoir sesuai dengan versi mereka sendiri. Perlu dicatat bahwa memoar yang didasarkan pada pengalaman pribadi para tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI tersebut sangat menarik bagi kalangan muda yang tidak turut mengalami peristiwa tersebut, dan hanya mendapatkan informasi dari para aktivis Orde Baru terutama dari kalangan Tentara. Tidak urung hal itu dipercayai oleh banyak kalangan, sehingga melakukan pembelaan terhadap PKI secara gigih. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan diri sendiri, tanpa tahu duduk soalnya, bagaimana peristiwa tersebut bermula dan bagaimana terjadi serta bagaimana berakhir. .

Hal itu yang merisaukan generasi tua baik dari kalangan Kiai maupun TNI dan para aktivis lainnya termasuk kalangan akademisi, kalangan seniman dan jurnalis yang mengalami langsung peristiwa tahun 1965 tersebut. Sekaligus mereka mengetahui perilaku semua orang yang selama ini menjadi pelaku kerusuhan 1965 itu secara dekat. Tulisan mereka itu segera ditandingi dengan opini balik dengan menunjukkan data yang ada bahwa mereka adalah anggota PKI sebenarnya yang turut merancang kebijakan PKI dan terbukti melakukan kekejaman.

Untuk mengatasi berbagai silang pendapat yang berkepanjangan itu kemudian muncul ide untuk

melakukan rekonsiliasi baik dari kalangan aktivis sosial di dalam negeri, ataupun lembaga-lembaga internasional seperti Amnesty Internasional dan Mahkamah Internasional, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB serta beberapa lembaga swadaya masyarakat menyerukan diadakan rekonsiliasi yang bermaksud merehabilitasi bekas tahanan politik PKI dengan mengembalikan segala hak politiknya termasuk hak perdata, tanah dan aset yang selama ini disita termasuk gaji mereka yang tidak dibayarkan selama beberapa tahun, baik sebagai TNI pegawai negeri sipil atau sebagai karyawan swasta.

Untuk merealisasi langkah rekonsiliasi itu Presiden Abdurrahman Wahid yang mengusulkan pencabutan TAP MPR dan dilanjutkan dengan dengan permintaan maaf pada keluarga PKI yang menjadi korban dalam peristiwa 1965. Usul itu ditentang keras baik oleh kalangan parlemen sendiri dan terutama di kalangan umat Islam termasuk kalangan politisi. Hanya kalangan LSM yang mendukung gagasan itu. Ketika gagasan itu ditolak Presiden tidak berusaha mendorong parlemen mencabut TAP MPR tersebut. Hal itu untuk menunjukkan pada masyarakat internasional dan pada PKI sendiri bahwa mayoritas bangsa ini termasuk umat Islam masih menolak keras kehadiran PKI.

Demikian juga permintaan maaf dan usaha rekonsiliasi itu ditentang sebagian masyarakat termasuk kalangan Islam, tetapi anehnya mantan aktivis Lekra Pramoedya Ananta Toer menolak permintaan maaf Abdurrahman

Wahid dan menolak upaya rekonsiliasi yang dianggapnya tidak serius dengan mengatakan:

“saya menganggap permintaan maaf Gus Dur dan idenya tentang rekonsiliasi cuma basa basi. Dan gampang amat meminta maaf setelah semuanya yang terjadi itu. Saya tidak memerlukan basa-basi.

Gus Dur pertama-tama harus menjelaskan dia berbicara atas nama siapa. Mengapa harus dia yang mengatakannya? Kalau dia mewakili suatu kelompok, NU misalnya, kenapa dia berbicara sebagai presiden? Dan jika dia bicara sebagai presiden kenapa lembaga dilewatinya begitu saja?”¹⁰⁸

Karena itu upaya rekonsiliasi secara politik dengan pola seperti ini mengalami kebuntuan, ditolak oleh kedua belah pihak, baik dari pihak PKI maupun pihak non PKI.

Hingga belakangan ini kalangan aktivis politik baik Komnas HAM maupun KontraS terus mendesak pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung agar segera menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tentang terjadinya pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966. Mereka juga meminta segera dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, guna menangani persoalan pelanggaran yang sudah berlarut-larut itu¹⁰⁹. Bahkan lembaga tersebut juga

¹⁰⁸ Pramoedya Ananata Toer, *Saya Bukan Nelson Mandela*, *Tempo*, 3-9 April 2000.

¹⁰⁹ Baca *Kompas*, 24 Juli 2013.

telah mendesak Presiden, sehingga Presiden berusaha meminta maaf, yang ditentang oleh berbagai pihak, termasuk kalangan TNI sendiri yang selama ini dituduh sebagai aktor utama pelanggaran yang terjadi.

Bagaimanapun sulitnya upaya rekonsiliasi politik ini tetap harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan ketulusan, sebab kalau tidak proses rekonsiliasi yang telah berjalan puluhan tahun itu akan ikut rusak. Sejahul semua pihak berniat tulus usaha rekonsiliasi akan terjadi. Tetapi rupanya tidak sedikit yang masih diliputi rasa dendam sehingga bisa menghambat setiap langkah. Terjadinya penyebaran opini yang cenderung memprovokasi itu akan mempersulit terjadinya proses rekonsiliasi ini. Sebab yang terjadi bukan saling memaafkan tetapi saling menyalahkan. Kecenderungan ini yang masih terus berkembang sehingga rekonsiliasi belum juga tercapai. Maka di sini diperlukan kematangan dan kedewasaan dalam bersikap oleh semua pihak.

Tampak jelas sekali bahwa kalangan internasional dan kalangan LSM tidak memahami dan bahkan mengabaikan proses rekonsiliasi politik yang telah berjalan selama ini. Pertama, telah terjadi silaturahmi bahkan paguyuban antara korban para jenderal yang terbunuh tahun 1965, dengan keluarga para tokoh PKI. Kedua, Sebagaimana yang dilakukan para tokoh Kiai NU, beberapa jenderal TNI juga merawat dan melindungi anak-anak tokoh PKI disekolahkan hingga perguruan tinggi. *Ketiga*, bahwa para mantan Tapol PKI

telah diberi hak pilih secara politik sehingga mereka bisa mengikuti Pemilu secara berkala, *keempat*, hak dan kebebasan bicara termasuk mengajar hingga di perguruan tinggi, dan menulis di media telah diberikan pada mereka, *Kelima*, bahkan mereka juga sudah mendapatkan hak untuk dipilih, maka bisa dilihat anak turun PKI sudah bisa menjadi anggota DPR, Pimpinan Parlemen bisa menjadi gubernur, bupati dan sebagainya.

Tanpa pemahaman dan pengakuan terhadap proses rekonsiliasi baik rekonsiliasi sosial maupun rekonsiliasi politik yang telah terjadi selama ini, maka rekonsiliasi yang diperjuangkan belakangan ini hanya akan dijadikan sarana untuk membangkitkan kemarahan kedua belah pihak dan sebagai alat melakukan adu domba. Ini yang perlu dihindari.□

BAB VI

PENUTUP

Dengan uraian sederhana yang menyajikan serangkaian fakta dan peristiwa yang terjadi sejak setelah terjadinya Peristiwa Madiun 1948 hingga pertengahan 1960-an menjadi sangat jelas kenapa terjadi konflik sosial yang bersifat horizontal antara NU dengan PKI yang kemudian berpuncak menjadi konflik politik yang bersifat vertikal antara PKI dengan pemerintah yang sah, ketika partai itu berusaha merebut kekuasaan Negara. Saat itulah PKI berhadapan dengan TNI sebagai Aparat Negara dan juga dengan rakyat sebagai abdi Negara.

PKI sebagai partai yang mengklaim diri sebagai progresif revolusioner melakukan provokasi serta berbagai macam gangguan berkepanjangan terhadap lawan-lawannya politiknya yang digolongkan sebagai Tujuh Setan Desa yang antara lain adalah para Kiai Pesantren dan pimpinan NU. Penghinaan terhadap ajaran Islam dilakukan dengan membakar dan menginjak Al-Qur'an serta menduduki dan menodai masjid yang dianggap simbol kehormatan agama Islam. Dan tidak kalah pentingnya adalah meneror dan membunuh para kiai pesantren.

Selain itu berbagai asset masyarakat NU dan non PKI lainnya seperti sawah dan perkebunan mereka duduki dan dibagi-bagikan kepada rakyat. Selain itu juga menguras berbagai gudang hasil pertanaian milik penduduk untuk keperluan perjuangan PKI. Demikian juga asset pemerintah yang merupakan sarana milik rakyat seperti perkebunan, sarana transportasi serta berbagai pabrik mereka kuasan sebagai markas mereka dan sekaligus sebagai sumber logistik mereka selama melakukan provokasi dan agitasi serta aksi pembabatan pada musuh mereka.

Terjadinya serangan terhadap agama dan perampasan terhadap harta benda seperti itu mengundang para pimpinan NU dengan pasukan Ansor dan terutama Bansernya untuk melakukan perlawanan dan serangan balik, untuk merebut asset yang mereka rampas dan kuasai. Karena keduanya memiliki pasukan yang sama-sama kuat dan sama-sama militan maka terjadinya pertempuran yang sengit dan menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Tidak semuanya bisa dibawa dan diselesaikan di pengadilan, sebagian besar diselesaikan di ladang dan jalanan sehingga menimbulkan banyak korban.

Apalagi setelah terjadinya peristiwa G-30-S/PKI yang tragis itu di mana semua kelompok Islam serentak menyerang PKI, selain itu kalangan TNI dan kekuatan nasional yang lain serentak menyerang PKI, sehingga timbul banyak korban dari kedua belah pihak, karena PKI kalah maka jumlah korban dari mereka tentu lebih

banyak, terutama dalam aksi pembersihan pada sisa-sisa pemberontak itu. Kemudian terjadi penahanan dan pembatasan gerak bagi para PKI dan simpatisannya, sehingga mereka kehilangan hak sosial, politik dan ekonomi mereka. Diskriminasi sosial semacam itu membuat mereka kehilangan ruang gerak dalam masyarakat.

Kalau dirunut dari peristiwa sejarah pemberontakan PKI sejak awal dilakukan terdapat estafeta kepemimpinan yang sangat sistematis. Para bekas pemberontak 1926 di Banten dan Jakarta dan sekitarnya seperti Musso, Alimin, Semaun dan sebagainya itulah yang kemudian melakukan pemberontakan di Madiun 1948. Demikian juga para bekas pelaku pemberontakan Madiun seperti Aidit dan kawan-kawannya itulah yang kemudian melakukan pemberontakan tahun 1965.

Begitu pula sejak awal kelahirannya kelompok komunis selalu bergandengan tangan dengan kelompok sosial demokrat, maka dalam pemberontakan Madiun kedua kelompok itu yaitu antara PKI dengan Pemuda sosialis Indonesia (Pesindo) bekerjasama melakukan pemberontakan. Demikian juga dalam pemberontakan PKI 1965, kelompok PSI-Pesindo dan kelompok kiri lainnya juga memberikan kontribusinya sebagaimana dilakukan oleh Kol. A. Latif dan Mayor Mulyono. Kalau dilihat kiprahnya selama ini, maka Subandrio juga bisa digolongkan dalam sindikasi tersebut. Selain itu polan pemberontakan PKI juga selalu sama, diawali dengan provokasi untuk memanaskan situasi melalui teror dan

penculikan dan pembunuhan. Baru setelah itu melaksanakan tindakan pemberontakan, setelah kalah lalu mencuci tangan bahwa mereka tidak terlibat bahkan menempatkan dirinya sebagai korban, mencari simpati dan bantuan.

Namun perlu dicatat bahwa bagaimanapun sengitnya pertikaian antara PKI dengan NU dan juga dengan TNI sertakekuatan non komunis lainnya, tetapi usaha mencari titik temu juga terjadi. Sesuai dengan kearifan masyarakat sendiri maka setelah terjadi konflik besar itu secara alami terjadi proses rekonsialisasi sosial di tengah masyarakat. Kalangan keluarga PKI yang telah sadar diterima hidup kembali di tengah masyarakat, mereka kembali menjadi orang beragama, dan berasyarakat dengan baik, sehingga secara alami mereka bisa menjadi masyarakat yang lain yang mendapatkan hak-hak sosial, politik dan budaya.

Begitu pula terhadap anak-anak korban dari PKI dirawat disantuni dan dilindungi oleh jamaah NU. Dengan demikian mereka bisa hidup layak dan bisa meneruskan pendidikan baik di pesantren maupun di sekolah, sehingga tidak terdiskriminasi atau tertinggal, bahkan kemudian mereka bisa masuk ke sector modern baik disektor swasta maupun pemerintahan. Rekonsiliasi ini mendahului apa yang pernah didesakkan oleh Amnesti Internasional atau Mahkamah Internasional serta kalangan aktivis politik yang lain. Rekonsiliasi social yang bersifat alami itu merupakan dasar pijakan bagi tercapainya rekonsiliasi politik yang direncanakan.[]

KEPUSTAKAAN

Abdul Hamid Wilis, *Aku menjadi Komandan Banser*, Penerbit, Public policy Institute, Trenggalek, 2011.

Abdul Mun'im DZ dan Adnan Anwar, *Historiografi NU*, naskah belum diterbitkan, Jakarta 2001.

- Agus Sunyoto Dkk, *Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiuan*, Penerbit Grafiti, Jakarta, 1990.
- Agus Sunyoto, *Banser jihad Melawan PKI*, Yayasan Peta Tulungagung, 1999.
- Anton taabah, *Jenderal Nasution Bicara Tentang G-30-S/PKI*, CV Sahabat, Cetakan Ketiga, Klaten, 2009.
- Arief Mudatsir Mandan, *Napak Tilan Pengabdian Idham Chalid*, Penerbit Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2008.
- Arief Mudatsir Mandan, *Subchan ZE Sang Maestro*, Penerbit yayasan Indonesia Satu, Jakarta, 2001
- Chalid Mawardi, *Pracatica Politica Nabdlatul Ulama*, Yayasan Pendidikan Practica, Jakarta 1967.
- Choirul Anam, *Gerak langkah Pemuda Anson, sebuah Percikan Sejarah kelahiran*, penerbit Aula, Surabaya, 1990.
- Djamal Marsudi, *Menyingkap Pemberontakan PKI dalam Peristiwa Madiun*, Merdeka Press, Jakarta, 1966.
- DN Aidit, *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948 dengan Peristiwa Sumatera 1956*, Yayasan Pembaruan, Jakarta, 1964.
- Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu, sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri)*.Penerbit Pensil 234, Jakarta 2011.
- JB Bury, *A History of Freedom of Thought*, Oxford University Press, Oxford 1952.
- KH Hasyim Asy'ari, *Khutbah Iftitah* disampaikan pada Muktamar ke 17 NU di Madiun 24 Mei 1947.
- Pramoedya Ananata Toer, *Saya Bukan Nelson Mandela*, Tempo, 3-9 April 2000.
- Pusat Sejarah PKI, *Pemberontakan 1926 sebagai Pemberontakan Nasional Pertama*, CV Pembangunan, Jakarta 1962.

Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1987.

Saifuddin Zuhri, *KH Wahab Hasbullah Bapak Pendiri NU*, Pustaka Falaalhiyah, Yogyakarta, 1983.

Saifuddin Zuhri, *Wahab Hasbullah, Ulama Pejuang*, Penerbit Falaakhiyah, Yogyakarta, 1985.

Subandrio, *Kesaksianku tentang G-30-S*, Jakarta awal September 2000.

VA. Lanasyev, *Marxist Philosophy*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1950.

Verslaag *Muktamar Nahdlatul Ulama XX*, Jakarta, 1959.

LAMPIRAN.1

Salinan.

EDITORIAL.

GERAKAN 30 SEPTEMBER

TEPAT tanggal 30 September telah dilakukan tindakan penjelamatan terhadap diri Presiden Sukarno dan R.I. dari Kup apa yang dinamakan Dewan Djendral. Menurut apa jang dinamakan oleh Gerakan 30 September yang dikepalai oleh

Letkol. Untung dari Batalion Tjakrabirawa penjelamatan diri Presiden Sukarno dan R.I. dari kup Dewan Djendral adalah tindakan jang patriotik dan Revolusioner.

Betapun dalih yang digunakan oleh Dewan Djendral dalam usahanya melakukan kup adalah tindakan jang terkutuk dan kontrak revolusioner.

Kita Rakyat memahami betul apa yang dikemukakan oleh Letkol. Untung dalam melakukan gerakannya jang patriotik itu.

Tetapi bagaimanapun juga persoalan tsb. adalah persoalan intern AD. Tetapi kita Rakjat yang sadar akan politik dan tugas-tugas revolusi mejakini akan benarnya tindakan jang dilakukan oleh Gerakan 30 September untuk menjelamatkan Revolusi dan Rakjat.

Dukungan dan hati Rakjat sudah pasti difihak gerakan 30 September. Kita serukan kepada seluruh Rakjat untuk mempertadjam kewaspadaan dan siap menghadapi segala kemungkinan.

-----oOo-----

disalin dari s.k. HARIAN RAKJAT

Sabtu, 2 Oktober 1965

TAHUN KE XV NO. 4238.

LAMPIRAN 2

PENGURUS BESAR Jakarta, 9 Oktober 1965.-
PARTAI-NAHDLATUL 'ULAMA'- DJAKARTA
Alamat : Kramat Raya 164.

Kepada
Jth. Pengurus Wilayah dan
Tjab. Partai Nahdlatul-
'Ulama seluruh :
INDONESIA

I N S T R U K S I .

Inna lillahi wanna ilaihi rodji'un

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, dalam petualangan
kontra revolusioner dari apa jang dinamakan "Gerakan 30 September"

pada tanggal 1 Oktober '65 dinihari di Djakarta, 6 orang Perwira Tinggi dan seorang Perwira Pertama Angkatan Darat telah gugur. Mereka itu adalah :

1. Letnan Djendral 1 A. Yani.
2. Major Djendral Suprpto.
3. Major Djendral S. Parman.
4. Major Djendral Harjono MT.
5. Brigadir Djendral D.I. Pandjaitan.
6. Brigadir Djendral Sutojo.
7. Letnan Piere Tendean.

Sudah barang tentu gugurnja ketudjuh perwira Angkata Darat itu merupakan suatu pengorbanan jang terlampau mahal, jang Angkatan Darat berikan bagi kehormatan Angkatan dan tegaknja revolusi.

Sebaliknja, petualangan kontra revolusioner “Gerakan 30 September” jang didalangi oleh kaum komunis itu disamping mengingatkan kita kepada petualangan jang pernah mereka lakukan pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, d juga sekali lagi membuktikan kekedjaman dan kebiadaban kaum atheis manakala mereka telah melakukan teror.

Berhubung dengan terdjadinja musibah jang menimpa Bangsa dan Negara ini, maka dengan ini kami instruksikan kepada seluruh warga Partai Nahdlatul ‘Ulama dan seluruh badan-2 otonom di bawah pandji-pandji N.U. agar melakukan SEMBAHYANG GHOIB bagi arwah-arwah para Pahlawan Revolusi tersebut diatas.

Semoga arwah Pahlawan-2 Revolusi kita itu diterima oleh Allah s.w.t. dan ditempatkanlah mereka disisi-Nja, serta diterimalah segala amal dan darma bakti mereka kepada Bangsa dan Tanah Air, dan dibalaslah dengan pahala jang setimpal adanja. Amien – ja robbal ‘alamien.

Wassalam;
Pengurus Besar

Partai =Nahdlatul 'Ulama=

K e t u a I.

Sekretaris II;

(K.H.M. DACHLAN)

(H. MOH. MARCHUM)

Tembusan :

1. Neven-2 Partai NU
2. Arsip

LAMPIRAN 3

Salinan.

I N S T R U K S I

No. Ist/02/PP/1965.

Menjusuli pernyataan Putjuk Pimpinan Gerakan Pemuda ANSOR No.Ist/PP/1965, dan pengumuman Pucuk Pimpinan No.Ist/01/PP/1965 masing2 tertanggal 1 Oktober 1965, maka dengan ini kami instruksikan kepada segenap anggauta, kader2 dan pimpinan2 Gerakan Pemuda Ansor di Djakarta Raja chususnja dan diseluruh tanah air umumnja, agar :

1. Tetap mempertinggi kewaspadaan terus menerus dan menjaga agar jangan sampai melibatkan diri, baik perorangan maupun organisasi ke dalam aksiz kontra revolusioner dari apa jang menamakan dirinya "GERAKAN 30 SEPTEMBER".
2. Dengan jalan bagaimanapun, membantu pihak ABRI untuk memulihkan keamanan dan menjaga keutuhan bangsa serta menjelamatkan Revolusi dibawah pimpinan Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Pahlawan Islam dan Kemerdekaan Bung Karno.
3. Untuk langkah2 selandjutnya dalam rangka menumpas 'GERAKAN 30 SEPTEMBER" dan antek2nya serta langkah2 pengamanan hendaknya menunggu dan hanya melaksanakan

instruksiz dari Pimpinan “Kordinasi Djamaah Nahdlatul Ulama” jang telah dibentuk oleh PB.N.U. pada tingkat Pusat, dan akan dibentuk oleh Pimpinan2 Partai di Daerah2 menurut tingkat2 jang sederadjat.

4. Demikianlah harap instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknja.

Djakarta, 3 Oktober

1965.-

PUCUK PIMPINAN “ G.P. ANSOR “

Ketua Umum,

ttd.

(H.A.Chamid Widjaja.)
Mawardi.)

Sekretaris Umum

ttd.

(H.A. Chalid

**DAFTAR KARYAWAN
YANG DIPECAT KARENA TERLIBAT GESTAPU**

No	Nama	Status Pekerjaan (staf, pegawai, buruh, dsb)	Jabatan/kedudukan dalam		Informasi tambahan
			Perusahaan	Organisasi	
1.	Ramikir	Anggota dewan perusahaan	Bukan karyawan	Wakil SBG/ SOBSI	Seluruh karyawan--kecuali dua (2) anggota Dewan Perusahaan dan enam (6) anggota Dewan Pengurus SBG/ SOBSI Cabang PG Meritjan--dipecat karena absen dari tempat kerja tanpa ijin, sehingga mereka dapat diperkirakan terlibat dalam Gestapu
2.	S. Kidjo	Anggota dewan perusahaan	Bukan karyawan	Wakil BTI	
3.	Koesnan	Karyawan biasa	Kasir	SBG/ SOBSI	
4.	Jososoemarto	Karyawan biasa	Sekretaris kelas I	SBG/ SOBSI	
5.	Soeseno	Karyawan biasa	Sekretaris kelas I	SBG/ SOBSI	
6.	Kasmin	Karyawan biasa	Sekretaris kepala	SBG/ SOBSI	
7.	Sowardi SH	Karyawan biasa	Sekretaris kelas I	SBG/ SOBSI	
8.	Isnar	Karyawan biasa	Pembantu sekretaris	SBG/ SOBSI	
9.	Sodjo	Karyawan biasa	Sekretaris kelas I	SBG/ SOBSI	
10.	Soeradi	Karyawan biasa	Pembantu sekretaris	SBG/ SOBSI	
11.	Bandi Iskandar	Karyawan biasa	Pembantu sekretaris	SBG/ SOBSI	
12.	Mardjoeki	Karyawan biasa	Sopir	SBG/ SOBSI	Kedua anggota Dewan Perusahaan dan enam anggota Dewan Pengurus SBG/ SOBSI segera dipecat karena
13.	Soekiran	Karyawan biasa	Sopir	SBG/ SOBSI	
14.	Mardjoeki	Karyawan biasa	Penjaga kebun	SBG/ SOBSI	
15.	Radji	Karyawan biasa	Penjaga kebun	SBG/ SOBSI	

No	Nama	Status Pekerjaan (staf, pegawai, buruh, dsb)	Jabatan/kedudukan dalam		Informasi tambahan
			Perusahaan	Organisasi	
16.	Karijo Lahuri	Karyawan biasa	Penjaga kebun	SBG/ SOBSI	mereka diduga terlibat langsung dalam Gestapu
17.	Kaselan B.	Karyawan biasa	Mandor kebun	SBG/ SOBSI	
18.	Tjiptomangun	Karyawan biasa	Mandor angkut tebu	SBG/ SOBSI	
19.	Pardjan	Karyawan biasa	Mandor terbang	SBG/ SOBSI	
20.	Soedarsono	Karyawan biasa	Juru ukur kebun	SBG/ SOBSI	
21.	Djoeremi	Karyawan biasa	Asisten mandor kebun	SBG/ SOBSI	
22.	Darso	Karyawan biasa	Mandor kebun	SBG/ SOBSI	
23.	Mingan	Karyawan biasa	Penjaga kebun	SBG/ SOBSI	
24.	Sahar	Karyawan biasa	Penjaga kebun	SBG/ SOBSI	
25.	Kamaruddin	Karyawan biasa	Penjaga kebun	SBG/ SOBSI	
26.	Langkir	Karyawan biasa	Penjaga kebun	SBG/ SOBSI	
27.	Saman	Karyawan biasa	Masinis kereta	Pengurus SBG/ SOBSI	
28.	Poniman	Karyawan biasa	Masinis kereta	SBG/ SOBSI	
29.	Tukiman	Karyawan biasa	Masinis kereta	SBG/ SOBSI	
30.	Paing	Karyawan biasa	Tukang kelas satu	SBG/ SOBSI	
31.	Sariman	Karyawan biasa	Pengawas rel	SBG/ SOBSI	

No	Nama	Status Pekerjaan (staf, pegawai, buruh, dsb)	Jabatan/kedudukan dalam		Informasi tambahan
			Perusahaan	Organisasi	
32.	Kaseran	Karyawan biasa	Petugas umum	SBG/ SOBSI	
33.	Palilan	Karyawan biasa	Tukang kelas satu	Pengurus SBG/ SOBSI	
34.	Warimin	Karyawan biasa	Pembantu tukang	SBG/ SOBSI	
35.	Kuwadi	Karyawan biasa	Tukang kelas dua	SBG/ SOBSI	
36.	Sujadi	Karyawan biasa	Tukang kelas satu	SBG/ SOBSI	
37.	Partomihardjo	Karyawan biasa	Kepala tukang	Pengurus SBG/ SOBSI	
38.	Darmo	Karyawan biasa	Asisten masinis kereta	Pengurus SBG/ SOBSI	
39.	Sudjud	Karyawan biasa	Pembantu tukang	Pengurus SBG/ SOBSI	
40.	Loekito	Karyawan biasa	Tukang kelas satu	SBG/ SOBSI	
41.	Mukiran	Karyawan biasa	Pensiunan	SBG/ SOBSI	
42.	Sadiran	Karyawan biasa	Asisten petugas poliklinik	SBG/ SOBSI	
43.	H. Soemardi	Staf	Sinder timbang	Pengurus SBG/ SOBSI	
44.	Pieter Latupeirissa	Staf	Pengawas gudang	Pengurus SBG/ SOBSI	

LAMPIRAN 5

DAFTAR NAMA WARGA N.U. KORBAN AKIBAT GERAKAN G.30.S./PKI KE II

PEMBUNUHAN, PENCULIKAN DAN PERAMPOKAN DI DAERAH JATIM

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
KECAMATAN REDOTAN, TULUNGAGUNG				
1.	8-10-1967	Sdr. Tjarik Desa	Desa Ktassa Tulungagung	Penganiayaan dirampok rumahnya dengan kerugian Rp. 28.000,-
2.	14-12-1967	Nendek Al Rusdi	Desa Tenggend	Disembelih dengan kejam dan menggondol barang- barangnya seharga Rp. 32.000,-
3.	27-12-1967	Sdr. Amatredje (calon jemaah Haji)	Desa Tanen	Dirampok di rumahnya sehingga membawa kerugian Rp. 15.000,- tanpa dianiaya

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
4.	28-12-1967	Sdr. Kasim sedang sakit	Desa Tanen	Didatangi rumahnya dan dipukuli sampai setengah mati
5.	1-1-1968	Sdr. Martoredjo	Desa Jatidewe	Perampok/perusuh dapat menguasai dengan membawa barang-barang tuan rumah
6.	1-1-1968	Sdr. Adam	Desa Jatidewe	Dibunuh
7.	1-1-1968	Sdr. Djaelani	Desa Jatidewe	Dilukai dengan berat
8.	5-1-1968	Sdr. Sukani-bele anak Kartodasim	Desa Sumber Agung	Enam orang seragam hidjau dengan topi merah bersenjata api, celeret dengan maksud mencari Sukani-bele untuk dibunuh dan tidak berhasil

KECAMATAN KALIDAWER TULUNGAGUNG

9.	28-12-1967	Sdr. Imam Mochtar	Desa Ngebalan Dukuh Ngeluweng	Perampok (8 orang) dengan senjata pedang dan pentung membunuh Pak Imam Mochtar dan merampok barang-barangnya
10.	30-12-1967	Sdr. Fadim	Kalisuko-suko Rejo	8 orang perampok barang-barangnya seharga Rp. 5.000,- dan membunuhnya (leher hampir putus)
11.	28-12-1967	Sdr. Andjit	Desa Ngebalan Dukuh Ngeluweng	Perampok 8 orang dengan senjata pedang dan pentung
12.	30-12-1967	Sdr. Salamun Mubaligh MWT Kalidawe	Desa Padas daerah Puser	Membuka dinding membunuh yang bersangkutan sampai mati
13.	15-1-1968	Sdr. Poniran mandor kebon aktif	Kalitengah Pucang Laban	Dibunuh secara kejam dan dirampok
14.	24-1-1968	Sdr. Musri	Dukuh Kasrepan	Dibunuh oleh orang-orang bersenjata tajam (diseret secara kejam) sampai mati

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
15.	31-1-1968	Sdr. Mukiran al Gendot	Tungganri	6 orang perampok bersenjata AK merampas uang Rp. 40.000,- dan mas 22 gram, melarikan diri
16.	31-1-1968	Sdr. Rustam Pengurus Ranting NU	Tungganri	Ditembak sampai tewas
17.	31-1-1968	Sdr. Muslan (BANSER)	Tungganri	Ditembak pahanya tembus
18.	3-2-1968	Sdr. H. Brahim	Ngobalan	Digedor tapi dapat menyelamatkan diri
KECAMATAN NGUNUT, TULUNGAGUNG				
19.	2-1-1968	Modim Sumberedjo	Desa Sumberedjo Tulungagung	Didatangi 25 orang penjahat untuk membunuhnya tetapi tidak berhasil karena kuatnya pintu dan titir dari masyarakat
KECAMATAN SUMBERGEMPOL, TULUNGAGUNG				
20.	1-1-1968	Nj. Sipin (muslimat) MWT	Desa Mirigambar (Sumbergempol)	Dibunuh dan dirampok
KECAMATAN BOJOLANGU, TULUNGAGUNG				
21.	1-1-1968	Sdr. Sadjuri (Tjarik)	Desa Ngranti MWT. Bojolangu	5 orang bersenjata tajam dan pistol mengikat Pak Sadjuri dan dipistol pelipisnya sehingga tembus ke kanan kupingnya, mati seketika itu. Setelah itu dirampok barang-barangnya kl. Rp. 2.600,-

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
22.	17-2-1968	Sdr. Dajani (Ansor)	Desa Sabentoro (letaknya dipinggir kota)	5 orang usaha membunuh pada waktu itu rumahnya yang bersangkutan dalam keadaan banjir, penjahat datang membawa perahu. Disini mendapat perlawanan secara gigih 1 lawan 5. Walaupun dapat lolos dari pengejaran, tapi akibatnya: luka berat karena tembusan 8 peluru tembus dilengan dan kaki, didada sebelah kiri peluru mengeram didalamnya dan luka akibat bacokan pecok, saat ini RS. Kediri
KECAMATAN BINANGUN, BLITAR				
23.	10-12-1967	Sdr. Sukandar informan Skodim 0808	Desa Porwordjo	Akan diculik oleh oknum berseragam ABRI sebanyak 3 orang dengan senjata api, tapi dapat digagalkan
24.	11-12-1967	Warga N.U.	Binangun	Percobaan pembunuhan, dan dirampok barang-barangnya. Polisi tidak memberikan reaksi secara positif, walaupun kemungkinan dapat ditangkap (lewat dimuka pos penjaga)
25.	7-1-1968	Sdr. Djari (Kyai)	Dukuh Sekargadung	Usaha akan diculik, tapi dapat gagal
26.	16-1-1968	Sdr. Imam Djarkasi (Kyai)	Desa Wates	3 orang melakukan perampokan dengan pakaian seragam ABRI hijau dan loreng, memakai senjata api
27.	17-1-1968	Sdr. Sarip (tokoh Ansor)	Desa Ringinanom	6 orang bersenjata pistol pakaian seragam ABRI, mencoba membunuh yang bersangkutan. Tapi tidak sampai meninggal

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
28.	31-1-1968	Masjid	Desa Birowo	Pada waktu melakukan sembahyang isya terjadi pelemparan granat
29.	31-1-1968	Sdr. Kasan Mukri (tokoh N.U.)	Desa Sukorame	6 orang bersenjata klewang pakaian seragam hijau dan kuning, membunuh yang bersangkutan kemudian dirampok barang-barangnya
KECAMATAN KESAMBEN, BLITAR				
30.	28-12-1967	Sdr. Abdullah	Desa Tepas	Dirampok dengan senjata api
31.	29-12-1967	Sdr. Machluch	Desa Tepas	Dirampok dengan senjata api
KECAMATAN KADEMANGAN, BLITAR				
32.	13-12-1967	Sdr. Maksun (tokoh N.U.)	Desa Plosorejo	Dibunuh dengan senjata api dan dirampok barang-barangnya
33.	13-12-1968	Sdr. Djarna (Ketua Ansor)	Desa Panggung Duwet	Dibunuh dengan senjata tajam oleh 3 orang berseragam polisi dan 4 orang berseragam Hansip
34.	13-2-19-68	Sdr. Marli (Sek. Ansor)	Desa Panggung Duwet	Dibunuh dengan senjata tajam oleh 3 orang berseragam polisi dan 4 orang berseragam Hansip
KECAMATAN SRENGAT, BLITAR				
35.	3-1-1968	Sdr. Amat Sulaeman	Desa Selokadjang	Dibunuh dengan senjata api dengan pakaian militer, kemudian dirampok hartanya
36.	3-1-1968	Sdr. Imam Koradji	Desa Selokadjang	Dibunuh dengan senjata api pakaian seragam militer, kemudian dirampok hartanya

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
KECAMATAN SUTODJAJAN, BLITAR				
37.	9-1-1968	Sdr. Iroham (Ketua NU)	Desa Kaligambang	Usaha diculik, tapi gagal
KECAMATAN PONGGOK, BLITAR				
38.	17-1-1968	Sdr. Najat	Desa Begelaran	Dirampok oleh 8 orang, pakaian preman seorang bersenjata api
KECAMATAN SANANKULON, BLITAR				
39.	12-2-1968	Sdr. Selo (tokoh Ansor)	Desa Sumberingin	Ditembak tidak mempan, kemudian dirampok barang-barangnya
KECAMATAN KALITIDU, BODJONEGORO				
40.	12-2-1968	H. Abdul Fatah (Wakil Rois Sjuritjah dan Anggota DPRDGR)	Desa Pungpungan	7 orang bersenjata sten dan pistol dengan pakaian seragam hijau dan loreng menculik yang bersangkutan dibawa ke kali Solo dengan adanja ceceran darah. Sampai sekarang belum tahu nasibnya. Dan terdengar tembakan
41.	12-2-1968	Sdr. Tasripin (Kamituwo) tokoh Ansor	Desa Modjosari	5 orang bersendjata sten dan pistol dengan pakaian seragam hidjau dan loreng menculik yang bersangkutan dibawa ke kali Solo dengan adanja darah berjetjetjeran. Sampai sekarang belum diketemukan nasibnja. Kemudian merampas harta benda lk. Rp. 10.000,-

KRONOLOGI PEMBERONTAKAN PKI

1920 : PKI lahir, sebelumnya menyamar dalam SI Merah.

1926 : PKI melakukan pemberontakan nasional, para pimpinannya dibuang ke Digul, sebagaian lari keluar negeri. Para ulama menjadi korban penangkapan dan pesantren serta masjidnya diobrak abrik Belanda.

1945 : PKI memberontak di Pantura, para ulama disiksa, masjid dan pesantren dibakar.

1948 : PKI melakukan pemberontakan di Madiun dan sekitarnya ribuan santri dan ulama dibunuh, pesantren dan masjid dibakar.

1949 : PKI membakar Masjid Agung Trenggalek, Imam dan takmir Masjid serta jamaah disiksa.

1951 : PKI Menyerbu Markas Brimob Jakarta Utara dan Gedung Pendidikan Nasional Bogor 80 orang menjadi korban.

1962 : PKI Menyerbu Masjid Agung Kembangkuning peninggalan Sunan Ampel Surabaya, Quran dan kitab lainnya diinjak-injak dan dibakar.

1963 : PKI melakukan penghinaan terhadap agama dengan mementaskan reog, ludruk serta kethoprak

dengan lakon *Matinya Tuhan*, sehingga mengakibatkan perkelahian.

1964 : PKI melakukan aksi sepihak merebut tanah rakyat dan pemerinah sehingga terjadi pertumpahan arah, kalangan NU menjadi korban.

1965 : PKI melakukan kudeta berdarah yang berusaha mengganti Negara Pancasila dengan Negara Komunis. Beberapa jendral terbunuh.

1968 : PKI melakukan terror dari Blitar Selatan, sehingga mengakibatkan ratusan korban di kalangan warga NU dan aparat pemerintah.

2000 : PKI menuduh NU dan TNI sebagai penjagal, dan dituntut minta maaf.